IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Local finance
- Autonomy
- Finance, personal

DISERTASI

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP DERAJAT OTONOMI DAERAH DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU

Dis E 03/09
Dau
P

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

NAHU DAUD

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Telah Diuji Pada Ujian Tertutup
Tanggal: 23 November 2007

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr.H. Imam Syakir,SE.
Anggota : 1. Prof. Dr. Soedjono Abipraja,SE.
2. Prof. Dr. Djoko Mursinto,Drs. Ec.,MEc.
3. Prof. Dr.H. Effendie,SE.
4. Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, SE.SU.
5. Prof. Dr. IBM. Santika,SE.
6. Prof. Dr. H. Sarmanu,M.S.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga Surabaya
Nomor 10396/J03/PP/2007
Tanggal: 3 Desember 2007

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga disertasi berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Derajat Otonomi Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya disertasi ini, maka dengan hati yang tulus dan ikhlas perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, selaku Promotor, yang telah mendorong penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini, dan dengan penuh keikhlasan dan kearifan memberikan saran dan petunjuk sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Pengalaman dan wawasan berfikir yang diberikan kepada penulis merupakan hal yang sangat berharga untuk penulisan disertasi dan pembelajaran dalam kehidupan penulis.

Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., MEc, selaku Ko-Promotor, yang penuh dengan kesabaran, kearifan, dan perhatian telah mengarahkan, memotivasi dan memberi saran-saran sekaligus koreksi yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi.

Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. H. Fasich, Apt., dan Prof. Dr. Med. Puruhito, dr., mantan Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa program Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. Hj. Sri Hajati SH., MS., Asisten Direktur I, Prof. Dr.H, R, Eddy Raharjo, dr.Sp. AnK.Ic., dan Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono. Drs. Ak., M. Ec., Ph.D., selaku Asisten Direktur II serta mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Muhammad Amin dr., mantan Asisten Direktur I Program Pascasarjana Prof. Dr. Laba Mahaputra, drh., M.Sc., dan Dr. Soenarjo, dr., M.S., M.Sc., mantan Asisten Direktur II, beserta seluruh staf dan karyawan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan fasilitas dan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, Prof. Dr. H. Effendie,SE., yang dengan penuh kesabaran, kearifan, keikhlasan, dan kedisplinan telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan dorongan kepada penulis selama mengikuti pendidikan Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE., Prof. Dr. H. Effendie,SE, dan Prof. Dr. Djoko Mursinto,Drs.Ec.,MEc., dosen penanggung jawab Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) Pogram Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah meletakkan dasar-dasar teoritik yang dapat dijadikan bekal oleh penulis dalam menyelesaikan disertasi.

Prof. Budiman Christiananta, MA, PhD, Prof. Dr. Ida Bagus Made Santika,SE., Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE., Prof. Dr. Zaenuddin, Apt., Prof. Dr. Lasiyo, MA,MM., Prof.Dr. H. Efendie, SE., Prof. Dr. Hj. Djumila Zain, Prof. Dr. H. Suroso. Imam Zadjuli, SE., Prof. Dr. Haryono Suyono, staff pengajar pada Program Doktor Studi ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah meletakkan dasar-dasar teoritik yang dapat dijadikan bekal oleh penulis dalam menyelesaikan studi.

Para guru kami di SD Negeri Sabaleh, SMP Islam Tobelo, SMEA Negeri Ternate yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis, sehingga dapat meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta para dosen kami di Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate dan Program Pascasarjana (M.Si) Universitas Airlangga Surabaya. Semoga Allah mencatat dan meridhoi amal ilmiah Bapak dan Ibu.

H. Rivai Umar,SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Khairun Ternate, yang telah memberikan desempatan, dorongan dan bantuan finansial untuk melanjutkan pendidikan doktor di Universitas Airlangga Surabaya. Hasannuddin Duko, SE.M.Si., selaku mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate dan Dr.Wahab Hasyim,SE.M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate yang telah memotivasi dan memberikan bantuan moril dan finansial dalam menempuh pendidikan doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Ayahanda tercinta H. Daud Ibrahim dan Ibunda Hatija Hatar (Alm) yang dengan ikhlas dan tanpa pamrih telah melahirkan serta mendidik dan membesarkan, serta senantiasa memberikan doa yang tiada hentinya bagi penulis, di kaulah doktornya secara hakiki wahai bunda, gelar Almarhumah sebagai gelar tertinggi menandakan telah engkau tamatkan pendidikanmu di "University of Life" di mana semua manusia menjadi mahasiswa untuk merah gelar Almarhum/Almarhumah. Begitu pula kepada kedua mertuaku Umra Lotar (Alm) dan Hj. Asia Sibua yang telah melahirkan dan membesarkan komplemen tulang rusukku serta melengkapi penulis pendamping hidup serta doa restu yang tiada hentinya dalam proses tuntutan ilmu.

Sudara-saudaraku tercinta: Sanif Daud sekeluarga, Sumarni Daud sekeluarga, Hairun Daud sekelurga, Kuntu Daud sekeluarga. Ipar-Iparku; Rajak Lotar,Sag sekeluarga, Amanan Lotar sekeluarga, beserta keponakan-keponakanku; Ida, Anto, Jamalun, Habib, Fajar, Yoyo dan Lara yang telah memberikan doa, restu dan motivasi untuk tetap melanjutkan studi sampai kejenjang doktor.

Terkhusus kepada buah hati tercinta; Istriku Suriati, anak-anakku: Rustian, Munfakiro dan Risaldi yang dengan segala ketulusan hati dan keikhlasan kusita waktunya untuk tidak menerima belaian kasih dan sayang dari suami dan ayahnya, serta doa yang tiada henti-hentinya buat suami dan ayahnya untuk menempuh pendidikan doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Oleh karena itu tidak berlebihan gelar doktor ini kudedikasikan kepada kalian.

Kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas mendoakan bagi keberhasilan penulis yang tiada dapat kami sebutkan satu per satu, kami haturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, Amin ya Rabbal Alamin.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RINGKASAN

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RINGKASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Derajat Otonomi Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyaraat Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku

Hakikat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus, menuju kemajuan dan perbaikan kearah yang diinginkan. Usaha mencapai kemajuan ditempuh melalui berbagai cara guna memperbaiki taraf hidup masyarakat, sehingga pembangunan tidak lain adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan kegiatan tersebut meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya. Secara umum hasil pembangunan dapat dilihat dari adanya perubahan sosial (*sosial change*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut harus memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka di era otonomi sekarang daerah dituntut untuk mampu mandiri terutama di bidang keuangan daerah. Kondisi ini menjadi sangat penting, karena mampu tidaknya daerah melaksanakan otonomi daerah sangat ditentukan oleh keuangan daerahnya. Salah satu sumber keuangan daerah yang harus menjadi bagian terbesar dari penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan studi ini untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Populasi penelitian ini terdiri dari 6 kabupaten dan 2 kota. Datanya adalah data sekunder selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, kabupaten dan kota se Provinsi Maluku yang dipublikasikan. Data yang dianalisis meliputi Pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan per kapita, pendidikan dan kesehatan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis jalur dengan menggunakan paket program SPSS

Hasil studi dan pembahasan terhadap data yang ada diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien jalur yang positif dengan tingkat probabilitas yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis satu yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap derajat otonomi daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Hasill ini

mengisyaratkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, maka akan semakin tinggi derajat otonomi daerah.

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien yang positif dengan tingkat probabilitas yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dua yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Hasil ini mengisyaratkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, maka akan semakin tinggi penyerapan tenaga kerja.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien jalur yang positif dengan tingkat probabilitas yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejaheraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Hasil ini mengisyaratkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.
4. Pengaruh derajat otonomi daerah memiliki koefisien jalur yang positif dengan tingkat probabilitas yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis empat yang menyatakan bahwa derajat otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Hasil ini mengisyaratkan bahwa semakin tinggi derajat otonomi daerah, maka akan semakin tinggi penyerapan tenaga kerja.
5. Pengaruh derajat otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki koefisien jalur yang positif dengan tingkat probabilitas yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis lima yang menyatakan bahwa derajat otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Hasil ini megisyaratkan bahwa semakin tinggi derajat otonomi daerah, maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.
6. Pengaruh penyerapan tenaga kerja memiliki koefisien jalur yang positif dengan tingkat probabilitas yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis enam yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Hasil ini mengisyaratkan bahwa semakin tinggi penyerapan tenaga kerja, maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SUMMARY

The Effect of Economic Growth on Regional Autonomy, Employment and People Welfare in Districts and Cities in Maluku Province

The development represents a sustainable social change, going into an advancement and improvement as desired. The progress and advancement can be achieved by some ways with the purpose of stepping up quality of life. Thus, the development refers to whole activities put into existence to increase people welfare. These activities encompass social, economic, political, cultural activities. In general, the results of the development can be seen from a presence of the social change and economic growth.

Every development carried out to boost the economic growth must take into consideration of: the existing economic condition of relevant community, potential natural and human resources and infrastructures available. After considering these aspects, then regional development planning can be prepared with a single objective of enhancing the economic growth. Given the background, in the recent regional autonomy, each local government is demanded to be independent in the financial field. This condition becomes prerequisite, since the capability of the local government to undertake any development is dependent on the local finance. One of the local financial sources making up the largest part of the local revenue is the local income.

The objective of this research is to investigate an effect of economic growth on employment, regional autonomy, and people welfare in districts and cities in Maluku Province. Population of the research consists of 6 districts and 2 cities. The data comprise published secondary data coming from Central Bureau of Statistics (BPS) throughout 2001- 2005 regarding the districts and cities in Maluku province. The data analyzed here are including those on the economic growth, employment, local income, local budget, income per capita, education and health. The data collected are analyzed by path analysis technique using SPSS packet program.

The results show that firstly the effect of economic growth has a path coefficient positive with probable significance. This corroborates the first hypothesis saying that economic growth significantly influences regional autonomy in districts and cities. This means that the higher the economic growth is, the higher the regional autonomy would be. Second, the effect of economic growth possesses a path coefficient positive with probable significance. This corroborates the second hypothesis saying that economic growth significantly influences employment in districts and cities. This implies that the higher the economic growth is, the higher the employment would be. Third, the effect of economic growth has a path coefficient positive with probable significance. This corroborates the third hypothesis saying that economic growth produces significant impact on the people welfare in districts and cities. This indicates that the higher the economic growth is, the higher the people welfare would be. Fourth, the effect of regional autonomy has a path coefficient positive with probable significance. This corroborates the fourth

hypothesis saying that regional autonomy brings about significant effect on the employment in districts and cities. This indicates that the higher the regional autonomy is, the higher the employment would be. Fifth, the effect of regional autonomy has a path coefficient positive with probable significance. This corroborates the fifth hypothesis saying that regional autonomy elicits significant effect on the people welfare in districts and cities. This indicates that the higher the regional autonomy is, the higher the people welfare would be. And sixth, the effect of employment possesses a path coefficient positive with probable significance. This corroborates the sixth hypothesis maintaining that employment gives rise to significant influence on the people welfare in districts and cities in Maluku province. This suggests that the higher the employment is, the higher the people welfare would be.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRACT

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRACT

The Effect of Economic Growth on Regional Autonomy, Employment and People Welfare in Districts and Cities in Maluku Province

The objective of this research is to investigate an effect of economic growth on regional autonomy, employment and people welfare in districts and cities in Maluku Province.

Population of the research consists of 6 districts and 2 cities. The data comprise published secondary data coming from Central Bureau of Statistics (BPS) throughout 2001- 2005 regarding the districts and cities in Maluku province. The data analyzed are including those on the economic growth, employment, local income, local budget, income per capita, education and health. The data collected are analyzed by path analysis technique using SPSS packet program.

The results show that firstly, the economic growth significantly influences regional autonomy in districts and cities. Second, the economic growth significantly influences employment in districts and cities. Third, the economic growth produces significant impact on the people welfare in districts and cities. Fourth, the regional autonomy brings about significant effect on the employment in districts and cities. Fifth, the regional autonomy elicits significant effect on the people welfare in districts and cities. And sixth, the employment gives rise to significant influence on the people welfare in districts and cities in Maluku province.

Key words: economic growth, regional autonomy, employment, people welfare

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

Halaman

Sampul Depan i
Sampul Dalam ii
Prasyarat Gelar iii
Lembar Pengesahan..... iv
Panitia Ujian Disertasi v
Ucapan Terima Kasih vi
Ringkasan viii
Summary x
Abstract xii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 19
1.3 Tujuan Studi 20
1.4 Manfaat Studi 20

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 22
2.1 Landasan Teori 22
2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi..... 22
2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah 29
2.1.3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah 34
2.1.4 Otonomi Daerah 37
2.1.5 Sumber Pendapatan Daerah 45
2.1.6 Pajak Daerah 57
2.1.7 Retribusi Daerah 62
2.1.8 Teori Ketenagakerjaan 66
2.1.9 Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja 71
2.1.10 Teori Kesejahteraan Masyarakat 74
2.1.11 Indeks Pembangunan Manusia 79
2.1.12 Produk Domestik Regional Bruto 83
2.2. Penelitian Terdahulu 86
2.2.1 Rapparport (2002) 86
2.2.2 Aschauer (2000) 87
2.2.3 Ismanto Hadi Santoso (2000) 87

DISERTASI Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ... Nahu Daud

2.2.4 DJoko Mursinto (2004) 88
2.2.5 Bahl (1978) dan Prest (1979) 90
2.2.6 Tri Wibowo (2004) 91
2.2.7 Makmum (2004) 92
2.2.8 Aloysius Gunandi Brata (2004) 92
2.2.9 Eni Rochaida (2005) 93
2.2.10 Aloysius Gunandi Brata (2005) 94
2.2.11 Stephen M. Miller and Frank S. Russek (1997) 95
2.2.12 Sun Tai Kim (1997) 96

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 98
3.1 Kerangka Konseptual 98
3.2 Hipotesis 104

BAB 4 METODE PENELITIAN 105
4.1 Rancangan Penelitian 105
4.2 Populasi dan Sampel 106
4.3 Variabel Penelitian 107
4.3.1 Identifikasi Variabel 107
4.3.2 Definisi Operasional Variabel 108
4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 113
4.5 Prosedur Pengambilan Data 114
4.6 Teknik Analisis 115
4.6.1 Merancang Model Berdasarkan Konsep dan Teori 115
4.6.2 Pemeriksaan Terhadap Asumsi Analisis Jalur 117
4.6.3 Pendugaan Parameter atau Perhitungan Koefisien Jalur 117
4.6.4 Pemeriksaan Validitas Model 118
4.6.5 Interpretasi Hasil Analisis 119

BAB 5 ANALISIS HASIL STUDI 120
5.1 Deskripsi Hasil Studi 120
5.2 Deskripsi Variabel 124
5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 124
5.2.2 Derajat Otonomi Daerah 126
5.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja dan Elastisitas Kesempatan Kerja 132
5.2.4 Kesejahteraan Masyarakat 138
5.3 Analisis Jalur 140
5.3.1 Uji Normalitas 140
5.3.2 Uji Multikolinearitas atau Singularitas 141
5.4 Uji Kausalitas 141
5.5 Pengaruh Antar Variabel 146
5.5.1 Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian 146
5.5.2 Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel Penelitian 147
5.5.3 Pengaruh Total Antar Variabel Penelitian 148

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 6	PEMBAHASAN	.....	150
6.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Derajat Otonomi Daerah	.....	150
6.2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	.....	153
6.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat	.....	161
6.4	Pengaruh Penyerapan Derajat Otonomi Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	.....	166
6.5	Pengaruh Derajat Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat	.....	169
6.6	Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat	.....	173
6.7	Temuan-Temuan	.....	177
6.8	Keterbatasan Studi	.....	184
BAB 7	PENUTUP	.....	186
7.1	Kesimpulan	.....	186
7.2	Saran	.....	189
DAFTAR KEPUSTAKAAN		.....	191
LAMPIRAN		.....	197

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Penerimaan Total Pada Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam ribuan rupiah)	9
Tabel 1.2	Kontribusi Pendapatan Asli Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam persentase)	10
Tabel 1.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam ribuan rupiah)	12
Tabel 1.4	Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam persentase)	13
Tabel 1.5	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (orang)	14
Tabel 1.6	Penyerapan Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (persentase)	15
Tabel 1.7	Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku (dalam ribuan rupiah)	17
Tabel 1.8	Angka Melek Huruf Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam persentase)	17
Tabel 1.9	Angka Harapan Hidup Manurut Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam tahun) ..	18
Tabel 2.1	Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	33
Tabel 2.2	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	42
Tabel 5.1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku (dalam persentase)	125
Tabel 5.2	Rata-rata Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam persentase)	126
Tabel 5.3	Total Pengeluaran pada Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2004	128
Tabel 5.4	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pengeluaran Daerah Pada Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku (dalam persentase)	129
Tabel 5.5	Kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Penerimaan Total pada Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam persentase)	130
Tabel 5.6	Kontribusi DAU dan DAK terhadap Pengeluaran Daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai	

	2005 (dalam persentase)	132
Tabel 5.7	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam persentase)	134
Tabel 5.8	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam persentase)	136
Tabel 5.9	Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005 (dalam persentase)	137
Tabel 5.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Tahun 2001 sampai 2005	139
Tabel 5.11	Koefisien Jalur	142
Tabel 5.12	Pengaruh Langsung Variabel	147
Tabel 5.15	Pengaruh Tidak Langsung Variabel Penelitian	148
Tabel 5.16	Pengaruh Total Variabel Penelitian	149

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1	Kerangka Proses Berpikir	100
Gambar 3.2	Kerangka Konseptual	101
Gambar 4.1	Hubungan Antara Variabel Penelitian	116
Gambar 5.1	Pemeriksaan Asumsi Normalitas pada Model	141
Gambar 5.1	Hubungan Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen	142

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran	1	Peta Teori	197
Lampiran	2	Rekapitulasi Data Penelitian	209
Lampiran	3	Analisis Jalur	210
Lampiran	4	Perhitungan Pengaruh Langsung, Tidak langsung dan Total	219

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 1
PENDAHULUAN

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara/daerah dalam suatu periode tertentu. Indikator tersebut ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita atau kenaikan *output* yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi serta perubahan struktur penggunaan tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi menunjukkan terjadinya perubahan komposisi atau susunan sektor ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemudian perubahan ini diikuti pula oleh perubahan proporsi penggunaan tenaga kerja pada masing-masing sektor.

Djojohadikusumo (1994:6) mengemukakan bahwa, salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan produksi, karena itu proses pembangunan menghendaki perubahan pada komposisi produksi dan perubahan pada pola pembangunan (alokasi) sumber produksi di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan dalam kerangka kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini berarti perubahan adalah suatu transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktur ekonomi, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Arsyad (1999:6) mengemukakan bahwa pada umumnya pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

riil per kapita penduduk suatu negara/daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Definisi tersebut mempunyai pengertian:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita.
3. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi, baik secara formal maupun informal.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu proses di mana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis secara seksama. Dengan cara tersebut bisa diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kehidupan kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada umumnya pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), sementara untuk daerah kabupaten dan kota diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, demikian cara tersebut mempunyai kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai.

Pada masa lampau pembangunan ekonomi juga sering diukur berdasarkan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja (*employment*) yang diupayakan secara terencana (Todaro,2004:19). Biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian menurun untuk memberikan kesempatan bagi sektor manufaktur dan jasa-jasa yang senantiasa diupayakan agar terus berkembang, sehingga strategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara cepat sehingga mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tolok ukur pembangunan yang bersifat ekonomi tersebut harus pula didukung oleh indikator-indikator sosial (*social indicators*) seperti tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan kebutuhan perumahan dan sebagainya. Kaitannya dengan pemikiran tersebut, maka pada tahun 1990, *United Nation Development Program* (*UNDP*) memperkenalkan sebuah konsep pembangunan yang diberi nama *Human Development*. Konsep ini memprioritaskan pada pencapain tujuan pembangunan yang menjadikan manusia sebagai fokus pembangunan (*Human Centered Development*). Pencapaian tujuan tersebut dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).

Muhammad (2004:2) mengemukakan bahwa orientasi dan titik sentral pembangunan yang hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi tidak lagi dijadikan model pembangunan, meskipun pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu ukuran kemajuan suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi saja jauh dari mencukupi guna mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ia merupakan hasil dari berbagai kegiatan ekonomi: produksi,

konsumsi, investasi, perdagangan dalam dan luar negeri, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa makin besar dan bervariasi kegiatan ekonomi pada suatu masyarakat, tentu hal itu baik karena ia akan menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja akan memberi penghasilan, dan dengan penghasilan itu seseorang beserta keluarganya memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka Sen dalam Pressman (2000:274-275) menyatakan bahwa pembangunan sebagai pembebasan untuk memperoleh pilihan-pilihan yang luas dan berada dalam kerangka *human development*; jangan sampai manusia dikorbankan atas nama semua program yang memacu pertumbuhan. "Kebahagiaan manusia tidak bisa diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi". Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara/daerah seharusnya memfokuskan pada tujuan yang nyata, yaitu pengembangan potensi manusia, lagi pula kesuksesan perkembangan ekonomi seharusnya dimulai berdasarkan meningkatnya tingkat warga yang bebas buta huruf dan harapan hidup ketimbang pertumbuhan dalam produksi atau tingkat pendapatan.

Teori pembangunan yang dapat diuraikan di atas tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Mardiasmo (2004a:221) mengemukakan bahwa pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Kemudian dijelaskan pula bahwa pembangunan yang tidak merata, seperti yang dilaksanakan selama ini, hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan tidak diimbangi dengan peningkatan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan pendapatan per kapita penduduk daerah tersebut yang diwakili oleh PDRB. Pengukuran PDRB tersebut dapat menunjukkan kemampuan peningkatan *output* yang lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Tolok ukur yang demikian mengabaikan beberapa hal, seperti kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia, tentang pembangunan daerah menyebutkan bahwa di dalam memacu pertumbuhan kabupaten/kota, perlu ditekankan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik, yang berupa:

1. Tata pemerintahan yang baik akan mendorong manajemen finansial dan penyediaan pelayanan yang bermutu tinggi.
2. Investor tertarik dengan kemajuan tersebut akan merangsang pengembangan ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang termasuk masyarakat miskin.
3. Pengembangan ekonomi lokal akan menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4. Posisi fiskal yang lebih kuat akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membuat siklus pengembangan terus bergerak maju (World Bank, 2003).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pelayanan masyarakat. Karena sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat.

Musgrave *and* Musgrave (1991:6-13) mengemukakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi yang meliputi antara lain; sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi yang meliputi antara lain; pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain; pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Fungsi alokasi dan distribusi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan setuasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan penentuan

dasar-dasar pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara jelas dan tegas.

Pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku setiap tahun masing-masing telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komponen penerimaan total pemerintahan kabupaten dan kota secara garis besar meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, penerimaan lainnya serta pinjaman pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari; dana bagi hasil yang meliputi; bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta penerimaan lainnya. Komponen-komponen penerimaan tersebut sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Adapun penerimaan total di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku seperti tampak pada Tabel 1.1 halaman 9.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan total kabupaten dan kota se Provinsi Maluku telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 semuanya telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2001. Begitu pula tahun 2003, 2004 dan 2005 penerimaan total untuk masing-masing kabupaten dan kota terus mengalami peningkatan. Kenaikan total penerimaan dari tahun ketahun

selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 disebabkan adanya sebagian pegawai negeri sipil (PNS) yang dahulunya menjadi tanggungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (departemen), pada saat desentralisasi dan otonomi daerah pembayaran gaji diserahkan kabupaten dan kota.

Tabel 1.1 halaman 9 menunjukkan bahwa untuk kabupaten se Provinsi Maluku pada tahun 2001 sampai 2004 penerimaan total tertinggi ditempati kabupaten Maluku Tengah, tetapi pada tahun 2005 penerimaan tertinggi kembali ditempati Maluku Utara. Sedangkan penerimaan total terendah selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 ditempati kabupaten Buru. Sementara untuk kota penerimaan tertinggi ditempati kota Ambon.

Kemudian jika diamati lebih seksama, ternyata bahwa dari jumlah penerimaan total kabupaten dan kota se Provinsi Maluku terdapat salah satu komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya penerimaan total pemerintah kabupaten dan kota tidak selamanya diikuti dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap penerimaan total seperti pada Tabel 1.2 halaman 10.

Pada Tabel 1.2 telah menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan total pada pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 berkisar 0,97 persen sampai dengan 4,97 persen. Ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 hanya mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan total yang paling besar hanya 4,97 persen dan paling rendah 0,97 persen.

Tabel 1.1.
PENERIMAAN TOTAL PADA KABUPATEN DAN KOTA
SE PROVINSI MALUKU TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam ribuan rupiah)

Kabupaten: Maluku Tenggara Barat					
Jenis Penerimaan	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	-	-	-	-	-
2. Pendapatan Asli Daerah	1.440.354	1.149.684	2.255.500	3.213.329	3.921.709
3. Dana Perimbangan	143.550.743	143.541.401	180.826.406	199.517.482	215.241.000
Penerimaan Total	**144.999.097**	**145.691.085**	**192.535.316**	**221.480.950**	**237.955.173**
Kabupaten: Maluku Tenggara					
Jenis Penerimaan	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	2.575.594	8.796.414	8.187.857	-	-
2. Pendapatan Asli Daerah	3.817.438	6.373.020	7.542.560	11.572.200	28.016.250
3. Dana Perimbangan	114.508.096	175.958.978	189.714.871	205.904.137	263.007.880
Penerimaan Total	**121.864.948**	**192.090.377**	**205.445.288**	**217.476.337**	**291.013.130**
Kabupaten: Maluku Tengah					
Jenis Penerimaan	2001	2002	2003	2004	2005
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	12.392.253	30.327.251	7.845.558	-	-
2. Pendapatan Asli Daerah	4.995.182	8.621.683	7.936.853	7.500.798	7.996.660
3. Dana Perimbangan	236.944.481	271.863.503	311.193.147	384.959.626	262.796.530
Penerimaan Total	**254.331.916**	**310.812.437**	**329.647.373**	**392.560.424**	**346.269.190**
Kabupaten: Buru					
Jenis Penerimaan	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	-	23.297.533	35.165.680	-	-
2. Pendapatan Asli Daerah	1.725.577	2.709.896	3.395.379	7.638.158	7.891.663
3. Dana Perimbangan	92.500.016	123.280.771	148.365.283	171.161.884	187.896.768
Penerimaan Total	**97.001.587**	**151.648.282**	**186.926.342**	**187.939.054**	**194.546.431**
Kabupaten: Maluku Utara					
Jenis Penerimaan	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	4.260.477	20.174.500	11.865.984	-	-
2. Pendapatan Asli Daerah	5.087.500	9.085.000	9.518.000	10.402.120	15.519.438
3. Dana Perimbangan	242.385.484	257.035.000	291.389.206	329.530.140	442.920.699
Penerimaan Total	**251.733.460**	**289.664.500**	**312.773.190**	**339.932.260**	**465.150.137**
Kabupaten: Halmahera Tengah					
Jenis Penerimaan	2001	2002	2003	2004	2005
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	4.767.958	13.525.832	36.917.875	-	-
2. Pendapatan Asli Daerah	1.759.580	5.505.709	6.994.576	7.250.450	4.208.416
3. Dana Perimbangan	127.327.970	201.893.306	200.261.367	247.705.150	276.449.760
Penerimaan Total	**143.165.156**	**230.047.335**	**244.173.820**	**254.955.600**	**303.661.176**
Kota: Ambon					
Jenis Penerimaan	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	14.573.684	18.992.865	-	-	-
2. Pendapatan Asli Daerah	1.736.665	5.506.062	8.783.407	9.534.778	11.232.998
3. Dana Perimbangan	113.023.707	157.994.374	206.477.858	204.038.807	212.854.047
Penerimaan Total	**163.035.560**	**190.882.167**	**228.311.930**	**229.068.849**	**233.663.045**
Kota: Ternate					
Jenis Penerimaan	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	295.763	-	11.865.984	-	-
2. Pendapatan Asli Daerah	3.174.745	6.533.591	6.090.500	9.509.000	10.281.000
3. Dana Perimbangan	111.179.504	147.661.894	143.390.000	157.339.000	173.744.00
Penerimaan Total	**115.920.452**	**160.196.623**	**172.251.154**	**175.904.000**	**189.664.000**

Sumber: Sumber: BPS, tahun 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku, diolah

Keterangan: Tanda (-) Tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Tabel 1.2.
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		2001	2002	2003	2004	2005
1	Maluku Tenggara Barat	0,99	0,97	1,17	3,68	1,64
2	Maluku Tenggara	3,13	3,32	3,67	4,97	3,63
3	Maluku Tengah	1,96	2,77	1,22	1,93	2,31
4	Buru	1,78	1,79	1,82	4,11	4,01
5	Maluku Utara	1,23	3,14	3,04	3,06	3,34
6	Halmahera Tengah	1,23	2,39	2,86	2,84	3,39
Kota						
7	Ambon	0,97	1,08	3,85	4,16	4,81
8	Ternate	2,74	4,08	0,99	1,03	5,42

Sumber: BPS, tahun 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku,diolah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan total pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 sangat bervariasi dan tidak menunjukkan adanya suatu peningkatan. Besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan total tersebut, jika dihubungkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah masuk dalam kategori hubungan instruktif, karena kemampuan keuangan daerah sangat rendah. Di sini peranan pemerintah pusat masih dominan dibandingkan dengan kemandirian daerah. Artinya daerah tidak mampu melaksanakan otonmi daerah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap penerimaan total diantaranya:

1. Banyak sumber pendapatan yang berpotensi besar untuk digali tetapi berada diluar wewenang pemerintah daerah.
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada umumnya belum beroperasi secara efisien.
3. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi serta pungutan lainnya.

4. Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada akibat kurangnya fasilitas dalam melakukan tugas-tugas memungut pajak, retribusi dan pungutan lain.
5. Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada akibat kurangnya fasilitas dalam melakukan tugas-tugas memungut pajak, retribusi dan pungutan lain.

Keadaan tersebut tentunya akan membawa dampak rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung kepada bantuan pemerintah pusat. Semakin besar nilai PAD, semakin ringan beban pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jenis penerimaan yang berhubungan langsung dengan peranan masyarakat, dengan demikian jenis penerimaan ini akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang dicerminkan oleh besar kecilnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 terus mengalami peningkatan, dan peningkatan tersebut sangat bervariasi, lihat Tabel 1.3 halaman 12.

Berdasarkan Tabel 1.3 telah menunjukkan bahwa PDRB kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dalam kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 tertinggi ditempati kabupaten Maluku Utara dan terendah ditempati kabupaten Halmahera Tengah.

Sedangkan untuk kota PDRB tertinggi ditempati kota Ambon. Besarnya nilai PDRB tersebut sangat ditentukan oleh kontribusi dari masing-masing sektor ekonomi.

Tabel 1.3.
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN PADA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam ribuan rupiah)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		2001	2002	2003	2004	2005
1	Maluku Tenggara Barat	329.732,38	340.170,82	351.862,19	363.526,89	377.105,20
2	Maluku Tenggara	378.703,75	394.261,76	410.934,05	427.561.19	448.492,00
3	Maluku Tengah	754.875,43	769.945,91	795.326,25	921976.37	963.657,70
4	Buru	215.017,61	217.095,32	222.687,95	229.587,41	237.842,93
5	Maluku Utara	1.082.045,86	1.115.234,05	1.147.840,91	1192740.52	1238615.93
6	Halmahera Tengah	473.294,79	483.511,48	502.703,85	530.384.13	557.960.03
Kota						
7	Ambon	1.089.962,20	1.126.265,19	1.189.655,24	1.257.863,18	1.333.062,01
8	Ternate	343.808,00	353.427,00	368.946,00	389.386,00	415.085,43

Sumber: BPS, tahun 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku,diolah.

Kontribusi sektoral terhadap PDRB atas harga konstan periode tahun 2001 sampai 2005 untuk pemerintah kabupaten kontribusi sektor primer menempati urutan teratas, kemudian disusul sektor tersier serta sektor sekunder. Sementara dalam kurun waktu yang sama untuk kota kontribusi terbesar ditempati sektor tersier, kemudian disusul sektor primer serta sektor sekunder. Lihat Tabel 1.4 halaman 13.

Jika diamati secara seksama selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 untuk daerah kabupaten se Provinsi Maluku sektor primer masih mempunyai peranan dominan dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara untuk kota sektor tersier lebih dominan mempunyai kontribusi terhadap PDRB dibandingkan dengan sektor primer dan sektor sekunder. Meningkatnya nilai PDRB kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tersebut diharapkan akan meningkatnya kesempatan kerja seiring dengan perkembangan kegiatan setiap sektor ekonomi seperti; sektor primer, sekunder dan tersier.

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Tabel 1.4.
KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN
KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		Tahun 2001		
Kabupaten		Primer	Sekunder	Tersier
1	Maluku Tenggara Barat	54,33	2,77	42,87
2	Maluku Tenggara	50,32	1,73	47,94
3	Maluku Tengah	38,52	15,75	45,73
4	Buru	62,72	8,07	29,21
5	Maluku Utara	40,41	24,05	35,55
6	Halmahera Tengah	63,76	6,37	29,45
Kota				
7	Ambon	21,64	4,06	74,30
8	Ternate	15,05	12,35	72,60
Kabupaten/Kota		Tahun 2002		
Kabupaten		Primer	Sekunder	Tersier
1	Maluku Tenggara Barat	55,05	2,72	42,23
2	Maluku Tenggara	50,78	1,66	47,56
3	Maluku Tengah	37,99	15,33	46,68
4	Buru	64,36	6,05	29,59
5	Maluku Utara	40,45	25,01	34,54
6	Halmahera Tengah	63,55	6,32	30,13
Kota				
7	Ambon	22,55	3,69	73,76
8	Ternate	14,73	12,54	72,73
Kabupaten/Kota		Tahun 2003		
Kabupaten		Primer	Sekunder	Tersier
1	Maluku Tenggara Barat	53,71	2,66	43,41
2	Maluku Tenggara	50,14	1,59	48,27
3	Maluku Tengah	37,45	15,21	47,33
4	Buru	62,79	5,78	31,43
5	Maluku Utara	41,24	25,01	34,75
6	Halmahera Tengah	60,47	10,24	29,29
Kota				
7	Ambon	21,98	3,79	74,22
8	Ternate	14,46	12,40	73,14
Kabupaten/Kota		Tahun 2004		
Kabupaten		Primer	Sekunder	Tersier
1	Maluku Tenggara Barat	54,56	3,05	42,39
2	Maluku Tenggara	49,11	1,99	48,90
3	Maluku Tengah	35,91	13,68	50,41
4	Buru	60,28	6,59	33,13
5	Maluku Utara	42,55	23,78	33,67
6	Halmahera Tengah	59,77	9,89	30,34
Kota				
7	Ambon	21,09	3,41	75,50
8	Ternate	15,20	11,49	73,29
Kabupaten/Kota		Tahun 2005		
Kabupaten		Primer	Sekunder	Tersier
1	Maluku Tenggara Barat	50,53	4,02	45,34
2	Maluku Tenggara	48,10	2,90	49,00
3	Maluku Tengah	34,81	15,78	59,41
4	Buru	59,18	6,63	34,19
5	Maluku Utara	43,53	20,75	35,72
6	Halmahera Tengah	57,79	11,84	30,37
Kota				
7	Ambon	19,07	3,41	77,52
8	Ternate	14,18	11,50	74,30

Sumber: BPS, 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku, diolah

Kesempatan kerja kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 terus mengalami peningkatan. Kesempatan kerja tertinggi untuk kabupaten selama kurun waktu tersebut ditempati kabupaten Maluku Utara dan terendah ditempati kabupaten Buru. Sementara kota pada periode yang sama yaitu dari tahun 2001 sampai 2005 kesempatan kerja tertinggi ditempati kota Ambon dan terendah ditempati kota Ternate, lihat Tabel 1.5.

Tabel 1.5.
PERKEMBANGAN PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam satuan orang)

Kabupaten/Kota		**T a h u n**				
Kabupaten		**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1	Maluku Tenggara Barat	76.681	85.813	87.922	89.810	93.716
2	Maluku Tenggara	43.005	47.937	51.288	55.180	59.660
3	Maluku Tengah	192.965	185.855	176.689	183.765	191.942
4	Buru	33.480	35.223	41.291	47.330	49.365
5	Maluku Utara	103.250	104.441	118.898	129.614	136.785
6	Halmahera Tengah	38.056	42.319	47.118	59.802	63.789
Kota						
7	Ambon	68.456	50.990	65.285	75.898	78.256
8	Ternate	37.187	37.498	30.763	29.172	33.287

Sumber: BPS, 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku, diolah

Kemudian dari jumlah tenaga kerja yang terserap per masing-masing kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 tersebut, untuk kabupaten penyerapan tenaga kerja terbanyak pada sektor primer, kemudian disusul sektor tersier serta sektor sekunder. Sementara untuk kota dalam periode yang sama yaitu dari tahun 2001 sampai 2005 penyerapan tenaga kerja terbanyak pada sektor tersier, kemudian disusul sektor primer serta sektor sekunder (lihat Tabel 1.6 halaman 15). Pada Tabel tersebut tampak bahwa mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian.

Tabel 1.6.
PENYERAPAN TENAGA KERJA PER SEKTOR EKONOMI
KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		**Tahun 2001**		
Kabupaten		**Primer**	**Sekunder**	**Tersier**
1	Maluku Tenggara Barat	73,96	1,73	24,31
2	Maluku Tenggara	67,69	5,43	26,89
3	Maluku Tengah	60,01	7,00	32,99
4	Buru	51,36	14,33	34,31
5	Maluku Utara	80,80	6,40	12,80
6	Halmahera Tengah	62,35	10,89	26,76
Kota				
7	Ambon	11,33	8,69	79,98
8	Ternate	27,35	17,59	55,05
Kabupaten/Kota		**Tahun 2002**		
Kabupaten		**Primer**	**Sekunder**	**Tersier**
1	Maluku Tenggara Barat	73,96	1,75	24,29
2	Maluku Tenggara	66,29	3,05	30,65
3	Maluku Tengah	60,91	7,10	31,99
4	Buru	67,75	15,02	17,20
5	Maluku Utara	80,80	6,40	12,80
6	Halmahera Tengah	62,63	10,95	26,41
Kota				
7	Ambon	15,21	11,32	73,47
8	Ternate	27,13	17,65	55,22
Kabupaten/Kota		**Tahun 2003**		
Kabupaten		**Primer**	**Sekunder**	**Tersier**
1	Maluku Tenggara Barat	73,45	1,82	24,73
2	Maluku Tenggara	75,50	3,25	21,24
3	Maluku Tengah	61,77	7,31	30,92
4	Buru	80,18	4,38	9,20
5	Maluku Utara	78,30	4,38	17,32
6	Halmahera Tengah	59,79	15,22	24,99
Kota				
7	Ambon	16,35	8,05	75,60
8	Ternate	20,52	14,83	64,66
Kabupaten/Kota		**Tahun 2004**		
Kabupaten		**Primer**	**Sekunder**	**Tersier**
1	Maluku Tenggara Barat	72,59	1,69	25,72
2	Maluku Tenggara	67,29	4,13	28,58
3	Maluku Tengah	59,91	7,10	32,99
4	Buru	78,62	10,53	10,85
5	Maluku Utara	82,12	5,70	12,18
6	Halmahera Tengah	60,30	27,87	11,83
Kota				
7	Ambon	11,85	12,50	75,65
8	Ternate	5,88	20,59	73,53
Kabupaten/Kota		**Tahun 2005**		
Kabupaten		**Primer**	**Sekunder**	**Tersier**
1	Maluku Tenggara Barat	71,30	2,70	26,00
2	Maluku Tenggara	68,19	4,25	27,56
3	Maluku Tengah	60,81	7,24	31,95
4	Buru	77,12	11,03	11,85
5	Maluku Utara	81,11	6,81	12,28
6	Halmahera Tengah	59,15	28,70	12,15
Kota				
7	Ambon	10,60	12,50	77,90
8	Ternate	5,88	19,55	74,58

Sumber: BPS, 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku, diolah

Lapangan usaha lain yang diminati oleh penduduk kabupaten dan kota se Provinsi Maluku adalah sektor tersier utamanya sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku tampaknya akan mengarah ke sektor primer dan sektor tersier. Sementara sektor industri, walaupun berkembang, namun tidak bisa terlalu tinggi, mengingat kondisi geografis serta karakteristik sumber daya alam dan manusia yang dimiliki kurang mendukung di sektor ini.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh perubahan struktur PDRB serta struktur penyerapan tenaga kerja, tetapi juga harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang lebih tinggi. Karena itu diperlukan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Pembangunan manusia adalah satu diantara indikator pembangunan yang dapat digunakan. IPM adalah suatu ukuran yang didasarkan pada tiga komponen yakni: pendapatan per kapita, pendidikan dan usia harapan hidup.

Pendapatan per kapita merupakan salah satu determinan utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena merupakan ukuran daya beli. jika pendapatan masyarakat menurun maka dampaknya pada penurun kemampuan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan juga akan menurun. Karena pendapatan per kapita dianggap merefleksikan tingkat kesejahteraan seseorang. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 1.7 halaman 17.

Tabel 1.7.
PENDAPATAN PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam ribuan rupiah)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1	Maluku Tenggara Barat	2.142.338	2.374.656	2.755.561	2.853.919	3.353.638
2	Maluku Tenggara	1.914.427	2.104.357	2.469.845	2.572.477	2.941.131
3	Maluku Tengah	1.402.585	1.541.601	1.713.206	1.770.956	1.938.583
4	Buru	1.690.196	1.867.904	2.045.698	2.103.944	2.476.195
5	Maluku Utara	3.288.636	3.398.639	3.406.368	2.921.987	3.632.205
6	Halmahera Tengah	1.075.261	1.098.835	1.098492	1.136.643	1.209.713
Kota						
7	Ambon	5.478.582	5.511.464	6.026.470	6.339.811	7.063.051
8	Ternate	2.081.108	2.123.220	2.487.131	2.576.624	2.808.404

Sumber: BPS, 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku, diolah

Pada Tabel 1.7 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tertinggi untuk kabupaten ditempati kabupaten Maluku Utara dan terendah ditempati kabupaten Halmahera Tengah. Sementara untuk kota pendapatan per kapita tertinggi ditempati kota Ambon. Kemudian akan dijelaskan tentang komponen tingkat kesejahteraan yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Indikator dimaksud antara lain kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku rata-rata angka melek huruf berada di atas 90 persen, kecuali kabupaten Buru. lihat Tabel 1.8.

Tabel 1.8.
ANGKA MELEK HURUF KABUPATEN DAN KOTA
SE PROVINSI MALUKU TAHUN 2001 SAMPAI 2004
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1	Maluku Tenggara Barat	99,22	98,33	98,77	98,95	98,75
2	Maluku Tenggara	98,97	98,45	99,04	97,23	96,98
3	Maluku Tengah	98,69	98,61	98,11	97,89	97,33
4	Buru	76,40	78,23	87,05	88,23	87,25
5	Maluku Utara	97,25	97,40	98,03	98,26	97,55
6	Halmahera Tengah	95,21	95,25	96,12	95,33	95,45
Kota						
7	Ambon	99,42	99,13	98,97	99,22	98,88
8	Ternate	98,22	98,55	98,72	98,22	99,25

Sumber: BPS, 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku, diolah.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang komponen kesejahteraan yang ketiga yaitu usia harapan hidup. Selama kurun waktu tahun 1980 sampai 2000 angka harapan hidup penduduk kabupaten dan kota se Provinsi Maluku meningkat yaitu 49,6 tahun pada tahun 1980 menjadi 62 tahun pada tahun 2000. Sementara untuk tahun 2004 secara nasional diperkirakan harapan hidup penduduk Indonesia adalah 66,18 tahun dan penduduk se Provinsi Maluku 65,47 tahun. Itu berarti rata-rata penduduk Indonesia hanya bisa menikmati hidupnya sampai pada usia 66 tahun dan rata-rata penduduk se Provinsi Maluku hanya bisa mencapai usia 65 tahun. Angka tersebut mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat di masing-masing kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Semakin tinggi derajat kesehatan yang dicapai suatu daerah semakin tinggi angka harapan hidup yang dicapai. Lebih jelasnya angka harapan hidup kabupaten dan kota dapat dilihat pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9.
ANGKA HARAPAN HIDUP MENURUT KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam tahun)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		2001	2002	2003	2004	2005
1	Maluku Tenggara Barat	63,10	64,45	64,60	64,75	65,33
2	Maluku Tenggara	63,22	64,30	65,22	65,60	65,72
3	Maluku Tengah	64,22	64,66	65,40	66,10	66,23
4	Buru	64,23	64,50	65,20	65,75	66,12
5	Maluku Utara	65,30	65,47	65,85	66,10	66,25
6	Halmahera Tengah	65,44	65,66	66,10	66,25	66,40
Kota						
7	Ambon	66,10	66,45	66,60	66,85	66,90
8	Ternate	65,85	65,90	66,10	66,34	66,50

Sumber: BPS, tahun 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku,diolah.

Berdasarkan uraian di atas maka sejalan dengan tugas yang diemban oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan

pembangunan daerah, maka meningkatnya APBD diharapkan mampu memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini akan terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Dengan berkembangnya perekonomian daerah, maka dampak positif juga dinikmati oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan PAD serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam studi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap derajat otonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku ?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku ?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku ?
4. Apakah derajat otonomi daerah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku ?
5. Apakah derajat otonomi daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku ?
6. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku ?

1.3 Tujuan Studi

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh derajat otonomi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
5. Menganalisis dan menguji pengaruh derajat otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
6. Menganalisis dan menguji pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.

1.4 Manfaat Studi

Manfaat yang diharapkan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan utamanya pengembangan teori keuangan daerah dikaitkan dengan teori pembangunan ekonomi daerah.
2. Dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan dikembangkan pada obyek yang sama, waktu yang berbeda maupun pada obyek yang berbeda, pada

waktu yang berbeda pula. Selain itu dapat pula dipakai sebagai acuan pada obyek yang sama waktu yang berbeda, obyek yang berbeda waktu yang berbeda dengan model analisis yang berbeda pula.

3. Dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Keinginan untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik, merupakan dua keinginan dasar dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok. Dalam usaha mencapai dua keinginan dasar tersebut, dilakukan berbagai upaya melalui perubahan-perubahan yang berkesinambungan, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha untuk memperbesar kapasitas (nilai guna) barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan kegiatan pembangunan.

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus, menuju kemajuan dan perbaikan kearah yang diinginkan. Usaha mencapai kemajuan ditempuh melalui berbagai cara guna memperbaiki taraf hidup masyarakat, sehingga pembangunan tidak lain adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan kegiatan tersebut meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya. Secara umum hasil pembangunan dapat dilihat dari adanya perubahan sosial (*sosial change*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Menurut Djojohadikusumo (1994:2) pembangunan ekonomi selain menyangkut perubahan kuantitatif pada produksi dan pendapatan, juga mencakup perubahan kualitatif dalam tata susunan masyarakat secara menyeluruh. Dari uraian

tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian ukuran keberhasilan dari pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan pendapatan per kapita.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembangunan ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan pembangunan sebagai usaha masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi untuk mempertinggi pendapatan masyarakat. Pada umumnya menghubungkan pembangunan ekonomi dengan perkembangan ekonomi, seperti; Meier (1976:6), Baldwin (1981:2), dan Sukirno (2006:10) yang mengartikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka waktu yang panjang, dengan distribusi pendapatan yang tidak semakin timpang.

Kemudian Chenery dalam Jhingan (2007:5) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai seperangkat perubahan yang saling berkaitan di dalam struktur suatu perekonomian yang diperlukan bagi terciptanya pertumbuhan yang terus-menerus. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses transformasi struktural ditandai antara lain dengan meningkatnya sumbangan (*share*) sektor industri manufaktur dan jasa-jasa di dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) di satu pihak, dan makin menurunnya sumbangan (*share*) sektor pertanian di dalam PDB di pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu indikator berkembang tidaknya suatu perekonomian secara nasional dapat dilihat dari sumbangan sektor industri dan jasa-jasa dalam PDB, sementara untuk daerah dapat dilihat dari nilai PDRB nya. Artinya bahwa makin besar sumbangan sektor industri dan jasa-jasa dalam PDRB, berarti daerah atau perekonomian tersebut makin maju.

Todaro (2004:21) pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Jadi pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik.

Dari berbagai pandangan yang dapat dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi sebagai proses berkesinambungan peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Dari pandangan itu, lahirlah konsep-konsep mengenai pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi.

Teori mengenai pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri setidak-tidaknya sejak abad ke-18. Menurut Smith dalam Jhingan (2007:81-82) proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Smith juga menggaris bawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith muncul pemikiran-pemikiran yang berusaha mengkaji batas-batas pertumbuhan (*limits to growth*) antara lain dari Malthus (1798) dan Ricardo (1917).

Setelah Smith, Malthus, dan Ricardo yang disebut-sebut sebagai aliran klasik, berkembang teori pertumbuhan ekonomi modern dengan berbagai variasi yang pada intinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang menekankan pentingnya akumulasi modal (*physical capital formation*) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*).

Salah satu hal yang dampaknya besar dan berlanjut hingga sekarang adalah model pertumbuhan yang dikembangkan oleh Harrod dan Domar dalam Todaro (2004:129-130). Pada intinya model ini berpijak pada pandangan Keynes (1936) yang menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dalam model Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh dua unsur pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital (*capital output ratio*). Agar dapat tumbuh secara berkelanjutan, masyarakat dalam suatu perekonomian harus mempunyai tabungan yang merupakan sumber investasi. Makin besar tabungan, yang berarti makin besar investasi, akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, makin rendah produktivitas kapital atau semakin tinggi *capital output ratio*, makin rendah pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan Harrod-Damar yang memberikan tekanan pada pentingnya peranan modal, Arthur Lewis dalam Jhingan (2007:156-157) dengan *model surplus of labor*-nya memberikan tekanan pada peranan jumlah penduduk. Dalam model ini diasumsikan terdapat penawaran tenaga kerja yang sangat *elastis*. Ini berarti pengusaha dapat meningkatkan produksinya dengan mempekerjakan tenaga kerja lebih banyak tanpa harus menaikan tingkat upahnya. Meningkatnya pendapatan yang diperoleh kaum pemilik modal akan mendorong investasi-investasi baru karena

kelompok ini mempunyai hasrat menabung dan menanam modal (*marginal propensity to save and invest*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pekerja. Tingkat investasi yang tinggi pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, berkembang sebuah model pertumbuhan yang disebut neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik mulai memasukan unsur teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, Solow dalam Mankiw (2002:174). Dalam teori neoklasik, kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat *output* perekonomian serta tingkat pertumbuhan sepanjang waktu.

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka Schumpeter dalam Pressman (2000:156) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang selalu merupakan perhatian sentral ilmu ekonomi. Sumbangan utama dari Schumpeter adalah mengarahkan kembali perhatian dari para ahli ekonomi kepada isu pertumbuhan jangka panjang. Dalam melakukan hal tersebut ditekankan pentingnya faktor-faktor non ekonomi, seperti inovasi dari pengusaha, untuk kebaikan kemajuan dan pertumbuhan kapitalisme.

Teori pertumbuhan selanjutnya mencoba menemukan faktor-faktor lain di luar modal dan tenaga kerja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu teori berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas. Menurut Becker dalam Wrihatnolo dan Riant (2006:75) peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan derajat kesehatan.

Kaitannya dengan peningkatan produktivitas tersebut maka, Kuznets dalam Pressman (2000:177) mengemukakan bahwa pertumbuhan itu berkaitan dengan perpaduan efek produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Berdasarkan kedua faktor tersebut pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting sebagaimana yang dijelaskan oleh Adam Smith, bahwa pertumbuhan produktivitas inilah yang akan meningkatkan standar kehidupan.

Boyers (1992:334) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah dan kualitas sumberdaya dan perkembangan teknologi. Jika kualitas sumberdaya naik dan masing-masing sumberdaya menjadi lebih produktif maka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi.

Menurut Boediono (1999:1), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Jadi persentase pertambahan *output* itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Ketentuan yang terakhir ini sangat penting diperhatikan dalam ekonomi wilayah, karena bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan/suntikan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan.

Menurut Waud (1992:412), Djojohadikusumo (1994:15) dan Sukirno (2006:10) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan suatu kelompok

masyarakat (negara) dari tahun ke tahun karena meningkatnya kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa.

Sementara Sen dalam Pressman (2000:274-275) mengemukakan bahwa pertumbuhan berarti memproduksi lebih banyak barang dan jasa terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Sedangkan perkembangan ekonomi meliputi pengembangan kemampuan manusia. Pertumbuhan ekonomi menaikan pendapatan per kapita, sementara perkembangan ekonomi meningkatkan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa negara/daerah seharusnya memfokuskan pada tujuan yang nyata, yaitu pengembangan potensi manusia, lagi pula kesuksesan perkembangan ekonomi seharusnya dimulai berdasarkan meningkatnya tingkat warga yang bebas buta huruf dan harapan hidup ketimbang pertumbuhan dalam produksi atau tingkat pendapatan.

Pendapatan masyarakat sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Apabila pendapatan suatu masyarakat meningkat, kemampuan mengkonsumsi bertambah sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat semakin banyak jenis dan jumlah barang atau jasa yang diminta, sehingga produksi meningkat, akhirnya lebih banyak sumberdaya alam dan tenaga kerja digunakan dalam proses produksi.

Dari berbagai pandangan yang disampaikan para ahli dapat disimpulkan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang

apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya dan dapat berlangsung dalam jangka panjang.

2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut harus memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Abipraja (2002:94) menjelaskan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya Arsyad (1999:108) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Lebih lanjut disebutkan bahwa masalah pokok dalam pembangunan ekonomi adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, Kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Sejalan dengan pandangan tersebut maka menurut Barzelay (1991) pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses dimana terdapat kerjasama antara pemerintah lokal, kelompok masyarakat, dan sektor swasta yang dibentuk untuk mengelola sumber daya yang ada, untuk menciptakan pekerjaan, dan merangsang kegiatan ekonomi dari luar wilayah tertentu. Hal ini menekankan kontrol daerah, menggunakan potensi sumber daya manusia yang ada, kelembagaan, dan sumber daya fisik.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa konsep pengembangan ekonomi daerah dapat mengacu pada tiga kategori.

1. Pengembangan ekonomi daerah terkait dengan berkembangnya ekonomi yang berbasis pada masyarakat lokal. Hal ini biasanya ditandai dengan berkembangnya karakteristik masyarakat lokal, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.
2. Pengembangan ekonomi lokal ditandai dengan perkembangan dunia bisnis (*enterprise*) di daerah baik usaha kecil, menengah maupun besar.
3. Pengembangan ekonomi lokal dalam menyangkut perencanaan dan pengelolaan ekonomi secara makro.

Menurut Soegijoko (1997:145) pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah dan pembangunan pemerintahannya. Pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral, seperti pertanian, industri dan jasa yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.

Pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Di mana desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Sementara dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek, yaitu:

1. Bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang.
2. Untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan penyusunan perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif. Hal ini didasarkan pada kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan pemerataan pembangunan, yang berarti bahwa kebijakan pembangunan nasional harus

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antara daerah.

Kemudian Glasson dalam Elmi (2003a:87) mengemukakan bahwa perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan non basis. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dan menjualnya atau memasarkan produk-produk ke luar daerah. Sedangkan kegiatan-kegiatan bukan basis (*non basic activities*) adalah usaha ekonomi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi daerah yang bersangkutan saja. Artinya kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk untuk diekspor ke luar daerahnya. Oleh karena itu, ruang lingkup produksi mereka dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal.

Menurut teori tersebut, meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam suatu daerah, akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu dan akan meningkatkan volume kegiatan ekonomi bukan basis (*effect multiplier*). Sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis, akan berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh kegiatan basis.

Kuncoro (2004:112-113) mengemukakan bahwa teori pembangunan yang ada sekarang (sebagaimana yang dapat diuraikan pada bagian sebelumnya) tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori

pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini dapat disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.
PARADIGMA BARU TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan "kondisi" penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan Komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetetif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan Angkatan Kerja	Pengetahauan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber : Arsyad (1999:119)

Dari berbagai pemikiran tersebut di atas, maka para ahli ekonomi menganjurkan bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai sebagai berikut; (Todaro,2004:25-27):

1. Ketahanan (*Sustenance*), kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*), pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude*, kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2.1.3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan ekonomi daerah berawal dari pandangan yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili dalam suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah. Menurut pandangan ini, pembangunan ekonomi daerah hanya bersifat pembangunan (oleh pemerintah pusat) di daerah sehingga masyarakat daerah tidak mampu mengakses pada proses pengambilan keputusan publik untuk menentukan nasib sendiri. Munculnya kebijakan pemerintah nasional yang memberikan kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka penerapan kebijakan desentralisasi.

Secara umum perencanaan pembangunan ekonomi daerah didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional (Wrihatnolo dan Riant, 2006:65).

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa secara praktis perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (*publik*) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling kebergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara:

1. Secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
3. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah.
4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia.
5. Sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Arsyad (1999:127) dan Kuncoro (2004:46) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut arsyad, ada tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah:

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional (horisontal dan vertikal) di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya; administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas yang biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia dengan tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut.

Perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

Koncoro (2004:47) menjelaskan ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya.
2. Kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalnya beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah.

Kemudian Wrihatnolo dan Riant (2006:66) mengemukakan bahwa argumen tentang pentingnya pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah berdasarkan alasan politik, bukan murni alasan ekonomi. Dalam dimensi alasan politik, perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat sebagai wahana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara dalam dimensi alasan ekonomi, perencanaan pembangunan dapat dilihat sebagai wahana mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dan sasaran pembangunan sosial secara lebih nyata di daerah-daerah.

2.1.4 Otonomi Daerah

Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang "otonomi daerah" menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing.

Pengertian otonomi tidak diatur dalam UUD 1945 maupun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 melainkan hanya dapat disimpulkan dari rumusan pasal-pasalnya. Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) kata "Otonomi" disatukan dengan kata "asas" sehingga dikenal dengan istilah "asas otonomi", yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, otonomi berarti mengatur dan mengurus sendiri.

Berbeda dengan UUD 1945, dalam pasal 1 huruf (f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kata "otonomi" diikuti dengan daerah" yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Hal tersebut juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa istilah otonomi juga diikuti dengan kata "daerah". Memperhatikan rumusan pasal tersebut, maka "otonomi" berarti mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa hakikat otonomi tidak lain adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri dan menyelenggarakan urusan serta kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Dengan demikian maka daerah yang diberikan otonom dengan inisiatif sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan jalan mengadakan peraturan-peraturan daerah dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional.

Rasyid dkk (2002:174) menjelaskan otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan daerah untuk mendayagunakan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Kemudian Hatta (1982:2) mengemukakan bahwa otonomi sering diartikan dengan pemerintahan sendiri. Pemerintahan sendiri berarti pertanggungjawaban,

berarti pula berbagai kekuasaan antara pemerintah dengan rakyat. Peraturan-peraturan yang diperbuat untuk penyempurnaan pekerjaan di kabupaten, kalau tidak dijalankan tidak ada gunanya. Jika otonomi sudah berjalan, kecuali sebagian mendapat subsidi dari pemerintah, selainnya bisa hidup dengan pencaharian sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jikalau kabupaten hanya dapat hidup dengan subsidi, maka rasa tanggungjawab di kalangan rakyat tidak kuat.

Menurut Halim (2004:22) dan Sidik (2002:8) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satu dapat diukur melalui kinerjanya. Menurut Musgrave *and* Musgrave dalam Reksohadiprodjo (2001:155) digunakan ukuran derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain :

a. $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$

b. $\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBK)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$

c. $\frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$

TPD = PAD + BHPBP + SB

Selanjutnya Tim LPEM-FEUI pada laporan akhir kebijakan desentralisasi dalam masa transisi (2000) dalam Halim (2004:26) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil. Ratio yang digunakan antara lain:

1. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Total.
2. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengeluaran rutin.
3. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil dengan Pengeluaran Total.
4. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil dibagi dengan Pengeluaran Rutin.

Berdasarkan perhitungan ratio tersebut, jika hasilnya tinggi, maka peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai urusan daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Kedua model tersebut saling melengkapi, perbedaannya kalau model pertama melihat dari sisi penerimaan dan model kedua melihat dari sisi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut akan diperoleh pola hubungan dan tingkat kemandirian suatu daerah. Secara konseptual pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Halim (2004:188-189) ada 4 pola hubungan yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yaitu:

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat dominan dibandingkan dengan kemandirian daerah. Artinya daerah tindak mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berdasarkan pola hubungan tersebut, karena adanya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berbeda, maka akan membawa dampak pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dikemukakan seperti pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.
POLA HUBUNGAN DAN TINGKAT KEMAMPUAN DAERAH

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
1. Rendah sekali	0 - < 25	Instruktif
2. Rendah	25 - < 50	Konsultatif
3. Sedang	50 - < 75	Partisipatif
4. Tinggi	75 - < 100	Delegatif

Sumber: Halim (2004:188-189)

Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja daerah, melalui penentuan posisi fiskal daerah dengan cara menghitung koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin elastis Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka struktur PAD di daerah akan semakin baik dengan suatu formula sebagai berikut:

$$e = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

Keterangan:

e = elastisitas

ΔPAD = persentase perubahan Pendapatan Asli Daerah tahun yang berlaku dengan tahun sebelumnya.

ΔPDRB = persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto tahun yang berlaku dengan tahun sebelumnya.

Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Sebenarnya "otonomi daerah" bukanlah suatu hal yang baru, bahkan hal tersebut sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan orde baru. Namun otonomi daerah

pada waktu itu hanyalah sebatas jargon politik yang dalam prakteknya tidak termanifestasikan secara riil dan signifikan. Otonomi daerah erah orde baru yang selama ini diberikan tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional dan pembiayaan yang adil, rasional dan proporsional. Tuntutan tersebut oleh pemerintah direspon dengan dikeluarkannya dua buah Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang membawah perubahan mendasar pada sistem pemerintahan dan hubungan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002a).

Dengan dikeluarkannya kedua Undang-undang tersebut, diharapkan misi yang terkandung di dalamnya benar-benar dapat tercapai, tidak sekedar slogan kosong belaka semata. Misi yang terkandung di dalam kedua Undang-undang tersebut adalah:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini adalah Otonomi Daerah yang berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga direvisi menjadi

Undang-undang Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2004. Menurut Undang-undang ini, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung-jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip dasar otonomi daerah adalah kemandirian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di daerahnya. Oleh karenanya, sejauh

memungkinkan, tidak saja dalam hal pemberian pelayanan, tetapi juga dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan. Dalam konteks ini penting bagi pemerintah daerah untuk dapat memiliki sumber-sumber penerimaan sendiri (PAD) yang lebih besar. Mahi (2000) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan tidak saja untuk merefleksikan tingkat otonomi yang lebih besar bagi daerah, tetapi juga menjaga stabilitas penerimaan bagi daerah. Ini berarti ketergantungan terhadap bantuan pusat secara bertahap perlu dikurangi melalui pemberian kewenangan perpajakan daerah yang lebih luas.

2.1.5 Sumber Pendapatan Daerah

Di Era Orde Baru (60an akhir sampai dengan pertengahan 1999), Undang-undang yang mengatur soal pemerintahan daerah berikut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Dalam Undang-undang tersebut di pasal 55 dikatakan bahwa, dalam rangka menjalankan tugas-tugas atau fungsi-fungsinya pemerintah daerah dibekali dengan beberapa sumber pendapatan, yakni:

a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:

i) Hasil pajak daerah

ii) Hasil retribusi daerah

iii) Hasil perusahaan daerah (BUMD)

iv) Lain-lain hasil usaha daerah yang sah

b. Pendapatan yang berasal dari pusat:

i) Sumbangan dari pemerintah

ii) Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada pasal selanjutnya ditetapkan bahwa suatu pajak negara dapat diserahkan kepada daerah, dan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan Undang-undang. Dalam kerangka Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tersebut, jenis-jenis penerimaan daerah masih diatur dengan Undang-undang Nomor 11 dan 12 tahun 1956, ditambah berbagai peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 dan 12 tahun 1956 tersebut, beberapa jenis pajak yang sebelumnya merupakan sumber penerimaan pusat diserahkan kepada daerah. Namun, hanya sebagian kecil yang menghasilkan penerimaan secara memadai dan menjadi sumber penerimaan utama provinsi, yakni antara lain:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan

c. Pajak Kendaraan di Atas Air (potensial untuk beberapa provinsi di luar Jawa)

Sementara untuk daerah tingkat II, jenis-jenis pajak dan retribusi sangat beragam, tetapi juga hanya sebagian kecil saja yang dapat menghasilkan penerimaan secara signifikan. Jenis-jenis pajak dati II yang cukup besar antara lain adalah:

a. Pajak Pembangunan I (terutama di kota-kota besar dan daerah wisata)

b. Pajak Penerangan Jalan Umum

c. Pajak Reklame

d. Pajak Tontonan dan Keramaian Umum

e. Pajak Pendaftaran Perusahaan

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikeluarkan pertengahan tahun 1997 sebenarnya memiliki tujuan jangka panjang untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pajak-pajak dan retribusi daerah ataupun merasionalkan jenis-jenis pungutan. Sumber penerimaan bagi provinsi dan kabupaten/kotamadya disederhanakan. Sumber penerimaan pajak provinsi adalah:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB – merupakan pajak yang hasilnya dibagi dengan daerah tingkat II)

Sementara untuk daerah kabupaten/kotamadya, jenis-jenis pajaknya menjadi:

a. Pajak atas Hotel dan Restoran

b. Pajak Reklame

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Penerangan Jalan Umum

e. Pajak atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan

f. Pajak Bahan Galian C

Harapan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 ini adalah dengan mengurangi jenis pungutan. Pemerintah daerah dapat memusatkan perhatian pada sumber penerimaan yang potensial sehingga dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh. Suwandi (2002:22) menyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan

potensial yang dimiliki daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya.

Selain itu, dengan menghapuskan jenis-jenis pungutan yang berpotensi menimbulkan distorsi terhadap proses alokasi ekonomi, efisiensi dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Namun jika melihat sumber-sumber pungutan yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut, kecenderungan bias ke perkotaan yang sudah ada nampaknya semakin kuat (Simanjuntak, 2001:5).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa adanya pajak baru seperti pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan serta pajak atas pemanfaatan bahan galian C merupakan upaya untuk mengurangi bias tersebut. Akan tetapi ada beberapa alasan yang membuat upaya ini menjadi sulit untuk berhasil yaitu:

1. Tidak semua daerah memiliki sumber air dan cadangan bahan galian, sehingga walaupun adanya pajak ini akan membantu daerah pedesaan yang memiliki sumber daya alam tersebut, sebagian daerah lain yang tidak memiliki akan tetap ketinggalan dalam pengumpulan pendapatan.
2. Penanganan atas kedua jenis pajak tersebut menuntut sofistikasi yang tinggi. Sementara jika melihat kualitas petugas pelaksana di daerah yang umumnya masih belum memadai, maka nampaknya masih sulit bagi mereka untuk memanfaatkan sumber penerimaan ini secara maksimal tanpa menimbulkan distorsi yang besar terhadap perekonomian.
3. Penolakan terhadap pungutan ini akan lebih besar di daerah yang berbasis pedesaan ketimbang yang berbasis perkotaan, sehingga kembali akan lebih

menguntungkan daerah perkotaan (terutama: kota-kota besar). Indikasinya kelihatan di beberapa daerah.

Hal lain yang juga amat penting untuk dikemukakan adalah bahwa, karena berbagai faktor yang berkaitan dengan kesiapan administrasi dan peraturan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 ini praktis baru dapat diimplementasikan pada awal tahun 1998, itupun untuk sebagian daerah saja. Sedangkan saat itu bertepatan dengan mulai terpuruknya perekonomian Indonesia. Akibatnya, Undang-undang tersebut bagi sebagian besar daerah cenderung hanya merupakan peraturan yang "mengebiri" kemampuan mereka menghimpun pendapatan tanpa kompensasi yang cukup. Tujuan jangka menengah dan panjang yang menjadi tekanan disini jelas diabaikan oleh daerah-daerah yang amat memerlukan sumber-sumber pendapatan segera di masa krisis. Apalagi sifat sentralistik Undang-undang tersebut yang dirasakan sudah tidak cocok lagi dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena lahirlah Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999.

Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 merupakan tanggapan terhadap perkembangan aspirasi yang menginginkan format baru hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Aspirasi ini terbentuk sebagai reaksi terhadap rangkaian praktek penyelenggaraan pemerintahan sentralistik yang berlangsung selama orde baru. Hubungan pemerintah pusat dan daerah di masa orde baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dirasakan oleh pemerintah daerah sebagai tidak kondusif bagi pembangunan daerah. Bentuk otonomi pemerintah daerah memang dicoba diperkenalkan, namun pada prakteknya pemerintah pusat memegang hampir seluruh kendali pemerintahan, dan menyisakan

ruang yang terbatas bagi pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu tidak hanya dalam kerangka hubungan politis dan wewenang pemerintahan, namun juga terlaksana dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah. Banyak studi menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari segelintir negara dengan sistem perpajakan yang paling tersentralisasi di dunia (Simanjuntak, 2001:5).

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada umumnya sumber Pendaptan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai sebagian kecil anggaran daerah. Kondisi semacam ini jelas akan menyulitkan bagi daerah-daerah untuk bisa "mandiri" dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan yang dimiliki sekarang tidak memungkinkan daerah, terutama daerah kabupaten dan kota yang menjadi titik berat pelaksanaan otonomi, untuk bisa memperoleh pendapatan sendiri yang signifikan. Walaupun diyakini bahwa di dalam prinsip keuangan negara untuk sistem pemerintahan bertingkat, otonomi daerah yang nyata itu tidak berarti daerah harus mampu membiayai seluruh atau sebagian besar dari pengeluarannya. Namun dalam situasi dewasa ini yang sarat dengan eforia reformasi, maka nampaknya perbaikan (peningkatan) dari sumber-sumber pendapatan daerah sudah tidak bisa ditawar lagi.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yang khusus mengatur soal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat tiga sumber dana perimbangan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang titik beratnya

tetap pada daerah kabupaten/kota. Tiga sumber dana perimbangan ini untuk melengkapi sumber dari PAD, pinjaman daerah, dan sumber-sumber lainnya. Disorotinya dana perimbangan ini adalah karena selain merupakan hal yang baru juga dari segi jumlah ia relatif akan sangat signifikan. Mardiasmo (2004a:50) dana perimbangan bertujuan agar:

1. Terjadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalance*).
2. Terjadi pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (*horizontal imbalance*).

Tiga sumber itu adalah; bagian daerah dari penerimaan pajak (PBB, BPHTB dan PPh Perorangan) dan penerimaan sumber daya alam (SDA), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Bagian penerimaan daerah dari PBB, BPHTB, PPh perorangan, dan terutama sekali SDA, akan sangat menambah pemasukan bagi daerah-daerah tertentu. Untuk daerah-daerah yang intensitas kegiatan ekonominya rendah dan miskin sumber daya alam, maka bagian dari sumber ini akan kecil. Seperti diketahui distribusi SDA tidak merata, dan hanya segelintir daerah (seperti Riau, Aceh, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya) yang kaya akan SDA. Penelitian dari LPEM-FEUI (1999) menunjukkan bahwa disparitas antar daerah akan bertambah lebar sebagai akibat dari bagi hasil seperti yang diatur Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 ini. Akan halnya bagi hasil pajak (PBB, BPHTB, dan PPh

perorangan), sebagaimana pada umumnya pajak, cenderung untuk potensial di daerah-daerah perkotaan. Apalagi PPh perorangan, praktis terkonsentrasi di DKI.

Sementara itu, DAU dimaksudkan sebagai pengganti dua transfer utama dari pusat kepada daerah yang selama ini ada, yakni Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Instruksi Presiden (INPRES) Jumlahnya ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN. Selanjutnya 10% dari dana tersebut akan dialokasikan kepada provinsi dan sisanya yang 90% dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Tujuan pengalokasian DAU ini selain dalam kerangka otonomi pemerintahan di tingkat daerah juga, utamanya untuk pemerataan kemampuan penyediaan pelayananan publik di antara para pemerintah daerah di Indonesia. Jadi, semacam *equalization grant*. Secara implisit DAU ini juga dimaksudkan untuk menetralkan dampak peningkatan ketimpangan antar daerah akibat bagi hasil pajak dan SDA tersebut di atas. Itulah sebabnya jumlahnya secara keseluruhan amat signifikan. Masalah utama disini adalah menentukan formula alokasi-nya yang menurut Undang-undang mesti didasarkan atas kebutuhan dan potensi dari masing-masing daerah. Tekanan dan tuntutan dari banyak daerah, terutama daerah-daerah kaya SDA, akan menyulitkan penyusunan formula yang obyektif dan adil.

Komponen terakhir dari dana perimbangan adalah dana alokasi khusus (DAK), yang di dalam Undang-undang tidak disebutkan secara spesifik untuk membiayai bidang apa. Namun kriteria umumnya menyatakan bahwa DAK ini dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan formula DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau

prioritas nasional di daerah. Adapun sumber pembiayaan DAK ini dinyatakan secara spesifik, yakni salah satunya yang utama adalah dana reboisasi (DR). Perimbangan DR ini adalah 40% untuk pemerintah daerah penghasil sebagai DAK dan 60% untuk pusat.

Berbicara mengenai sumber-sumber penerimaan daerah tentunya mesti dikaitkan dengan kewajiban pengeluaran yang terkait dengan berbagai kewenangan dan tugas daerah nantinya. Isu pokok disini menyangkut perimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah di masa depan. Masih belum jelas sama sekali apakah jumlah dana perimbangan yang berasal dari DAU (yakni minimum 25% dari penerimaan dalam negeri), bagi hasil pajak dan SDA, dan DAK akan sepadan dengan kebutuhan pengeluaran daerah yang harus ditanggung oleh daerah akibat penyerahan wewenang pemerintahan. Ini perlu pengkajian yang mendalam dan merupakan persoalan jangka menengah dan panjang, mengingat transfer dari pusat itu seyogyanya seimbang dengan penyerahan wewenang yang berimplikasi kepada pengeluaran. Transfer DAU tahun 2001 ini saja sudah mengundang protes dari berbagai daerah, dimana sebagian mengeluhkan bahwa dana ini tidak cukup bahkan untuk membayar gaji pegawai. Terlepas dari pertanyaan bagaimana cara daerah mengukur kecukupan DAU tersebut, penguatan sumber keuangan daerah mutlak diperlukan (Simanjuntak,2001:21).

Memang dinyatakan bahwa apabila daerah belum siap untuk menjalankan atau menerima suatu kewenangan atau fungsi, maka mereka memiliki keleluasaan untuk tidak menjalankannya dulu. Namun menunggu sampai daerah "mampu", khususnya secara finansial, apalagi dengan komposisi pajak dan retribusi daerah

seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, sepertinya memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itulah, untuk mempercepat implementasi otonomi daerah, nampaknya perlu dilakukan beberapa perubahan untuk memperkuat struktur keuangan daerah. Perubahan ini bisa menyangkut sumber-sumber PAD itu sendiri, maupun bagi hasil beberapa jenis pajak yang selama ini mutlak menjadi bagian pusat. Untuk itulah dikeluarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pada akhir tahun 2000 yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999, pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan signifikan bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini apabila terwujud, diyakini menjadi refleksi dari kemampuan daerah melaksanakan otonomi. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 menetapkan beberapa jenis pajak dan retribusi bagi daerah, sebagai perbaikan dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997. Namun demikian, daerah juga diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditentukan tersebut, asalkan sesuai dengan beberapa kriteria yang juga dimuat dalam UU ini.

Sumber penerimaan pajak provinsi yang ditetapkan disini adalah:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sedangkan pajak-pajak kabupaten/kota adalah:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir.

Dibandingkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, ada beberapa perubahan disini yang diharapkan dapat menguatkan PAD (Simanjuntak,2001:7)

1. Untuk provinsi, berupa perluasan PKB dan BBNKB menjadi PKB dan BBNKB yang memasukkan kendaraan di atas air.
2. Juga untuk provinsi, penambahan jenis pajak dengan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang sebelumnya merupakan pajak daerah kabupaten/kota. Bagi provinsi yang tidak menjadi titik berat otonomi, sumber-sumber penerimaan daerah yang sedemikian dianggap akan memadai.
3. Dibedakannya pajak hotel dan pajak restoran untuk kabupaten/kota yang semula dijadikan satu.
4. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (untuk kabupaten/kota) yang diubah menjadi pajak pengambilan bahan galian golongan C.

5. Masih untuk kabupaten/kota, ditambahkannya pajak parkir sebagai sumber penerimaan pajak. Pajak parkir ini dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
6. Disamping tambahan maupun perluasan jenis pajak tersebut, kabupaten/kota juga diberikan keleluasaan untuk menambah dengan jenis-jenis pajak baru. Namun ada rambu-rambu atau kriteria yang mesti diikuti, yaitu:
   a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
   b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
   c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
   d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat.
   e. Potensinya memadai.
   f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
   g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan
   h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Jika ada pajak daerah yang akan dikenakan tidak memenuhi satu saja dari rambu di atas, maka seyogyanya dipertimbangkan untuk dibatalkan pengesahannya. Secara tegas Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 menyatakan adanya kewenangan

pemerintah pusat untuk membatalkan pajak-pajak yang dianggap tidak memenuhi syarat tersebut.

2.1.6 Pajak Daerah

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai pembayaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum.

Mangkoesoebroto (2001:181) mengemukakan bahwa pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Selanjutnya Davey (1988:37-39) memberikan pengertian pajak diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau yang dipungut oleh pemerintah daerah.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Kemudian Suparmoko (2002:55-56) menyatakan bahwa pajak daerah tidak ada perbedaan dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Obyek pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka paling tidak terdapat 5 (lima) hal, yakni:

1. Pajak daerah merupakan iuran wajib

2. Wajib pajak daerah adalah perorangan atau badan

3. Tidak ada kontra prestasi yang seimbang

4. Dapat dikenakan secara paksa

5. Dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu, Devas dkk (1989:61-62) memberikan kriteria yang lebih rinci untuk menetapkan kelayakan suatu pajak. Sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menilai pajak daerah tersebut layak atau tidak, yaitu :

1. Hasil (*Yield*), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan layanan yang dibiayainya yang meliputi :
   a. Hasilnya lebih pasti dan dapat diprediksi. Hasil pajak hendaknya relatif stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agar mudah dalam perencanaan belanja.
   c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan kenaikan pendapatan.
   d. Perbandingan antara biaya pungut (*collection cost*) dengan hasil pajak (*tax yield*).
2. Keadilan (*equity*)
   a. Dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan kewajiban wajib pajak harus jelas tidak sewenang-wenang.
   b. Pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama.
   c. Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum di atas, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi (Sidik, 2002:3).

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: *fungsi budgeter* dan *fungsi regulator*. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

2.1.7 Retribusi Daerah

Kaho (2001:170) menjelaskan retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Selanjutnya Suparmoko (2002:61) mengungkapkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Brata dan Trihartanto (2004:52) mengemukakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang tertentu pada masyarakat dengan memberikan imbalan jasa secara langsung. Sifat pungutan tersebut dikaitkan dengan pemberian layanan tertentu yang diberikan pemerintah sebagai imbalan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

Dari pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

1. Retribusi dipungut oleh negara/daerah
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (26) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan

sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Selanjutnya pada pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ayat (2) retribusi dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu; retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perijinan tertentu. **Retribusi jasa umum** adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Cacatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat.
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pasar.
7. Retribusi Air Bersih.
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

10. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta.

11. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha meliputi:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
3. Retribusi Terminal.
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
5. Retribusi Tempat Penitipan Anak.
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesenggrahan/Vila.
7. Retribusi Penyedotan Kakus.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan.
9. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
11. Retribusi Penyebrangan di Atas Air.
12. Retribusi Pengolohan Limbah Cair.
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subyek retribusi perijinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan ijin yang bersangkutan. Obyek retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu meliputi:

1. Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.
2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
3. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Retribusi Ijin Gangguan.
5. Retribusi Ijin Trayek.
6. Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

2.1.8 Teori Ketenagakerjaan

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa data tersebut tidaklah mungkin program pembangunan direncanakan dan dilaksanakan. Makin lengkap dan tepat data mengenai

ketenagakerjaan yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu disusun. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kekuatan manusia merupakan unsur yang penting dalam pembangunan.

Istilah tenaga kerja tidaklah identik dengan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja (*manpower*) ialah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses kegiatan ekonomi (Tan Goan Tiang,1965) dalam (Mantra, 2004:224). Soeroto (1986:10) mengemukakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian tersebut di atas digunakan sebagai indikator untuk mengukur keterlibatan dalam kegiatan ekonomi. Artinya kegiatan tersebut harus menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi masyarakat. Oleh *International Labour Organization* (*ILO*) akhirnya diputuskan bahwa seseorang dapat maupun belum dapat dilibatkan dalam kegiatan ekonomi didasarkan pada umur, dan batasan umur ini diserahkan kepada setiap negara dalam hubungannya dengan pembagunan ekonomi.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mengambil penduduk umur 10 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk usia kerja. Akan tetapi sejak 1998 mulai menggunakan usia 15 tahun ke atas, atau lebih tua batas usia kerja pada periode sebelumnya. Biasanya batasan umur yang digunakan berbeda-beda untuk setiap negara, tetapi yang sering dijadikan pertimbangan adalah tingkat perekonomian dan setuasi tenaga kerja. Semakin maju perekonomian di suatu daerah atau negara batas umur yang ditentukan usia kerja minimum semakin tinggi (Mantra, 2004:224).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menurut Simajuntak (1985:10) tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Tiga golongan penduduk yang disebut terakhir, yaitu mencari kerja, bersekolah serta yang mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu ikut bekerja. Tenaga kerja (*manpower*) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tidak semua penduduk yang mampu bekerja ini benar-benar ingin bekerja pada usia 15 tahun ke atas; golongan yang ingin bekerja ini dinamakan angkatan kerja dan penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja dinamakan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja (*labour force*) adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan; seperti orang-orang yang kegiatannya bersekolah, pengurus rumah tangga serta penerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat) (Dumairy,1996:74-75).

Angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua sub kelompok yaitu:

1. Golongan yang bekerja
2. Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

Angkatan kerja yang dapat digolongkan bekerja menurut Badan Pusat Statistik dari hasil sensus penduduk pada tahun 1990 tidak jauh berbeda dengan hasil

sensus tahun 1980. Survey Penduduk Antar Sensus 1985 dan Sensus Penduduk tahun 1971 dalam mendefinisikan angkatan kerja yang bekerja adalah :

1. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari.
2. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari:
   a. Pekerja tetap, pegawai-pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk bekerja (karena cuti, sakit, mogok ataupun perusahaannya menghentikan kegiatan sementara, misalnya karena kerusakan pada mesin)
   b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panenan atau menunggu hujan untuk menggarap sawah.
3. Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, dan sebagainya (Badan Pusat Statistik, 1991:29)
4. Sedangkan penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari kerja menurut referensi dan waktu tertentu. Penduduk setengah menganggur ialah mereka yang dimasukan dalam kelompok bekerja tetapi sesungguhnya mereka adalah kaum penganggur ditinjau dari segi jam kerjannya bekerja kurang dari 35 jam seminggu (Badan Pusat Statistik, 1991 : 29-30).

Menurut Simanjuntak (1985:6) yang termasuk bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Mereka itu adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha

untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa. Kelompok ini terdiri dari :

a. Sekolah, yaitu mereka yang kegiatannya hanya bersekolah
b. Mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
c. Penerima pendapatan, adalah mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tapi mereka memperoleh penghasilan misalnya pensiunan, bunga simpanan di bank dan lainnya.
d. Lain-lain, adalah mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain karena usia lanjut, lumpuh, dungu dan sebagainya.

Persentase angkatan kerja (AK) terhadap tenaga kerja (TK) dapat disebut sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan rumus sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \text{ X } 100\%$$

Sedangkan angka pengangguran adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur. Selain penganggur terbuka juga terdapat pengangguran friksional dan pengangguran musiman. Pengangguran friksional adalah penganggur yang terjadi karena perubahan pekerjaan dalam suatu perekonomian yang dinamis. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi sesuai dengan musim-musim tertentu, misalnya pada musim panas. Formulasi umum tingkat pengangguran sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah penganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \text{ X } 100\%$$

Angka-angka semacam ini berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung di pasar kerja. Pemahaman tentang setuasi pasar kerja berguna bukan saja bagi perumusan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan penciptaan kesempatan kerja. Akan tetapi juga bagi perumusan kebijaksanaan kependudukan sumber daya manusia secara keseluruhan.

2.1.9 Kesempatan Kerja dan Lapangan Pekerjaan

Dalam ketenagakerjaan biasanya dilihat antara jumlah angkatan kerja (AK) dan jumlah kesempatan kerja (KK) yang tersedia. Jika AK lebih besar dari KK maka terjadi pengangguran. Secara umum laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Indikator elastisitas ini sering digunakan untuk menganalisis sifat usaha padat modal atau padat karya, meskipun menggambarkan dari sudut pandang makro. Adapun rumus untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja adalah:

$$Ekk = \frac{\Delta KK}{\Delta PDRB} X\ 100\%$$

Keterangan:

Ekk adalah elastisitas kesempatan kerja
ΔKK adalah laju pertumbuhan kesempatan kerja
ΔPDRB adalah laju pertumbuhan ekonomi

Biro Pusat Statistik (1991:3) kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan dapat menampung semua tenaga kerja yang tersedia, mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Dengan ketentuan lapangan kerja yang tersedia tersebut mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Pengertian lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari suatu usaha atau perusahaan atau instansi. Lapangan pekerjaan ini biasanya digolongkan atas :

1. Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa-Jasa

Dalam penciptaan kesempatan kerja pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu proses produksi dan pasar (Soeroto, 1986 : 13). Dalam proses produksi diperlukan masukan/*input* yang berupa bahan baku, modal, sumber daya manusia, alam dan teknologi yang dikombinasikan untuk menghasilkan *output* yang berupa barang dan jasa atau investasi yang diperlukan oleh proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Seterusnya diperlukan adanya pasar untuk mendistribusikan *output* kepada yang menggunakannya (konsumen) agar perusahaan memperoleh pendapatan, di sisi lain, diperlukan pula pasar untuk menyediakan *input* bagi proses produksi. Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, kebijakan kesempatan kerja telah dirumuskan dalam empat macam kebijakan (Soeroto, 1986:98-111), yaitu :

1. Kebijakan kesempatan kerja umum, yang bertujuan memberi dorongan pada perluasan kesempatan kerja atau untuk menimbulkan iklim yang menguntungkan bagi pengembangan dunia usaha untuk penciptaan serta perluasan kesempatan kerja. Dorongan ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat kebijakan ekonomi dan keuangan, seperti perkreditan, perpajakan, bea masuk, suku bunga, nilai tukar mata uang, tingkat harga, upah, pasar kerja, teknologi, pendidikan dan latihan.
2. Kebijakan kesempatan kerja sektoral, yang dilakukan dengan pembangunan sektoral, baik dilakukan dalam rangka pembangunan nasional, daerah maupun desa. Hal ini terutama diarahkan kepada penciptaan kesempatan kerja melalui pemilihan produk dan teknologi yang bersifat padat karya.
3. Kebijakan kesempatan kerja khusus, dimaksudkan sebagai program dan langkah-langkah dalam kebijakan yang direncanakan khusus untuk memperluas

kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja serta untuk mengurangi pengangguran yang timbul sewaktu-waktu sebagai akibat musim, bencana alam atau serangan hama yang meluas.

4. Kebijakan pembangunan daerah yang pada dasarnya mempunyai fungsi dalam perluasan kesempatan kerja apabila dilihat dari pembangunan intern tiap-tiap daerah dan hubungan antar daerah. Pada hakekatnya tiap-tiap proyek pembangunan dilakukan dalam suatu daerah dan kebijakan kesempatan kerja selalu mempunyai implikasi daerah dan implementasinya harus menjadi komponen pembangunan daerah.

2.1.10 Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan harapan manusia hidup. Kesejahteraan merupakan langkah awal menuju kebahagiaan. Setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda tentang batasan kesejahteraan karena setiap individu atau setiap kelompok masyarakat mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain terhadap barang atau jasa. Manusia harus melakukan suatu tindakan untuk mencapai kesejahteraan yang dibutuhkannya itu, sedemikian hingga, setiap individu atau kelompok masyarakat akan mempunyai tindakan yang berbeda satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan yang dibutuhkan itu. Kesejahteraan manusia ditentukan sampai seberapa jauh manusia dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.

Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang semakin meningkat pula. Proses natural di atas dapat terlaksana jika

asumsi-asumsi pembangunan yang ada, yaitu kesempatan kerja atau partsipasi termanfaatkan secara penuh (*full employment*), setiap orang memiliki kemampuan sama (*equal productivity*), dan masing-masing pelaku bertindak rasional (*efficient*) dapat terpenuhi.

Mubyarto (1997:188) mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran yang sudah dirasakan merata oleh seluruh warga masyarakat. Dengan pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin berhasil, maka kesenjangan sosial akan berkurang, termasuk di dalamnya keberhasilan meningkatkan kemakmuran penduduk yang masih hidup dalam serba kekurangan.

Kemudian Wrihatnolo dan Nugroho (2006:10) mengemukakan bahwa perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh dimensi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan tingkat kesejahteraan menurut dimensi ekonomi adalah perubahan penguasaan/pemilikan aset ekonomi, dari tidak menguasai/memiliki menjadi menguasai/memilik, dari sedikit menguasai/memiliki menjadi lebih banyak menguasai/memiliki, dan seterusnya sampai pada tingkat manusia tidak dapat menguasai/memiliki lebih banyak lagi suatu aset ekonomi. Aset ekonomi adalah aset yang dapat menggerakan tindakan ekonomi, seperti kebutuhan memperoleh uang, kebutuhan memiliki tabungan, kebutuhan memiliki modal, kebutuhan untuk kerja.

Perubahan tingkat kesejahteraan menurut dimensi sosial adalah perubahan penguasaan/pemilikan aset sosial. Aset sosial adalah aset yang dapat menggerakan tindakan sosial, seperti kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, kebutuhan untuk memperoleh kesehatan, kebutuhan untuk memperoleh kesenangan.

Perubahan tingkat kesejahteraan menurut dimensi politik adalah perubahan penguasaan/pemilikan aset politik. Aset politik adalah aset yang dapat menggerakan tindakan politik, seperti kebutuhan untuk menyuarakan pendapat, kebutuhan untuk membentuk ikatan politik, kebutuhan untuk memiliki hak politik yang sejajar.

Perubahan tingkat kesejahteraan menurut dimensi hukum adalah perubahan penguasaan/pemilikan aset hukum. Aset hukum adalah aset yang dapat menggerakan tindakan hukum, seperti kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum, kebutuhan untuk memiliki hak yang sejajar, kebutuhan untuk memperoleh perlakuan adil.

Samuelson (2004:46) mengemukakan bahwa sebenarnya telah ada *welfare economics* baru yang tidak semata-mata berdasar kriteria ekonomi sempit, tetapi telah mengandung nilai-nilai etikal. Sebagai kebijakan distribusi pendapatan *welfare economics* mengemban *ethical precept* (nilai-nilai etis-normatif). Di lain pihak kaum *non-Weberian* yang menolak *Wertfreiheit der Wissenschaft* (*neutrality of sciense*) menurut *welfare economics* harus pula mengintroduksi dimesi *welfare* dari luar ilmu ekonomi. Dengan demikian dalam tataran *societal welafare* maka *social choice* dalam mencapai *social optimum* perlu mencari pendekatan baru, artinya sejak titik tolak awalnya preferensi individu-individu tidak lagi diasumsikan berdimensi kepentingan tunggal, tetapi *Multipartitus.*

Secara umum teori kesejahteraan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian, neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert *and* Hahnel, dalam Darussalam, 2005:77). Pendekatan *classical*

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

utilitarian menekankan bahwa kesenangan (*pleasure)* atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.

Neoclassical welfare merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip *Pareto Optimality*. Prinsip *Pareto Optimality* menyatakan bahwa *the community becomes better off if one individual becomes better off and non worse off.* Prinsip tersebut merupakan *necessary condition* untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum. Selain prinsip *pareto optimality*, *neoclassical welfare theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.

Perkembangan lain dalam teori kesejahteraan masyarakat adalah munculnya *new contractarian approach.* Prinsip dalam pendekatan ini adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Intisari pendekatan ini adalah setiap individu memiliki konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang tanpa adanya campur tangan.

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangnan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupan. Guna mencapai tingkat

kesejahteraan yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu prilaku (*behavioral*) yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Dalam kenyataannya, kesejahteraan hidup seseorang memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Thomas (2000:15) mengemukakan bahwa indikator kesejahteraan suatu negara dapat diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO2, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB). Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa kesejahteraan suatu negara akan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya. Sumber daya dalam perekonomian seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya alam.

Sumber-sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dari berbagai pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dapat dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan (*welfare*) mencakup beberapa parameter yang melekat pada individu. Dalam hal ini digunakan tiga kategori indikator untuk merepresentasikan *welfare*, yaitu pengeluaran konsumsi, pendidikan dan kesehatan. Penggunaan ke tiga kategori indikator ini mengacu pada konsep Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index/HDI*) yang diperkenalkan oleh UNDP.

2.1.11 Indeks Pembangunan Manusia

Muhammad (2004:4) menyatakan, bahwa orientasi dan titik sentral pembangunan yang hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi tidak lagi dijadikan model pembangunan, meskipun pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu ukuran kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi saja jauh dari mencukupi guna mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ia merupakan hasil dari berbagai kegiatan ekonomi: produksi, konsumsi, investasi, perdagangan dalam dan luar negeri, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Makin besar dan bervariasi kegiatan ekonomi pada suatu masyarakat, tentu hal itu baik karena ia akan menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja akan memberi penghasilan dan dengan penghasilan itu seseorang beserta keluarganya memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara, menurut peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, pembangunan sebagai pembebasan untuk memperoleh pilihan-pilihan yang luas itu berada dalam kerangka *human development*; jangan sampai manusia dikorbankan atas nama semua program yang memacu pertumbuhan. "Kebahagiaan manusia tidak bisa diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi.

Muhammad (2004:5) mengemukakan bahwa mengukur tingkat kesejahteraan rakyat sungguh pelik, karena tidak jarang kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang menyesatkan untuk menakar tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, Badan PBB untuk pembangunan manusia (UNDP) mengeluarkan laporan seperti

tahun-tahun sebelumnya tentang pembangunan manusia pada 2004. Laporan ini disebut *Human Development Report* 2004 yang mencakup 177 negara yang disurvei.

Sesungguhnya laporan ini merupakan kecenderungan dan tidak boleh dibaca untuk satu tahun saja. Ukuran yang dipakai oleh badan ini memang ukuran yang bersifat kuantitatif, jadi memang tidak menyentuh aspek spiritual dan kerohanian. Parameter yang dipakai seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia versi badan ini menggunakan empat ukuran: probabilitas harapan hidup pada waktu kelahiran, angka melek huruf untuk mereka yang berumur 15 tahun ke atas, jumlah penduduk yang terdaftar di SD, SMP, dan SMU, serta penghasilan rata-rata per orang dilihat dari sudut daya beli. Berdasarkan empat ukuran itu, lalu dilakukan penggabungan untuk mencapai indeks tertentu dan indeks inilah yang dijadikan ukuran pembangunan manusia (*Human Development Index).*

Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, dan telah digunakan sejak tahun 1993 oleh UNDP pada laporan tahunannya. Nilai Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pencapaian rata-rata pada sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni:

1. Usia yang panjang dan sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup.
2. Pendidikan, yang diukur dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per tiga; serta angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu per tiga.
3. Standar hidup yang layak, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita pada paritas daya beli dalam mata uang Dollar AS

Tambunan (2003:167) mengemukakan bahwa Indeks pembangunan manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan *human development index* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan manusia, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni: (a) kesahatan; (b) pendidikan yang dicapai, dan (c) standar kehidupan

Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan IPM-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dengan perkataan lain, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Todaro (2004:68) dan Koncoro (2004:115) HDI mencoba mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi). Berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu:

1. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup.
2. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah.
3. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita.

Komponen **pengetahuan** diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu: tingkat melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Indikator melek huruf dimaksudkan sebagai jumlah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang mampu membaca dan menulis huruf latin sebagai persentase terhadap total jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih. Indikator rata-rata lama sekolah adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan penduduk berusia 15 tahun atau lebih, yang dihitung dengan memasukan dua variabel yaitu gelar yang telah dicapai dan pencapaian tingkat pendidikan (*attainmet of education level*). Komponen **standar hidup layak** diperoleh dengan menggunakan indikator tingkat konsumsi riil per kapita yang disesuaikan.

Indeks tiga komponen dihitung dengan membandingkan perbedaan antara nilai indikator dan penentu nilai minimumnya dengan perbedaan antara penentu indikator maksimum dan minimum, atau secara singkat dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X(i) = [X(i) - X(i)\text{min}]/[X(i)\text{ maks} - X(i)\text{min}]$$

Di mana :

X(i) : Indikator ke-i (i = 1,2,3); X(i)maks:nilai maksimum X(i), X(i) min : nilai minimum X(i),

Kisaran antara nilai minimum dan maksimum untuk indikator yang tercakup sebagai komponen HDI adalah :

a. Haparan hidup kelahiran : 25 – 85 (Standar UNDP)

b. Tingkat melek huruf : 0 – 100 (Standar UNDP)

c. Rata-rata lama sekolah : 0 -15 (Standar UNDP)

d. Konsumsi per kapita disesuaikan

Berdasarkan prosedur di atas, HDI dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :

$HDI = 1/3[X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$

Di mana :

X (1) adalah indeks harapan hidup kelahiran

X (2) adalah indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah).

X (3) adalah indeks standar hidup layak/paritas daya beli

2.1.12 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*neto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2004a:21).

Suparmoko dkk (2006:31) menyatakan bahwa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah catatan tentang jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk waktu satu tahun lamanya. Nilai PDRB suatu daerah tersebut sebenarnya sama dengan nilai tambah yang diciptakan oleh semua sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dalam wilayah atau daerah yang sama.

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk keperluan analisis ekonomi serta perencanaan pembangunan di daerah, PDRB ditampilkan menurut struktur sektor

kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. Demikian pula PDRB tersebut sangat banyak digunakan sebagai instrumen untuk menilai keberhasilan pembangunan di daerah yang bersangkutan; baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan mengetahui struktur maupun laju pertumbuhan masing-masing sektor terhadap PDRB, maka hasil-hasil pembangunan dapat diketahui dengan jelas dan rencana pembangunan daerah dapat disusun secara jelas pula.

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan (BPS,2004b:21) yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Pendekatan Produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Metode pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Metode pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari; pengeluaran konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal domestik bruto, penambahan stok dan ekspor netto dalam wilayah tertentu.

Ketiga metode perhitungan PDRB tersebut, pendekatan produksi banyak digunakan dan diterapkan di daerah tingkat Kabupaten/Kota. Angka nominal PDRB lain dengan harga yang berlaku maupun dengan harga konstan diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai tambah kegiatan ekonomi yang terjadi pada masing-masing daerah. Dalam perhitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor sebagaimana yang dapat dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Dari definisi PDRB tersebut di atas, berikut ini dijelaskan mengenai beberapa istilah yang berhubungan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) yaitu: output; biaya antara; dan nilai tambah bruto. Kejelasan pengertian dari tiga istilah tersebut sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB.

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya nilai output diperoleh dari perkalian kuantum produksi dan harganya. **Biaya antara** terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi oleh unit-unit produksi dalam domestik tertentu pada rentang waktu tertentu (biasanya satu tahun). Sedangkan nilai **tambah bruto** merupakan pengurangan dari nilai output dengan biaya antaranya, atau apabila dirumuskan menjadi: Nilai Tambah Bruto = Output - Biaya Antara. Pengertian nilai tambah bruto sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB, yang tidak lain adalah penjumlahan dari seluruh besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi yang berada pada *region* tertentu, dalam rentang waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Walaupun angka PDRB belum bisa menunjukkan kemampuan/potensial ekonomi daerah secara riil, namun ukuran PDRB perkapita masih bisa sebagai tolak ukur kemakmuran ekonomi suatu daerah. Tingginya pendapatan per kapita suatu daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang mobilitasnya tinggi dan masyarakatnya hidup pada tingkat yang lebih sejahtera.

Iswardono (1990:17) mengemukakan bahwa, Pertumbuhan PDRB suatu daerah berpengaruh terhadap PAD, karena semakin besar PDRB suatu daerah akan semakin besar pula PAD yang diharapkan daerah tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan potensi daerah tersebut dalam menunjang produksi yang dihasilkan di daerah tersebut. Adanya iklim usaha yang menunjang, sarana dan prasarana akan mendorong laju pertumbuhan PDRB. Dengan demikian PAD memiliki dampak ganda, PAD

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dan sebaliknya PDRB berpengaruh terhadap PAD.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Rappaport (1999)

Melakukan penelitian tentang empat kelompok faktor-faktor empiris dari pertumbuhan ekonomi antara daerah (lokal) di Amerika Serikat dengan menggunakan data panel sebagai atribut lokal Amerika Serikat tahun 1970-1990. Salah satu fakta empiris yang dikaji adalah korelasi-korelasi kebijakan anggaran pemerintah dari pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam hal hubungan antara kebijakan anggaran pemerintah lokal dengan pertumbuhan ekonomi lokal tersebut (dilihat dari tiga indikator; migrasi netto, pertumbuhan pendapatan per kapita, dan pertumbuhan harga perumahan), dari estimasi-estimasinya mendapatkan empat fakta proses pertumbuhan ekonomi lokal di Amerika Serikat.

Keempat fakta proses pertumbuhan ekonomi lokal Amerika Serikat tersebut adalah: pertama adalah bahwa dari tahun 1970 sampai 1990, pertumbuhan ekonomi lokal berkorelasi negatif dengan besaran keuangan pemerintah lokal; kedua, pertumbuhan ekonomi lokal sepanjang periode yang diamati berkorelasi positif dengan pengeluaran pemerintah lokal untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah; ketiga, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 1970 sampai1990 berkorelasi negatif dengan pajak personal lokal; keempat, pertumbuhan ekonomi daerah berkorelasi negatif dengan pajak penjualan tertentu yang diambil oleh pemerintah lokal.

2.2.2 Aschauer (2000)

Penelitian ini menggunakan data 46 negara pendapatan rendah dan menengah dengan periode waktu 1970-1990. Selain menganalisis aspek penerimaan, studi tersebut sekaligus juga menganalisis aspek besaran investasi pemerintah serta efisiensinya. Berkaitan dengan aspek penerimaan, Aschauer menggunakan utang luar negeri sebagai proksi dari total utang pemerintah. Dalam hal ini, beban pajak sehubungan dengan pengakumulasian modal publik dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif tersebut misalnya melalui pajak yang secara berlebihan dibebankan kepada sektor swasta sehingga pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Dari estimasinya, Aschauer menemukan bahwa peningkatan investasi pemerintah yang dibiayai dengan utang luar negeri membawah pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Ismanto Hadi Santoso (2000)

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi di Jawa Timur, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang ditunjukkan oleh naiknya *output* domestik dan nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tersebut mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi selanjutnya, karena selain mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi juga menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga berarti semakin banyak barang dan jasa yang tersedia secara domestik, dan naiknya pendapatan mendorong tingginya daya beli masyarakat semakin tinggi.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sektor sekunder yang lebih cepat dibanding sektor primer, semakin menggeser peranan sektor primer dalam struktur ekonomi, dan memperbesar peranan sektor sekunder terutama sektor industri pengolahan. Pergeseran struktur ekonomi pada sisi *output* dan nilai tambah tersebut diikuti oleh pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Tetapi secara absolut sektor primer masih sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya kontribusi pekerja sektor primer yaitu sebesar 51,13% pada tahun 1989 dan 42,29% pada tahun 1994.

2.2.4 DJoko Mursinto (2004)

Melakukan penelitian tentang keuangan daerah, yang membahas derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah serta elastisitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kategori Pemerintahan kabupaten dan kota pada awal otonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kontribusi terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) hanya berkisar 3,07% sampai dengan 32,66%. Demikian pula dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) kontribusinya terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) berkisar antara 5,85% sampai dengan 29,92%. Sebaliknya kontribusi subsidi atau bantuan, baik yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) paling besar berkisar antara 45,82% sampai dengan 88,85%.

Bahkan bila digabungkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) kontribusinya terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah persentasinya, kecuali Kota Surabaya. Berdasarkan kenyataan tersebut jelaslah bahwa Total Penerimaan Daerah (TPD) kabupaten dan kota di Jawa Timur masih mengandalkan dana perimbangan utamanya yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini berarti dalam jangka pendek pada awal otonomi daerah, kabupaten dan kota sulit kiranya Total Penerimaan Daerah (TPD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu diperlukan kreativitas para pengelola pemerintahan kabupaten dan kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Kemudian bila dirinci kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Total Daerah (TPD) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berkisar antara 3,39% sampai dengan 35,59%. Bila dilihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Rutin Daerah (PRD) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berkisar antara 4,68% sampai dengan 50,84%. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai Pengeluaran Rutin Daerah (PRD) kabupaten dan kota berkisar 4,68% sampai dengan 50,84%. Pengeluaran Rutin Daerah (PRD) sebagian besar digunakan untuk membiayai belanja pegawai. Ini berarti tidak satupun kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang mampu membayar gaji pegawai bila hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap

Pengeluaran Total Daerah (PTD) kabupaten dan kota di Jawa Timur berkisar antara 10,86% sampai dengan 59,96%. Kemudian kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditamba dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Pengeluaran Rutin Daerah (PRD) kabupaten dan kota di Jawa Timur berkisar antara 11,59% sampai dengan 67,39%.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa, baik dilihat dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah tidak ada satupun kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah mampu mandiri untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini disebabkan masih rendahnya Pendapatan Asli Daeah (PAD), meskipun sudah ditambah dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

2.2.5 Bahl (1978) dan Prest (1978)

Dalam penelitiannya menganalisis kapasitas pajak dan usaha pajak, ia mengungkapkan bahwa determinan yang mempengaruhi kapasitas pajak antara lain pendapatan per kapita serta sektor-sektor ekonomi seperti sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan. Hasil analisisnya antar negara menunjukkan bahwa determinan dari sektor pertanian dan pertambangan adalah signifikan. Sedangkan studi yang berkaitan dengan alternatif kategori (karakteristik) yang menempatkan suatu negara ke dalam kategori kemampuan kapasitas pajak dan usaha pajak, dilakukan Prest (1978:20-21). Hasil analisis menempatkan, Brasil kedalam kategori kapasitas pajak tertinggi; sedangkan, Sudan ke dalam kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak tinggi. Kemudian Trinidad dengan kategori kapasitas pajak tinggi

dan usaha pajak rendah, dan Pakistan memiliki kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak juga tinggi.

2.2.6 Tri Wibowo (2004)

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fiskal daerah sebelum dan pada era desentralisasi fiskal. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui struktur pendapatan daerah dengan melihat perbedaan antara periode sebelum dan pada era desentralisasi fiskal.
2. Mengetahui perbedaan perencanaan daerah periode sebelum dan pada era desentralisasi fiskal
3. Mengetahui struktur pengeluaran daerah dengan melihat perbedaan antara periode sebelum dan pada era desentralisasi fiskal.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja rutin dan pembangunan antara sebelum otonomi dan era otonomi kabupaten/kota di Jawa, sebesar 75 persen dialokasikan untuk belanja rutin, dan sisanya 25 persen untuk belanja pembangunan. Sedangkan kabupaten/kota di luar Jawa, sebesar 66 persen dari total belanja digunakan untuk belanja rutin, sedangkan sisanya untuk belanja pembangunan.

Kemandirian fiskal daerah yang dilihat dari PAD terhadap belanja rutin pada erah otonomi secara keseluruhan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan sebelum otonomi. Rata-rata ratio PAD terhadap belanja rutin kabupaten/kota di Jawa sebesar 18,6 persen sebelum otonomi, pada era otonomi turun menjadi 12,7 persen

atau mengalami penurunan sebesar 5,9 persen. Untuk kabupaten/kota di luar Jawa rata-rata ratio PAD terhadap belanja rutin sebelum otonomi sebesar 12,5 persen, pada era otonomi menjadi 10,1 persen, atau mengalami penurunan 2,4 persen.

2.2.7 Makmum (2004)

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum rata-rata perkembangan PDRB kabupaten dan kota sebelum desentralisasi fiskal (1993-1999) tumbuh sebesar 30,36%. Sedangkan pada periode desentralisasi fiskal (2001-2002) rata-rata pertumbuhan PDRB turun 21,29%.

Jika dibedakan antara kabupaten dan kota di Jawa dan luar Jawa nampak bahwa sektor penyumbang terhadap PDRB di kabupaten dan kota di Jawa yaitu industri pengolahan (32,93%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,56%) dan sektor pertanian (13,36%). Sedangkan untuk kabupaten dan kota di luar Jawa, terdapat empat sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB, yaitu: sektor pertambangan dan penggalian (18,42%), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (14,61%).

2.2.8 Aloysius Gunadi Brata (2004)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi komposisi penerimaan daerah (Pemda Tingkat I) terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun komposisi penerimaan publik meliputi: Bagian Sisa Anggaran Tahun Lalu, Bagian Pendapatan

Asli Daerah, Bagian Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Sumbangan dan Bantuan, Bagian Penerimaan Pembangunan. Periode data yang digunakan adalah dari tahun 1995 sampai 1998. Dengan menggabungkan (*pooling*) data dari 26 provinsi selama empat tahun tersebut maka diperoleh 104 observasi.

Berdasarkan data, dari 26 provinsi hanya beberapa provinsi saja yang memiliki komponen bagian penerimaan pembangunan yang cukup berarti, yaitu DI Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Di provinsi ini pun bagian penerimaan pembangunan relatif kecil andilnya bila dibandingkan dengan bagian penerimaan lainnya. Oleh karena itu komponen penerimaan pembangunan tidak dimasukan dalam estimasi model.

Adapun hasil estimasi ditemukan bahwa tidak seluruh komponen penerimaan Pemda Tingkat I memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang dilihat dari PDRB per kapita. Selain itu terdapat pula indikasi bahwa komponen penerimaan pemerintah daerah tersebut mimiliki hubungan yang kuat dengan PDRB non-migas daripada PDRB migas.

2.2.9 Eni Rochaida (2005)

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kesejahteraan sosial ekonomi ditentukan oleh dimensi (indikator) angka baca tulis sebesar 0,928, kemudian diikuti oleh angka harapan hidup sebesar (0,583) dan pendapatan per kapita sebesar (0,001). Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka angka melek huruf menempati posisi terdepan sebagai penentu utama dari variabel kesejahteraan sosial ekonomi daerah. Angka baca tulis merupakan indikator dampak dibidang pendidikan.

Dikatakan indikator dampak karena angkanya mencerminkan dari suatu intervensi masyarakat. Intervensi yang dilakukan masyarakat dapat berupa penyediaan sarana sekolah atau tenaga pengajar. Selain itu juga peningkatan partisipasi pendidikan usia sekolah.

Berdasarkan dimensi harapan hidup yang merupakan urutan kedua sebagai penentu kesejahteraan sosial ekonomi juga merupakan indikator dampak dari perbaikan tingkat kesehatan. Artinya semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi tingkat kesehatan di daerah tersebut.

Sementara untuk pendapatan per kapita merupakan dimensi pengukur terkecil dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil temuan ini mempunyai makna bahwa pendapatan per kapita bukan penentu utama keberhasilan peningkatan kesehatan sosial ekonomi. Ini disebabkan karena pengukuran pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan sosial masyarakat mempunyai kelemahan tersendiri, tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena sebagian besar penduduk menerima pendapatan riil jauh di bawah pendapatan per kapita yang ada.

2.2.10 Aloysius Gunandi Brata (2005)

Studi tentang investasi sektor publik lokal, pembangunan manusia, dan kemiskinan. Studi ini memiliki dua tujuan yang saling berkaitan. Pertama adalah untuk melakukan pembuktian empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat pembangunan manusia dalam konteks regional (antar-provinsi) di Indonesia.Tujuan berikutnya

adalah memperoleh bukti empiris hubungan antara tingkat pembangunan manusia dan kemiskinan.

Sesuai dengan tujuan studi ini, maka dari hasil analisis telah menunjukkan bahwa variabel pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia (IPM). Semakin besar alokasi pengeluaran pembangunan untuk pendidikan dan kesehatan makin baik pula IPM yang dicapai. Pengeluaran sosial bukan hanya memberikan manfaat bagi pembangunan manusia, tetapi juga pada pengurangan tingkat kemiskinan. Namun demikian, pengaruh dari sumber daya manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan tampak lebih besar daripada pengaruh pengeluaran sosial. Hal ini dapat sekaligus menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran sosial yang memadai dalam pengeluaran pembangunan memberikan manfaat yang makin baik bagi pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas manusia.

Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tersebut terdapat beberapa persamaan, utamanya menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi daerah, derajat otonomi fiskal daerah, penyerapan tenaga kerja per sektor ekonomi, serta kesejahteraan sosial masyarakat.

2.2.11 Stephen M. Miller and Frank S. Russek (1997)

Melakukan penelitian dengan menguji hubungan antara struktur fiskal dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di Amerika Serikat. Dikemukakan bahwa permasalahan anggaran yang dihadapi disebabkan oleh peningkatan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Jika pajak tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, dan akan berpengaruh negatif jika digunakan untuk pembayaran transfer (*transfer payment*).

2.2.12 Sung Tai Kim (1997)

Penelitian di lakukan di Korea tentang peranan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan pemerintah daerah di dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah sangat nyata. Selanjutnya dikatakan bahwa pajak daerah dan penerimaan lain selain pajak daerah berpengaruh negatif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sementara investasi pemerintah daerah dan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah mempunyai pengaruh nyata dan positif yang lebih besar. Adapun implikasi kebijakan yang penting adalah pemerintah daerah terus mendorong peningkatan investasi di daerah, otonomi daerah terus dilanjutkan, dan pemerintah pusat seharusnya mentrasfer sumber penerimaan yang besar kepada pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu jelas ada perbedaan serta ada pula kesamaannya dengan penelitian ini. Perbedaan yang utama adalah pada teknik analisis yang digunakan. Pada penelitian terdahulu dapat menggunakan teknik analisis regresi, deskriminan dan korelasi. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan model analisis path (*path analysis*) seperti penelitian Rochaida. Namun dalam pendekatan analisis berbeda. Rochaida dalam hal variabel laten eksogen maupun variabel laten endegon menggunakan indikator. Seperti pada konstruk variabel laten endogen penyerapan tenaga kerja menggunakan

indikator penyerapan tenaga kerja sektor primer, sekunder dan tersier. Sedangkan dalam penelitian ini semua variabel laten eksogen maupun indogen tidak menggunakan variabel indikator, karena variabel-variabel tersebut sudah terukur.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian pada latar belakang, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian terdahulu disusunlah kerangka konseptual. Langkah awal sebelum menyusun kerangka konseptual, terlebih dahulu disusun kerangka proses berpikir yang digunakan dalam studi ini seperti pada Gambar 3.1.

Kerangka proses berpikir dalam studi ini dimulai dari studi teoritik yaitu mengkaji teori yang relevan dengan kajian studi ini yaitu teori tentang pembangunan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, otonomi daerah, teori ketenagakerjaan dan teori kesejahteraan. Kajian teori tersebut menuntun untuk berpikir secara deduktif yaitu suatu proses berpikir dari umum ke khusus. Penyusunan naskah disertasi selain didasarkan pada kajian yang bersumber dari teori, juga dari kajian empirik yang bersumber dari hasil penelitian maupun disertasi yang relevan dengan kajian studi ini seperti yang tercantum dalam Gambar 3.1. Studi empirik menuntun untuk berpikir induktif yaitu suatu proses berpikir dari khusus ke umum.

Proses berpikir dalam menyusun disertasi tidak hanya didasarkan atas pemikiran deduktif atau induktif saja tetapi kombinasi proses berpikir deduktif dan induktif karena keduanya saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Hasil sintesa dari proses berpikir deduktif dan induktif menuntun untuk merumuskan

hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan uji statistik.

Pengujian hipotesis akan menghasilkan temuan-temuan baik yang berhubungan dengan teori maupun kenyataan empirik. Hasil pengujian empirik menjadi dasar penyusunan naskah disertasi yang akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan menambah jumlah karya ilmiah. Disamping itu, disertasi ini memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan pembangunan ekonomi di daerah. Berdasarkan kerangka proses berpikir tersebut, maka disusun kerangka konseptual seperti pada Gambar 3.2.

Kerangka konseptual disusun untuk menjelaskan variabel-variabel mana yang berkedudukan sebagai variabel eksogen, variabel intervening, dan variabel endogen. Dengan preposisi yang didasarkan pada studi teoritik dan empirik akan diketahui berapa banyak hipotesis dan bagaimana hubungan pengaruh antar variabelnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan langsung antara variabel dalam studi ini seperti digambarkan pada Gambar 3.2 halaman 104.

Kerangka konseptual yang disusun menggambarkan pengaruh langsung antara variabel pertumbuhan ekonomi (X) terhadap derajat otonomi daerah (Y1), penyerapan tenaga kerja (Y2) dan kesejahteraan masyarakat (Y3), pengaruh langsung variabel derajat otonomi daerah (Y1) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y2) dan kesejahteraan masyarakat (Y3) serta pengaruh langsung penyerapan tenaga kerja (Y2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y3).

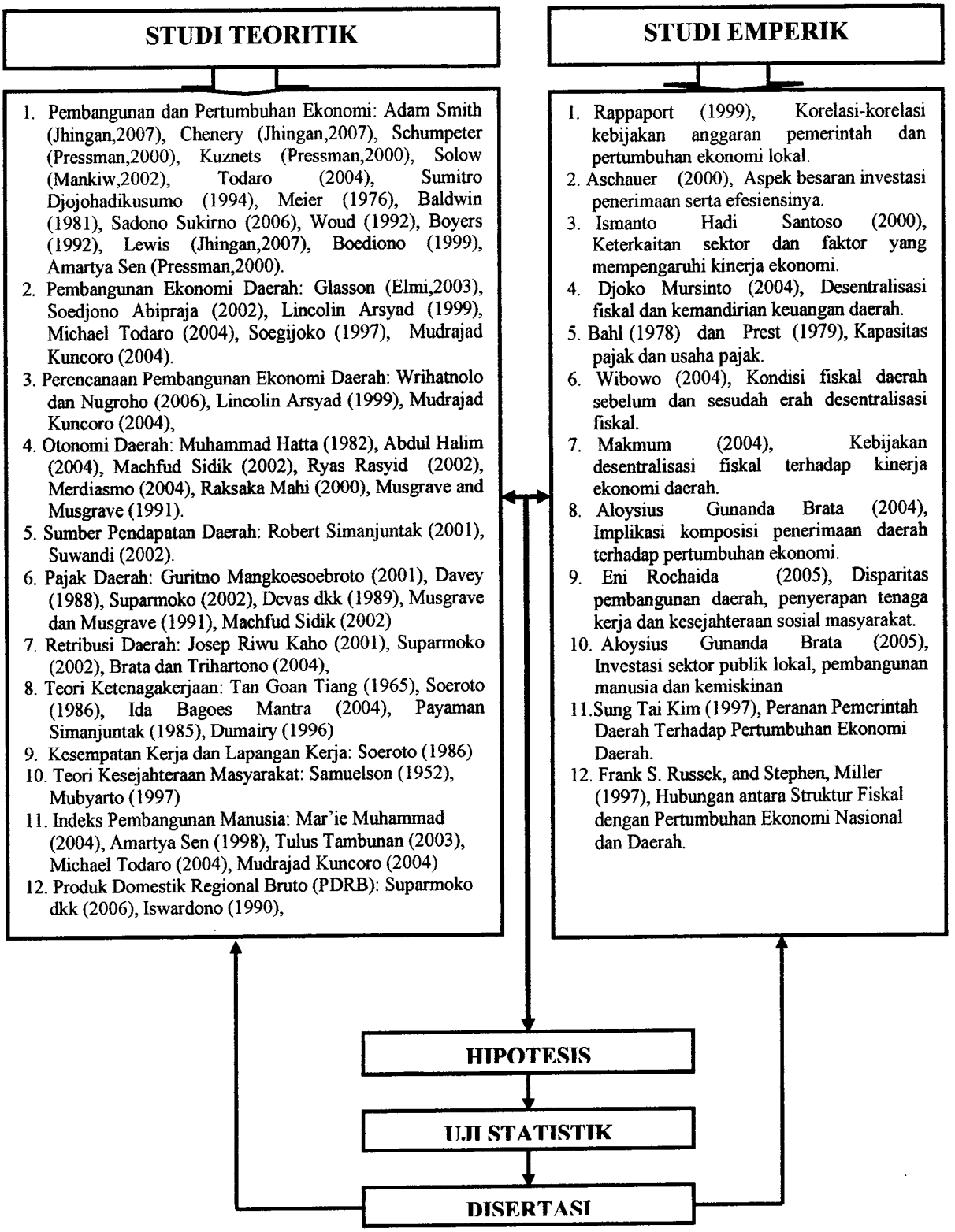

Gambar 3.1. KERANGKA PROSES BERPIKIR

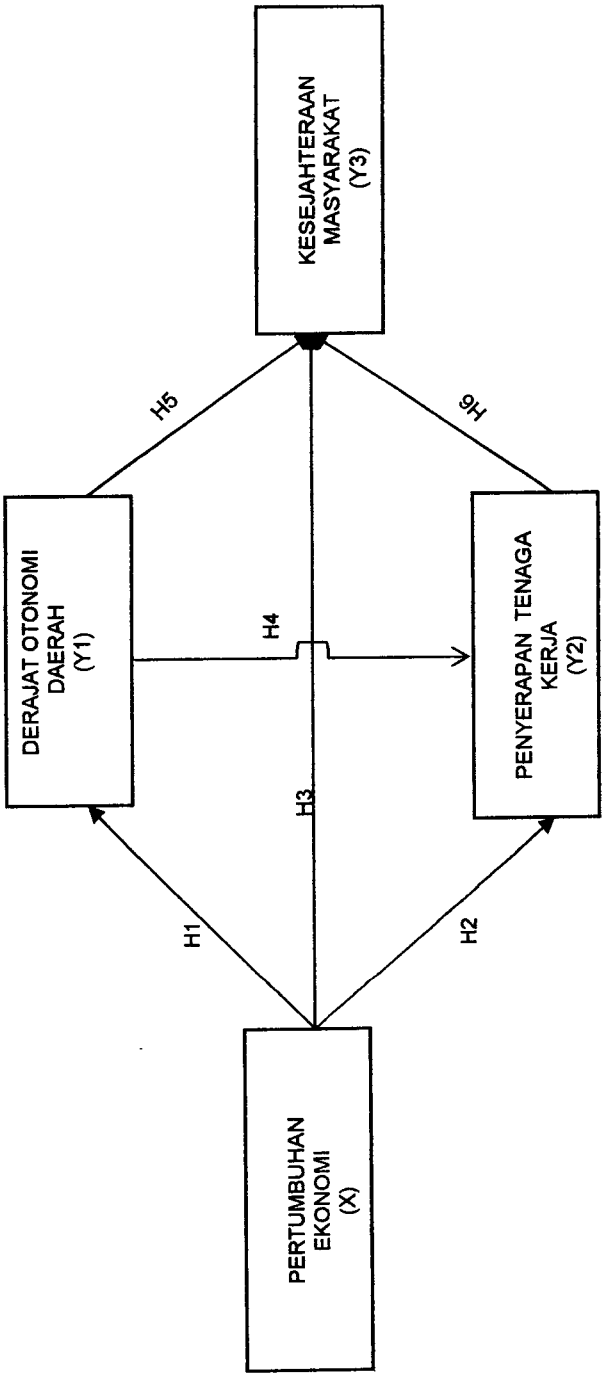

Gambar 3.2
KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 3.2 menjelaskan keterkaitan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi daerah, penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi daerah terjadi karena derajat otonomi daerah yang diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, merupakan jenis penerimaan yang berhubungan langsung dengan peranan masyarakat, dengan demikian jenis penerimaan ini akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Di mana kegiatan ekonomi masyarakat dapat dicerminkan oleh besar kecilnya jumlah Produk Domestik Regional Produk (PDRB).

Kemudian pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini terjadi karena secara makro laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat juga dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Indikator elastisitas ini sering digunakan untuk menganalisis sifat suatu usaha apakah padat modal atau padat karya.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari berbagai kegiatan ekonomi masyarakat seperti produksi, konsumsi, investasi dan perdagangan dalam dan luar negeri, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karena itu pembangunan merupakan upaya terpadu yang menggabungkan beberapa dimensi seperti peningkatan pendapatan per kapita,

peningkatan tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan sebagainya. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang damai, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Derajat otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk mendorong dunia usaha dalam pengembangan ekonomi daerah. Kemudian dengan kebijakan otonomi yang luas peluang bagi daerah menjadi sangat luas. Yang paling utama bagi daerah adalah menciptakan lapangan kerja. Ukuran yang paling fondamental bagi keberhasilan sebuah pemerintah adalah seberapa besar pemerintah daerah tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Derajat otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena pelaksanaan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, baik sumber daya aparatur maupun keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Sehingga adanya desentralisasi dan otonomi daerah tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas aparatur dan organisasi daerah untuk mengemban fungsi dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja yang luas dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Oleh karena upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Lapangan kerja akan memberi penghasilan, dan dengan penghasilan itu setiap orang beserta keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar seperti; pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang kesemuanya itu tentunya akan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

3.2 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap derajat otonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
4. Derajat otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
5. Derajat otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku.
6. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 4
METODE PENELITIAN

BAB 4
METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Kerlinger (2000:157) mengemukakan bahwa rancangan penelitian merupakan keseluruhan proses yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian tersebut maka rancangan penelitian meliputi tahapan penentuan alat (instrumen) pengumpulan data yang digunakan, cara pengumpulan, pengaturan dan analisis data yang digunakan, sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.

Suryabrata (1995:72) mengemukakan bahwa keputusan mengenai rancangan apa yang akan dipakai tergantung pada tujuan penelitian, sifat masalah dan berbagai alternatif yang mungkin digunakan. Sifat masalah akan memainkan peranan utama dalam menentukan rancangan penelitiannya. Berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya itu, berbagai macam rancangan penelitian dapat dibedakan atas:

1. Penelitian historis
2. Penelitian deskriptif
3. Penelitian perkembangan
4. Penelitian kasus dan penelitian lapangan
5. Penelitian korelasional
6. Penelitian kausal komparatif
7. Penelitian eksperimental
8. Penelitian tindakan

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel atau yang disebut penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yaitu penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antara variabel yang ada dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian perkembangan, karena memberikan penjelasan tentang perkembangan mengenai variabel-variabel yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku.

Penelitian ini menggunakan data sekunder (*time series*) dan data *cross section* atau *pooled* data. Data *time series* akan menggambarkan data perkembangan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan derajat otonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat, sedangkan data *croos section* menunjukkan jumlah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

4.2 Populasi dan Sampel

Emory (1996:214) menyatakan bahwa ide dasar dari pengambilan sampel (*sampling*) adalah dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, kesimpulan tentang karakteristik populasi yang dapat diperoleh. Kemudian dijelaskan pula bahwa sebuah elemen adalah subyek di mana pengukuran tersebut dilakukan, yang disebut dengan unit penelitian (*the unit of study*). Keunggulan ekonomis pengambilan sampel dibandingkan sensus sangatlah besar, terutama pertimbangan biaya. Keunggulan pengambilan sampel dibandingkan dengan sensus berkurang,

apabila populasinya kecil, sedangkan variabilitasnya tinggi. Dua kondisi yang sesuai dengan studi sensus yaitu:

1. Bila populasinya kecil
2. Bila masing-masing elemen agak berbeda satu sama lain.

Dari kenyataan tersebut, maka penelitian ini menggunakan sensus. Dengan pertimbangan bahwa sampai pada penelitian ini dilakukan terdapat 8 kabupaten dan kota se Provinsi Maluku, yang terdiri dari Provinsi Maluku terdapat 5 Kabupaten/Kota yaitu (Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru dan Kota Ambon) sementara Provinsi Maluku Utara terdapat 3 Kabupaten/kota yaitu (Maluku Utara, Halmahera Tengah dan Kota Ternate)

Penelitian ini hanya untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi, derajat otonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat, sehingga 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai obyek penelitian, dengan pertimbangan dimungkinkan tersedianya data yang akan diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian dengan menggabungkan (*pooling*) data dari 8 (delapan) kabupaten dan kota selama lima tahun tersebut maka diperoleh 40 observasi. Sehingga dengan menggunakan model analisis jalur sudah memenuhi syarat untuk dioperasionalkan.

4.3 Variabel Penelitian

4.3.1 Klasifikasi Variabel

Istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. Menurut Suryabrata (1995:72) variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek

pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam suatu gejala yang akan diteliti.

Sarmanu (2006:6) variabel adalah suatu konsep yang bisa diukur dan hasil pengukurannya bervariasi. Apa yang menjadi variabel dalam penelitian tersebut perlu ditentukan dan selanjutnya diklasifikasi.

Dari pandangan tersebut maka dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel eksogen atau independent variable (X).
2. Derajat otonomi daerah sebagai variabel endogen pertama atau intervening variable (Y_1).
3. Penyerapan tenaga kerja sebagai variabel endogen kedua atau intervening variable (Y_2).
4. Kesejahteraan masyarakat sebagai variabel endogen ketiga atau dependen variable (Y_3).

4.3.2 Definisi Operasional Variabel

Setelah variabel diidentifikasi dan diklasifikasikan, maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memberikan pengertian masing-masing variabel sesuai dengan tujuan penelitian. Definisi operasional adalah pengertian secara operasional dari variabel bebas maupun tidak bebas yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan dalam analisis dan pembahasan hasil penelitian.

1. Pertumbuhan ekonomi (X) adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten dan kota se Provinsi Maluku setiap tahun selama kurun waktu penelitian yaitu tahun dari 2001 sampai 2005 yang dinyatakan dengan satuan persentase atas dasar harga konstan tahun 2000.

   Cara perhitungan atas dasar harga konstan ini telah menghilangkan pengaruh harga atau inflasi, sehingga dikatakan menunjukkan nilai real (nyata).

   Pertumbuhan dalam persentase dapat dihitung dengan cara sederhana sebagai berikut:

   $\Delta PDRB(t) = [PDRB(t) - PDRB(t\text{-}1)/PDRB(t\text{-}1)] \times 100\%$

   di mana PDRB(t) = pertumbuhan ekonomi tahunan (t) selama kurun waktu penelitian yaitu dari tahun 2001 sampai 2005, t-1 = tahun sebelumnya.

   PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah (Kabupaten/Kota) dalam kurun waktu satu tahun. Nilai PDRB tersebut sama dengan nilai tambah yang diciptakan oleh setiap sektor ekonomi yang terdiri dari:

   1. Sektor primer meliputi; sektor pertanian, pertambangan dan galian
   2. Sektor sekunder meliputi; sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan
   3. Sektor tersier meliputi; sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

2. Derajat otonomi daerah (Y_1) adalah kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana salah satu dapat diukur melalui kinerja keuangannya. Menurut Tim LPEM-FEUI (Halim:2004:26) diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini derajat otonomi daerah dapat dilihat dari sisi pengeluaran yaitu ratio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengeluaran Total Daerah (PTD) selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 pada daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku, besaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Total Daerah (PTD) dinyatakan dengan satuan persentase.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lainnya. **Pajak daerah** adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua obyek pajak seperti orang/badan, benda bergerak/tak bergerak dengan satuan rupiah.

Retribusi daerah, adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu dengan satuan rupiah.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lainnya, adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank pembangunan daerah, bagian laba bersih perusahaan daerah lainnya dan penyertaan modal daerah kepada perusahaan. Serta pendapatan daerah lainnya yang sah dengan satuan rupiah.

Pengeluaran Total Daerah (PTD) yang sebelumnya meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Namun, setelah tahun 2003 pengeluaran daerah (belanja daerah) dirubah menjadi pengeluaran aparatur daerah dan pengeluaran pelayanan publik. **Pengeluaran aparatur daerah** meliputi: belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat yang dinyatakan dengan satuan rupiah.

Pengeluaran pelayanan publik meliputi: belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat yang dinyatakan dengan satuan rupiah.

4. Penyerapan tenaga kerja (Y_2) adalah laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja setiap tahun pada kabupaten dan kota selama kurun waktu penelitian yaitu dari tahun 2001 sampai 2005 yang dinyatakan dengan satuan persentase.

Laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dapat dihitung dengan cara sederhana sebagai berikut:

$$\Delta PTK(t) = [PTK(t) - PTK(t-1)/PTK(t-1)] \times 100\%$$

di mana PTK(t) = pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tahunan (t) selama kurun waktu penelitian yaitu dari tahun 2001 sampai 2005, t-1 = tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang mengacu kepada *International Standard of Industry Classification* (*ISIC*) bidang ekonomi dibagi menjadi 9 sektor lapangan usaha. Namun, dalam penelitian ini dari 9 sektor usaha tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tiga sektor yaitu:

1. Sektor primer meliputi; sektor pertanian, pertambangan dan galian.
2. Sektor sekunder meliputi; sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan.
3. Sektor tersier meliputi; sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

4. Kesejahteraan masyarakat (Y_3) adalah keadaan tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat yang meliputi: pendapatan per kapita, pendidikan dan kesehatan.

Pendapatan per kapita merupakan proporsi PDRB dengan jumlah penduduk setiap kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu penelitian yaitu dari tahun 2001 sampai 2005, dengan menggunakan satuan ukuran rupiah.

Pendidikan diukur dengan angka melek huruf yaitu rata-rata jumlah penduduk kabupaten dan kota se Provinsi Maluku yang berumur 10 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis selama kurun waktu penelitian yaitu dari tahun 2001 sampai 2005, dengan menggunakan ukuran persentase.

Kesehatan (angka harapan hidup) yaitu rata-rata perkiraan lama hidup yang dapat dicapai oleh penduduk kabupaten dan kota se Provinsi Maluku yang lahir pada tahun yang sama, dengan menggunakan satuan ukuran tahunan.

Penggunaan ke tiga komponen tersebut mengacu pada konsep Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index/HDI*) yang diperkenalkan oleh UNDP.

HDI dapat dihitung dengan formulasi berikut ini :

$HDI = 1/3 [X_1 + X_2 + X_3]$

Di mana :

X 1 adalah indeks harapan hidup kelahiran

X 2 adalah indeks pendidikan

X 3 adalah indeks standar hidup layak (pendapatan per kapita)

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 6 Kabupaten dan 2 Kota se Provinsi Maluku yang meliputi: Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Maluku Utara dan Halmahera Tengah serta 2 kota yaitu kota Ambon dan kota Ternate. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Kemudian dengan menggabungkan (*pooling*)

data dari 8 kabupaten dan kota selama lima tahun tersebut akan diperoleh 40 observasi. Sehingga dengan menggunakan model analisis jalur sudah memenuhi syarat untuk dioperasionalkan.

4.5 Prosedur Pengambilan Data

Data yang akan dikumpulkan disesuaikan dengan pendekatan analisis yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Periode pengukurannya digunakan data runtut waktu (*time series*) selama 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, penggunaan periode ini karena dimungkinkan tersedianya data yang akan diperlukan dalam penelitian. Sumber data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat sekunder dengan dilengkapi informasi lain dari pimpinan instansi, lembaga, badan, dinas atau unit terkait yang diharapkan akurat.

Data sekunder bersumber dari publikasi dan dokumentasi tertulis dari instansi, lembaga, badan, dinas atau unit yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah. Antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) se Provinsi Maluku, dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Maluku dan, Biro Keuangan Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku, Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara penelitian dokumenter. Dari sumber tersebut kemudian dilengkapi dengan informasi lain sebagai bahan perbandingan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4.6 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis ini dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari pengaruh (efek) secara langsung maupun tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis ini merupakan salah satu pilihan dalam rangka mempelajari ketergantungan sejumlah variabel di dalam model. Analisis jalur juga digunakan untuk menelaah hubungan antara model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu. Hubungan kausal selain didasarkan pada data, juga didasarkan pada pengetahuan, perumusan hipotesis dan analisis logis, sehingga dapat dikatakan analisis jalur dapat digunakan untuk menguji seperangkat hipotesis kausal serta untuk menafsirkan hubungan tersebut.

Adapun langkah-langkah untuk pengujian model dalam analisis jalur (Solimun, 2002:48-55) sebagai berikut :

1. Mengembangkan model berdasarkan konsep dan teori
2. Pemeriksaan terhadap asumsi analisis jalur
3. Pendugaan parameter atau perhitungan analisis jalur
4. Pemeriksaan validitas model
5. Interpretasi hasil analisis

4.6.1 Merancang model berdasarkan konsep dan teori

Pengembangan model dalam penelitian ini seperti telah diungkapkan dalam kerangka konseptual yaitu untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hubungan antara variabel dalam kajian empirik dan teori dapat dibuat model diagram jalur sebagai berikut:

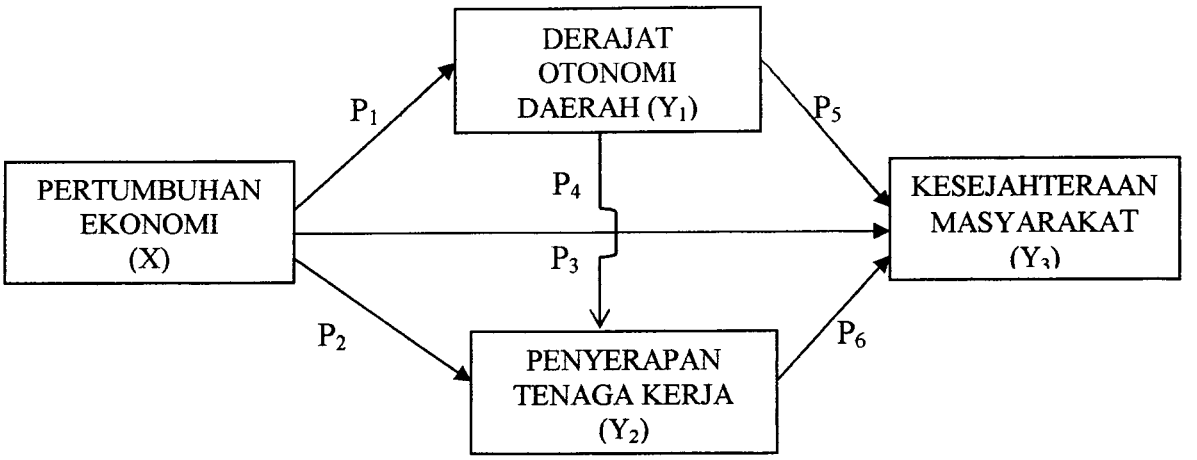

Gambar 4.1 : Hubungan Antara Variabel Penelitian.

Model diagram jalur (*path*) tersebut juga dapat dinyatakan dengan persamaan, sehingga membentuk sistem persamaan. Sistem persamaan tersebut dinamakan sistem persamaan simultan, atau juga sering disebut model struktural.

1. $Y_1 = P_1X + \varepsilon_1$
2. $Y_2 = P_2X + P_4Y_1 + \varepsilon_2$
3. $Y_3 = P_3X + P_5Y_1 + P_6Y_2 + \varepsilon_3$

Keterangan:

Y_1 adalah derajat otonomi daerah

Y_2 adalah penyerapan Tenaga Kerja

Y_3 adalah kesejahteraan Masyarakat

X adalah pertumbuhan ekonomi

P_1 s/d P_6 adalah koefisien jalur

e_1 s/d e_3 adalah eror

4.6.2 Pemeriksaan terhadap asumsi analisis jalur

Langkah kedua dari analisis jalur adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. Asumsi yang melandasi analisis jalur adalah :

1. Di dalam model analisis jalur, hubungan antara variabel di dalam model adalah linier, artinya perubahan yang terjadi pada variabel adalah merupakan fungsi perubahan linier dari variabel lainnya yang bersifat kausal.
2. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran causal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung causal resiprokal tidak dapat dilakukan analisis jalur.
3. Variabel yang diukur berskala interval atau ratio.
4. Observed variabel diukur tanpa keselahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel)
5. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar-benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.

4.6.3 Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur

Langkah ketiga di dalam analisis jalur adalah pendugaan parameter dan perhitungan koefisien jalur. Perhitungan koefisien pada analisis jalur bisa dibantu dengan komputer dengan perangkat lunak statistik SPSS atau yang lainnya dengan analisis regresi (standardize). Perhitungan koefisien tersebut merupakan koefisien *Path* (pengaruh langsung). Di dalam analisis jalur, di samping ada pengaruh langsung juga terdapat pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Dalam penelitian ini pengaruh langsung dan tidak langsung dan pengaruh total adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (X) ke derajat otonomi daerah (Y_1) = P_1, pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (X) ke penyerapan tenaga kerja (Y_2) = P_2, pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (X) ke kesejahteraan masyarakat (Y_3) = P_3, pengaruh langsung derajat otonomi daerah (Y_1) ke penyerapan tenaga kerja (Y_2) = P_4, pengaruh langsung derajat otonomi daerah (Y_1) ke kesejahteraan masyarakat (Y_3) = P_5, dan pengaruh langsung penyerapan tenaga kerja (Y_2) ke kesejahteraan masyarakat (Y_3) = P_6.
2. Pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi (X) ke penyerapan tenaga kerja (Y_2) melalui (Y_1) = $P_1 \times P_4$, pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi (X) ke kesejahteraan masyarakat (Y_3) melalui derajat otonomi daerah (Y1) = $P_1 \times P_5$, pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi (X) ke kesejahteraan masyarakat (Y_3) melalui penyerapan tenaga kerja (Y_2) = $P_2 \times P_6$, pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi (X) ke kesejahteraan masyarakat (Y_3) melalui derajat otonomi daerah (Y_1) dan penyerapan Tenaga kerja (Y_2) = $P_1 \times P_4 \times P_6$ dan pengaruh tidak langsung pertumbuhah ekonomi (X) ke kesejahteraan masyarakat (Y_3) melalui penyerapan tenaga kerja (Y_2) = $P_4 \times P_6$.
3. Pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan seluruh pengaruh tidak langsung.

4.6.4 Pemeriksaan Validitas Model

Langkah keempat di dalam analisis jalur adalah pemeriksaan validitas model yaitu dengan cara melihat asumsi-asumsi (seperti yang disebutkan sebelumnya) untuk

analisis jalur harus sudah terpenuhi. Di samping itu uji validitas lain adalah uji koefisien jalur sama dengan uji regresi yaitu melihat tingkat signifikansi dari uji t.

4.6.5 Interpretasi Hasil Analisis

Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah melakukan interpretasi hasil analisis. Berdasarkan analisis jalur, maka interpretasi yang dilakukan, yaitu :

1. Penjelasan terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti.
2. Menentukan variabel bebas apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tergantung. Selain itu juga untuk menelusuri mekanisme jalur-jalur variabel bebas tehadap variabel tergantung secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pengujian model, yaitu membandingkan pada konsep teori dan konsep empirik maka akan dapat diketahui apakah hasil penelitian bisa mendukung konsep yang sudah ada dan bahkan diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan konsep baru.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 5
ANALISIS HASIL STUDI

BAB 5
ANALISIS HASIL STUDI

5.1 Deskripsi Daerah Penelitian

Maluku merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia merdeka, dikenal dengan kawasan seribu pulau serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Secara historis kepulauan Maluku terdiri dari kerajaan-kerajaan Islam yang menguasai pulau-pulau tersebut. Oleh karena itu, diberi nama Maluku yang berasal dari kata Al-Mulk yang berarti Tanah Raja-Raja. Daerah ini dinyatakan sebagai provinsi bersama tujuh daerah lainnya yaitu; Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera. Hanya dua hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun secara resmi pembentukan Maluku sebagai provinsi daerah tingkat I RI baru terjadi 12 tahun kemudian, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 tahun 1957 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1958.

Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Maluku memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia secara keseluruhan. Provinsi Maluku yang kaya dengan rempah-rempah ini sudah dikenal di dunia internasional sejak dahulu kala. Pada awal abad ke-7 pelaut-pelaut dari daratan Cina, khususnya pada zaman Dinasti Tang, kerap mengunjungi Maluku untuk mencari rempah-rempah. Namun, mereka sengaja merahasiakannya untuk mencegah datangnya bangsa-bangsa lain ke daerah ini. Pada abad ke-9 pedagang

Arab berhasil menemukan Maluku setelah mengarungi Samudra Hindia. Abad ke-14 adalah merupakan masa perdagangan rempah-rempah Timur Tengah yang membawa agama Islam masuk ke daerah tersebut melalui pelabuhan-pelabuhan Aceh, Malaka, dan Gresik antara tahun 1300 sampai tahun 1400. Pada abad ke-12 wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi Maluku. Pada awal abad ke-14 Kerajaan Majapahit menguasai seluruh wilayah laut Asia Tenggara. Pada waktu itu para pedagang dari Jawa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dimasa Dinasti Ming (1368 dan 1643) rempah-rempah dari Maluku diperkenalkan dalam berbagai karya seni dan sejarah. Dalam sebuah lukisan karya W.P. Groeneveldt yang berjudul Gunung Dupa, Maluku digambarkan sebagai wilayah bergunung-gunung yang hijau dan dipenuhi pohon cengkih.

Maluku bagian utara, sebelum berdiri sebagai provinsi tersendiri merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Provinsi Maluku Utara sendiri baru berdiri sejak terbitnya Undang-undang Nomor 46 tahun 1999. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Provinsi Maluku Utara secara admistrasi terbagi atas dua wilayah kabupaten yaitu kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan satu kota yaitu kota Ternate. Sementara Provinsi Maluku sendiri telah memiliki empat wilayah kabupaten yaitu kabupaten Maluku Tenggara Barat, kabupaten Maluku Tenggara, Pulau Buru, kabupaten Maluku Tengah dan satu kota yaitu kota Ambon.

Wilayah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku merupakan wilayah perairan yang luas dengan gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya mencapai sekitar 985 pulau. Gugusan kepulauan tersebut terdiri dari pulau-pulau vulkanis atau

pulau-pulau karang yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Pulau-pulau ini merupakan bagian dari rangkaian gunung berapi yang menjangkau sampai ke Sulawesi. Oleh sebab itu pulau-pulau yang penting itu sesunggunya adalah puncak-puncak dari gunung berapi. Dengan kondisi topografi yang demikian, menyebabkan hanya sebagian kecil saja dari wilayah ini yang memiliki dataran rendah yang cukup luas sebagaimana yang terdapat di Pulau Sulawesi atau Pulau Jawa.

Penyebaran daratan untuk wilayah Provinsi Maluku Utara terdiri dari pulau besar seperti Halmahera, pulau sedang seperti morotai, Bacan, Obi, Taliabu dan Mangoli serta pulau-pulau kecil seperti Ternate, Tidore, Makian, Kayo dan lain-lain. Sementara penyerbaran daratan untuk wilayah Provinsi Maluku terdiri dari pulau besar seperti pulau Seram disusul pulau Buru, pulau Yamden dan Pulau Wetar. Pada masa lampau pulau-pulau tersebut mempunyai fungsi strategis sebagai pelabuhan-pelabuhan transito, bahkan pernah perjaya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah karena termasuk jaringan perdagangan nusantara dan bahkan mancanegara.

Kabupaten dan kota se Provinsi Maluku telah banyak memiliki sumber daya alam yang potensial baik di darat maupun laut, namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga berpeluang bagi investor untuk menanamkan modalnya diberbagai sektor pengolahan sumber daya alam seperti; pertanian, perkebunan, perternakan, kehutanan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut maka penduduk merupakan salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sebagaimana diketahui bahwa penduduk sebagai sumber daya manusia perlu dikembangkan sesuai dengan peranannya dalam gerak pembangunan terutama di bidang ekonomi agar potensi-potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam perkembangannya peranan penduduk sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, merupakan hal yang sangat mendasar mengingat penduduk adalah subyek pembangunan ekonomi. Namun, kenyataannya penduduk yang seharusnya menjadi sumber daya pendukung pembangunan tersebut sering dijadikan beban berat pembangunan bagi pemerintah maupun pihak lainnya. Karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan tidak didukung dengan kemampuan yang dimiliki (pendidikan dan kesehatan) sehingga telah menempatkan penduduk pada permasalahan tersendiri.

Besarnya jumlah penduduk di kabupaten dan kota se Provinsi Maluku antara lain disebabkan karena tingginya laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten dan kota se Provinsi Maluku pada tahun 1980 sampai 1990 sebesar 2,58 persen, dan pada tahun 1990 sampai 2000 menurun menjadi 0,37 persen, sedangkan untuk tahun 2000 sampai 2005 meningkat menjadi 2,38 persen.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk kabupaten dan kota, maka angka sebesar 2,38 persen relatif tinggi. Tetapi jumlah penduduk yang ada dikaitkan dengan luas wilayah maka tidak menimbulkan masalah karena tingkat kepadatan relatif rendah. Untuk itu kebijakan kependudukan di kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dalam jangka pendek harus lebih ditekankan pada aspek kualitas disamping kuantitas.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

5.2 Deskripsi Variabel

5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat tingkat laju pertumbuhan ekonomi atau dengan melihat tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan penjumlahan hasil kegiatan ekonomi di suatu daerah selama satu tahun. Secara umum kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dalam kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat bervariasi. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Besar kecilnya nilai PDRB sangat ditentukan oleh kontribusi per sektor ekonomi masing-masing daerah. Pada tahun 2001 sebagian kabupaten dan kota telah mengalami laju pertumbuhan yang kecil bahkan kota Ambon sendiri menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif, sementara kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami pertumbuhan relatif cukup tinggi.

Jika diamati secara seksama untuk daerah kabupaten rata-rata pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 tertingi telah ditempati kabupaten Halmahera Tengah yaitu sebesar 3,70 persen. Sementara untuk kota pada periode yang sama yaitu dari tahun 2001 sampai 2005 rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi telah ditempati kota Ternate yaitu sebesar 3,88 persen. Besarnya rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota se Provinsi Maluku tersebut masih di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu sebesar 4,78

persen (BPS,2006). Kecilnya pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota se Provinsi Maluku tersebut lebih disebabkan oleh imbas konflik horisontal yang membawah dampak terhadap kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Lebih jelasnya tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		2001	2002	2003	2004	2005
1	Maluku Tenggara Barat	2,75	3,17	3,44	3,32	3,74
2	Maluku Tenggara	2,52	4,11	4,23	4,05	3,28
3	Maluku Tengah	2,32	2,00	3,30	2,13	4,11
4	Buru	1,69	2,97	2,58	3,10	3,60
5	Maluku Utara	1,58	3,07	2,92	3,33	3,74
6	Halmahera Tengah	1,67	2,16	3,97	5,51	5,18
Kota						
7	Ambon	-2,33	3,33	5,63	5,73	6,22
8	Ternate	1,06	2,80	1,39	7,54	6,60

Sumber: BPS, tahun 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku,diolah.

Kemudian pada Tabel 5.2 halaman 125, telah dijelaskan tentang rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Pada Tabel tersebut tampak bahwa selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 sektor primer masih memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB yaitu sebesar 50,79 persen, kemudian disusul sektor tersier sebesar 43,21 persen dan sektor sekunder sebesar 6 persen. Sektor primer yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB yaitu sektor pertanian utamanya sub sektor perkebunan, kehutanan dan perikanan. Sektor-sektor tersebut telah tumbuh dan berkembang di masyarakat kabupaten se Provinsi Maluku. Sementara untuk kota dalam kurun waktu yang sama yaitu dari tahun 2001 sampai 2005 sektor tersier memberikan sumbangan yang cukup

besar yaitu sebesar 74,13 persen, kemudian disusul sektor primer dan sektor sekunder.

Tabel 5.2.
RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten		Primer	Sekunder	Tersier
1	Maluku Tenggara Barat	53,64	3,07	43,29
2	Maluku Tenggara	49,69	1,98	48,33
3	Maluku Tengah	36,94	14,15	48,91
4	Buru	61,87	6,62	31,51
5	Maluku Utara	41,54	23,72	34,74
6	Halmahera Tengah	61,07	8,97	29,96
Kota				
7	Ambon	21,27	3,67	75,06
8	Ternate	14,72	12,07	73,21

Sumber: BPS, 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota Se Provinsi Maluku, diolah

Sektor lain yang cukup besar memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan tetapi kurang mendapat perhatian adalah sektor sekunder utamanya industri kerajinan dan pengolahan rakyat. Sektor ini merupakan industri berskala kecil yang banyak diusahakan oleh masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku secara tradisional sejak generasi-generasi sebelumnya. Beberapa contoh sektor industri kerajinan dan pengolahan rakyat tersebut seperti; Mebel Kayu, Industri Makanan Tradisional, Industri Kerajinan Anyaman Bambu, Industri Perikanan, Industri Pandai Besi, Industri Bordir Sari, Industri Kerajinan Mutiara, Industri Sagu dan sebagainya.

5.2.2 Derajat Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang dapat digambarkan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah,

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun, demikian harus diakui bahwa derajat otonomi daerah di Indonesia masih rendah. Hal ini tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) maupun Pengeluaran Total Daerah (PTD) dari masing-masing kabupaten dan kota seluruh Indonesia masih rendah. Artinya bahwa PAD dari masing-masing daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia belum mampu membiayai pengeluarannya, karena itu otonomi daerah dan juga pemerintah daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai oleh otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan sebagainya.

Sebagaimana diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satu yang dapat diukur melalui kinerjanya. Dalam studi ini derajat otonomi daerah dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD) pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD) untuk daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 berkisar 0,79 persen sampai dengan 5,42 persen. Ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 hanya mampu memberikan kontribusi terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD) yang paling besar hanya 5,42 persen dan paling terendah hanya 0,79 persen. Lebih jelasnya tentang Total Pengeluaran Daerah (TPD) serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD) kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 halaman 129.

Tabel 5.3.
TOTAL PENGELUARAN PADA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU TAHUN 2000 SAMPAI 2005
(dalam ribuan rupiah)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		2001	2002	2003	2004	2005
1	Maluku Tenggara Barat	144.999.097	145.691.085	192.535.316	221.480.950	237.955.173
2	Maluku Tenggara	121.864.948	192.090.377	205.445.288	217.476.337	291.013.130
3	Maluku Tengah	254.331.916	310.812.437	329.647.373	392.560.424	346.269.190
4	Buru	97.001.587	151.648.282	186.926.342	187.939.054	194.546.431
5	Maluku Utara	251.733.460	289.664.500	312.773.190	339.932.260	465.150.137
6	Halmahera Tengah	143.165.156	230.047.335	244.173.820	254.955.600	303.661.176
Kota						
7	Ambon	163.035.560	190.882.167	228.311.930	229.068.849	233.663.045
8	Ternate	115.920.452	160.196.623	172.251.154	175.904.000	189.664.000

Sumber: BPS, tahun 2005 Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku. diolah

Jika diamati secara seksama Tabel 5.3 tampak bahwa total pengeluaran pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku sangat tergantung pada Penerimaan Total. Kenyataan tersebut dapat dibuktikan dengan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Penerimaan Total Daerah maupun Total Pengeluaran Daerah.

Tabel 5.4.
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TOTAL PENGELUARAN DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		T a h u n				
Kabupaten		2001	2002	2003	2004	2005
1	Maluku Tenggara Barat	1,00	0,79	1,17	1,45	1,65
2	Maluku Tenggara	3,15	3,47	3,67	5,32	4,63
3	Maluku Tengah	2,23	2,85	2,41	1,90	2,28
4	Buru	1,14	2,33	1,82	3,67	3,96
5	Maluku Utara	2,02	3,14	3,04	3,06	3,34
6	Halmahera Tengah	1,36	2,85	2,86	2,96	1,39
Kota						
7	Ambon	2,20	3,56	3,75	3,47	3,90
8	Ternate	3,28	4,14	3,54	4,90	5,42

Sumber: BPS, tahun 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku,diolah.

Kemudian berdasarkan pada Tabel 5.4 tampak bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD) pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku sangat bervariasi dan tidak menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD) kabupaten dan kota se Provinsi Maluku antara lain:

1. Pada umumnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku belum bekerja secara optimal. Inefisiensi BUMD ini tercermin pada kecilnya laba bersih yang dihasilkan, bahkan ada BUMD yang tidak meraih untung sama sekali.

2. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat (pendapatan per kapita masyarakat masih rendah).
3. Kurangnya kemampuan pemerintah daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, karena kurang tersedianya infrastruktur. Misalnya, banyak obyek wisata yang belum tersentuh sama sekali karena keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai.

Kemudian akan dijelaskan pula tentang kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) serta dana perimbangan terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD). Pada Tabel 5.5 tampak bahwa kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 hanya berkisar antara 1 persen sampai dengan 16 persen. Artinya bahwa daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku hanya mampu memberikan kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD) tertinggi hanya mencapai 16 persen dan terendah 1 persen.

Tabel 5.5.
KONTRIBUSI BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK TERHADAP TOTAL PENGELUARAN DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		2001	2002	2003	2004	2005
1	Maluku Tenggara Barat	5,77	5,74	4,75	8,76	5,61
2	Maluku Tenggara	4,69	5,47	6,11	9,15	9,20
3	Maluku Tengah	4,68	5,21	5,68	10,10	10,13
4	Buru	7,96	8,24	6,03	12,32	9,17
5	Maluku Utara	6,14	8,40	7,25	9,12	10,35
6	Halmahera Tengah	16,21	14,88	11,69	9,88	12,45
Kota						
7	Ambon	1,07	2,88	3,85	4,16	4,81
8	Ternate	2,74	4,08	3,54	5,40	5,42

Sumber: BPS, tahun 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku,diolah.

Bahkan bila digabungkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) kontribusinya terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD) masih relatif rendah persentasinya, baik untuk kabupaten maupun kota se Provinsi Maluku. Berdasarkan kenyataan tersebut jelaslah bahwa total Pengeluaran Daerah (TPD) kabupaten dan kota masih mengharapkan dana perimbangan utamanya yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini berarti bahwa kabupaten dan kota masih sulit jika Total Pengeluaran Daerah (TPD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada Tabel 5.6. halaman 132 tampak bahwa selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 kabupaten yang mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana alokasi Khusus (DAK) tertinggi dari pemerintah pusat adalah kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu rata-rata sebesar 89,55 persen, sedangkan dalam periode yang sama yaitu dari tahun 2001 sampai 2005 kabupaten yang mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terendah adalah Halmahera Tengah yaitu rata-rata sebesar 77,48 persen. Sementara untuk kota dalam periode yang sama kota Ternate mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi yaitu rata-rata sebesar 78,36 persen. Jika diamati secara seksama selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 kabupaten dan kota se Provinsi Maluku rata-rata mengharapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar 81,38 persen.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan

keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada.

Tabel 5.6.
KONTRIBUSI DAU DAN DAK TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		2001	2002	2003	2004	2005
1	Maluku Tenggara Barat	93,24	92,79	89,17	83,15	89,42
2	Maluku Tenggara	89,28	86,14	86,23	70,14	67,51
3	Maluku Tengah	88,49	82,26	88,73	87,44	65,07
4	Buru	87,40	73,06	73,34	80,77	85,64
5	Maluku Utara	90,14	80,34	88,71	87,82	86,31
6	Halmahera Tengah	72,73	72,88	70,33	87,28	84,16
Kota						
7	Ambon	64,12	74,43	80,63	82,67	81,57
8	Ternate	86,58	77,20	76,43	72,21	79,39

Sumber: BPS, tahun 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku,diolah.

5.2.3 Penyerapan Tenaga Kerja dan Elastisitas Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja yang luas dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Oleh karena upaya pembangunan selalu diarahkan

pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, maka penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama biasanya dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, di samping itu juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah. Lapangan pekerjaan utama (sektor) dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) sektor, yaitu:

1. Sektor primer, terdiri dari pertanian, pertambangan dan penggalian.
2. Sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta konstruksi.
3. Sektor tersier, terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

Tinggi rendahnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektoral tergantung pada perkembangan masing-masing sektor tersebut.

Gambaran secara umum berdasarkan data penyerapan tenaga kerja daerah kabupaten se Provinsi Maluku menunjukkan bahwa peranan sektor primer dalam penyerapan tenaga kerja masih tinggi jika dibanding dengan sektor sekunder dan sektor tersier. Ini dapat dilihat dalam kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 sektor primer masih menempati urutan teratas. Sementara untuk kota daya serap sektor tersier menempati urutan teratas dibanding sektor primer dan sekunder. Kondisi ini disebabkan karena di daerah kabupaten sektor primer utamanya sektor pertanian merupakan basis sektor tersebut, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di

sektor pertanian. Sementara di daerah kota yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih banyak menyediakan lapangan kerja pada sektor tersier.

Tabel 5.7 menggambarkan laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja kabupaten dan kota se Provinsi Maluku kurun waktu tahun 2001 sampai 2005. Pada Tabel tersebut tampak bahwa laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja kabupaten dan kota se Provinsi Maluku sangat fluktuatif. Bila dicermati secara seksama pada tahun 2001 untuk kabupaten pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tertinggi ditempati kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Halmahera Tengah, kemudian disusul oleh kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Utara, Buru dan Maluku Tengah. Sementara untuk kota pada tahun 2001, kota Ambon mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang negatif. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kondisi perekonomian di daerah akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika kesempatan kerja terbuka luas penyerapan tenaga kerja meningkat, dengan demikian pengangguran akan berkurang.

Tabel 5.7.
PERTUMBUHAN PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		**T a h u n**				
Kabupaten		**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1	Maluku Tenggara Barat	9.33	11,91	2,46	2,15	4,35
2	Maluku Tenggara	6,89	11,45	7,00	7,29	8,12
3	Maluku Tengah	3,92	-3,68	-4,93	4,00	4,45
4	Buru	4,27	5,21	10,23	14,63	4,30
5	Maluku Utara	6,12	1,15	13,83	8,93	5,53
6	Halmahera Tengah	9,37	8,20	11,34	10,91	6,67
Kota						
7	Ambon	-4,75	-5,51	10,38	16,26	7,11
8	Ternate	1,25	-0,84	-7,96	-5,17	14,11

Sumber: BPS, tahun 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku,diolah.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut dengan mencermati angka laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada Tabel 5.7 pada tahun 2002 dan 2003 kabupaten Maluku Tengah mengalami kondisi penyerapan tenaga kerja yang negatif. Namun, pada perkembangan selanjutnya pertumbuhan negatif penyerapan tenaga kerja mengarah ke pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang positif.

Sementara untuk kota telah mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga kerja positif dan negatif pula. Menarik untuk diulas disini, pada tahun 2001 sampai tahun 2002 kota Ambon telah mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang negatif. Namun, pada tahun 2003 sampai tahun 2005 kembali mengalami pertumbuhan positif yang sangat tinggi. Hal yang sama juga dialami kota Ternate, pada tahun 2002 sampai tahun 2004 telah mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang negatif, tetapi pada tahun 2005 kembali mengalami pertumbuhan penyerapan tenaga kerja positif yang cukup tinggi pula. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa kesempatan kerja yang tercipta sangat rentan terhadap kondisi perubahan perekonomian suatu daerah.

Tabel 5.8 halaman 136 telah dijelaskan tentang rata-rata penyerapan tenaga kerja sektoral kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Pada Tabel tersebut tampak bahwa selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 untuk daerah kabupaten sektor primer mempunyai peranan penting dalam menyediakan kesempatan kerja rata-rata setiap tahun sebesar 69,17 persen, sektor sekunder hanya menyediakan kesempatan kerja rata-rata setiap tahun selama periode tersebut sebesar 8,44 persen dan sektor tersier menyediakan kesempatan kerja rata-rata setiap tahun sebesar 22,39 persen.

Lebih jelasnya tentang rata-rata penyerapan tenaga kerja sektoral daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut:

Tabel 5.8.
RATA-RATA PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL
KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten		**Primer**	**Sekunder**	**Tersier**
1	Maluku Tenggara Barat	73,05	1,94	25,01
2	Maluku Tenggara	68,99	4,03	26,98
3	Maluku Tengah	60,18	8,65	31,17
4	Buru	71,01	11,56	17,43
5	Maluku Utara	80,93	5,72	13,35
6	Halmahera Tengah	60,84	18,73	20,43
Kota				
7	Ambon	15,92	10,61	73,47
8	Ternate	17,35	18,04	64,61

Sumber: BPS, 2005, Jakarta, Kabupaten dan Kota Se Provinsi Maluku, diolah

Sementara untuk kota dalam kurun waktu yang sama yaitu dari tahun 2001 sampai 2005 sektor tersier menyediakan kesempatan kerja tertinggi yaitu rata-rata setiap tahun sebesar 69,04 persen, kemudian sisusul sektor pertanian sebesar 16,64 persen, sementara sektor sekunder rata-rata setiap tahun hanya menyerap tenaga kerja sebesar 14,22 persen.

Secara umum laju pertumbuhan penyerapan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan melalui elastisitas penyerapan tenaga kerja. Elastisitas penyerapan tenaga kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Indikator elastisitas ini sering

digunakan untuk menganalisis sifat dari suatu usaha yaitu padat modal atau padat karya.

Tabel 5.9.
ELASTISITAS PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005
(dalam persentase)

Kabupaten/Kota		Tahun				
Kabupaten		**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1	Maluku Tenggara Barat	3,39	3,76	0,72	0,65	1,16
2	Maluku Tenggara	2,74	2,79	1,65	1,80	2,47
3	Maluku Tengah	1,69	-1,84	1,49	1,88	1,08
4	Buru	2,53	1,75	3,96	4,72	1,19
5	Maluku Utara	2,45	2,45	4,74	2,68	1,48
6	Halmahera Tengah	5,54	3,79	2,86	1,98	2,29
Kota						
7	Ambon	-2,04	-1,65	1,84	2,84	1,14
8	Ternate	1,18	-0,30	-5,73	-0,67	2,14

Sumber: Diolah dari data penelitian (Tabel 5.1 dan 5.7).

Berdasarkan Tabel 5.9 telah menunjukkan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja kabupaten dan kota se Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 selalu mengalami fluktuasi. Jika diamati secara seksama elastisitas penyerapan tenaga kerja untuk daerah kabupaten dan kota selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 rata-rata mencapai angka sebesar 2,39 persen, sementara untuk kota dalam kurun waktu yang sama rata-rata mencapai angka sebesar -0,13 persen.

Angka elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi tersebut memberi indikasi bahwa kemampuan pemerintah kabupaten dalam menciptakan kesempatan kerja semakin tinggi, dengan indikasi perkembangan kegiatan ekonomi lebih mengarah pada padat karya.

5.2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan suatu indeks komposit pembangunan manusia yang diadopsi dari UNDP (1990) dengan beberapa penyesuaian. Dengan luasnya cakupan pembangunan manusia, dan tidak semua aspek pembangunan manusia tercakup dalam IPM, sehingga UNDP (1990) mengemukakan bahwa upaya ke arah perluasan pilihan hanya mungkin direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki peluang umur panjang (usia harapan hidup), pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan peluang untuk merealisasikan kesehatan dan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan ekonomi yang produktif sehingga memperoleh pendapatan. IPM dihitung dengan mencakup tiga komponen yaitu usia harapan hidup, pengetahuan dan pendapatan per kapita.

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang dijalani oleh setiap kelompok masyarakat. Angka ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat di masing-masing kabupaten dan kota se Provinsi Maluku. Semakin tinggi derajat kesehatan yang dicapai suatu daerah semakin tinggi angka harapan hidup yang dicapai (lihat Tabel 1.9 halaman 18).

Sementara untuk program pendidikan memegang peranan yang penting karena pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk. Program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah sejak Repelita I sampai sekarang ternyata membawa dampak yang baik dan ini terlihat dari kecenderungan angka baca tulis di kabupaten dan kota yang semakin meningkat (lihat Tabel 1.8 halaman 17).

Kemudian untuk pendapatan per kapita yang merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi, atau merupakan gambaran nilai tambah yang diciptakan oleh penduduk dari aktivitas ekonomi. Pendapatan per kapita kabupaten dan kota se provinsi Maluku telah disajikan pada tabel 1.7 halaman 16.

Selanjutnya pada Tabel 5.10 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2005 kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum terjadi peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat adanya peningkatan dari pendapatan per kapita, tingkat pendidikan serta tingat usia harapan hidup. Keseluruhan dari angkat-angka tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku.

Tabel 5.10.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI MALUKU
TAHUN 2001 SAMPAI 2005

Kabupaten/Kota		**Tahun**				
Kabupaten		**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
1	Maluku Tenggara Barat	66,25	66,75	67,22	68,01	68,24
2	Maluku Tenggara	65,40	66,12	66,76	67,32	68,18
3	Maluku Tengah	65,19	66,34	68,34	66,16	67,66
4	Buru	65,65	65,89	66,33	65,78	66,32
5	Maluku Utara	65,11	65,40	63,80	66,40	67,00
6	Halmahera Tengah	66,85	67,30	65,40	66,10	66,70
Kota						
7	Ambon	72,77	73,56	74,66	74,16	75,10
8	Ternate	70,22	71,00	71,4	73,4	74,20

Sumber: BPS, 2004, Jakarta, Kabupaten dan Kota Se Provinsi Maluku, diolah

Jika diamati secara seksama nilai Indeks Pembangunan Manusia pada Tabel 5.10 maka berdasarkan kriteria tingkat status pembangunan manusia untuk daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku masuk dalam status pembangunan

manusia menengah, karena nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 66 sampai 75,10.

5.3 Analisis Jalur

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi daerah dan kesempatan kerja serta kesejahteraan masyarakat dapat diinterpretasikan dari masing-masing koefisien jalur. Koefisien-koefisien jalur tersebut merupakan hipotesis dalam penelitian ini, yang dapat disajikan dalam tiga persamaan berikut:

Model 1 : $\hat{Y}_1 = 0{,}68X$

Model 2 : $\hat{Y}_2 = 0{,}36X + 0{,}36\hat{Y}_1$

Model 3 : $\hat{Y}_3 = 0{,}24X + 0{,}22\hat{Y}_1 + 0{,}54\hat{Y}_2$

Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis jalur adalah terpenuhi asumsi pada residual pada masing-masing model, sehingga pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan asumsi residual pada masing-masing model.

5.3.1 Uji Normalitas Data

Normalitas dari data merupakan salah satu syarat dalam pemodelan analisis jalur (*path analysis*). Pemeriksaan normalitas ditekankan pada data residual pada masing-masing model. Pemeriksaan asumsi distribusi normal dilakukan dengan melihat plot probabilitasnya, jika plot mendekati garis lurus maka dikatakan asumsi normal telah terpenuhi.

transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktur ekonomi, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Pandangan para ahli tersebut, ada kecenderungan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi apabila ditopang oleh sektor industri atau sektor sekunder (Mursinto;2004:217). Hal ini cukup beralasan karena sektor sekunder akan memberikan nilai tambah (*value added*) yang lebih besar dibandingkan dengan sektor primer. Namun, pendapat tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan, untuk dapat diterapkan pada daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku, atau bahkan mungkin di Indonesia. Salah satu faktor kendalanya adalah sumberdaya manusia yang berkualitas serta modal, untuk kepentingan investasi. Anggapan tersebut akan dapat berhasil apabila sumberdaya manusia yang berkualitas, modal yang cukup tersedia serta pasar sasaran yang hendak dituju.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka program pembangunan yang dilaksanakan harus berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut memperkuat pendapat Adam Smith, Solow dan Schumpeter.

Menurut Smith dalam Jhingan (2007:81-82), proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*).

Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggaris bawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian Solow dalam Mankiw (2002:174) menyatakan bahwa kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat *output* perekonomian serta tingkat pertumbuhan sepanjang waktu. Sejalan dengan pandangan tersebut maka Schumpeter dalam Pressman (2000:156) bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang selalu merupakan perhatian sentral ilmu ekonomi. Sumbangan utama dari Schumpeter adalah mengarahkan kembali perhatian dari para ahli ekonomi kepada isu pertumbuhan jangka panjang. Dalam melakukan hal tersebut ditekankan pentingnya faktor-faktor non ekonomi, seperti inovasi dari pengusaha, untuk kebaikan kemajuan dan pertumbuhan kapitalisme.

Kuncoro (2004:47) kenyataan menunjukkan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalnya beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu daerah juga harus disesuaikan dengan kondisi serta potensi untuk dapat dikembangkan, sehingga terjadinya keseimbangan antara daerah yang satu dengan lainnya. Untuk daerah kabupaten se Provinsi Maluku sesuai dengan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sektor primer utamanya sekator pertanian yang meliputi; sub sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan

perikanan serta yang lainnya adalah sektor sekunder yaitu industri pengolahan. Kedua sektor tersebut sesuai dengan data empiris yang ada selalu ditopang dengan sektor tersier, utamanya perdagangan, hotel dan restoran.

Terdapat banyak teori yang berbicara tentang peran industri dalam mensukseskan upaya pembangunan. Dua di antara teori-teori itu adalah Arthur Lewis dan John Fei berserta Gustav Ranis dalam Todaro (2004:347). Kedua teori ini merupakan teori lama, tetapi kedua teori ini berbicara eksplisit tentang proses transformasi struktur ekonomi. Kedua teori ini bukan berarti dikatakan bahwa argumen kedua teori ini benar sepenuhnya. Kedua teori ini memberi pemahaman bahwa pertumbuhan kegiatan industri memang perlu bagi perekonomian yang masih didominasi sektor pertanian. Teori lewis disebut sebagai teori dua sektor:

1. Sektor substitusi pedesaan tradisional, yang ditandai dengan produktivitas sangat rendah dan surplus tenaga kerja.
2. Sektor industri perkotaan modern yang tinggi produktivitasnya, yang merupakan tenaga kerja dari pedesaan atau sektor substitusi dipindahkan secara bertahap.

Menurut teori ini, dengan tumbuhnya kegiatan industri, bukan saja kelebihan buruh (tenaga kerja) di sektor pertanian dapat dikurangi, karena buruh yang berlebih itu akan diserap oleh sektor industri, tetapi juga produktivitas buruh di sektor pertanian tadi akan meningkat, sehingga produksi total sektor pertanian juga meningkat. Di pihak lain, sektor industri itu sendiri juga akan berkembang karena mendapat bahan baku dan tenaga kerja dari sektor pertanian.

Lewis memang amat prihatin dengan kondisi sektor pertanian di negara-negara sedang berkembang. Warna yang utama dari sektor ini adalah

produktivitasnya yang sangat rendah, padahal digeluti oleh banyak masyarakat seperti yang terjadi di daerah kabupaten se Provinsi Maluku. Ini mengakibatkan pendapatan sebagian besar masyarakat demikian rendah dan pengangguran tersembunyi yang besar berlangsung di sektor pertanian ini. Kegiatan alternatif bagi masyarakat tidak banyak tersedia, karena kegiatan industri amat sedikit. Pembangunan ekonomi tidak akan pernah berlangsung jika keadaan seperti itu berlangsung terus.

Produktivitas yang rendah dari sektor pertanian sebagian memang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang relatif primitif. Unsur tradisi melekat demikian kuat dan sebagian lain karena kelebihan tenaga kerja. Sejalan dengan teori baku ilmu ekonomi, perbandingan antara tanah pertanian dengan tenaga kerja mesti harmoni bila dikehendaki hasil yang optimal. Perbandingan yang tidak harmoni, karena kelebihan tenaga kerja, tidak dapat tidak akan memberikan hasil yang sub optimal. Untuk mengatasi produksi yang sub-optimal tersebut maka tiada jalan lain selain mentransfer tenaga kerja yang berlebih tadi ke kegiatan di luar sektor pertanian (industri).

6.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan pada Tabel 5.11 halaman 141 menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,239 dengan nilai C.R sebesar 2,048 dan probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,048 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jika kegiatan ekonomi di daerah ditingkatkan dan pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula.

Hasil studi ini mendukung hasil studi Brata (2002) mengenai investasi sektor publik lokal, pembangunan manusia dan kemiskinan. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pembangunan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diindikasi dari pembangunan manusia, artinya pembangunan ekonomi telah dapat meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Hasil studi ini tidak sejalan dengan studi Tadjoeddin dkk (2001) mengenai disparitas regional dan konflik vertikal di Indonesia. Hasil studi menyimpulkan bahwa kaitan antara tingkat *output* di suatu wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan sangat lemah. Tingginya kekayaan daerah tidak secara signifikan diikuti oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula. Jadi terdapat kegagalan untuk merefleksikan kekayaan daerah ke dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara menurut pendapat Suharto (2005) bahwa keragaman sumber daya manusia dan potensi ekonomi daerah kerap kali menimbulkan pandangan generalisasi bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan oleh daerah-daerah yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Desentralisasi yang memberi kewenangan lebih luas pada daerah, kemudian dijadikan momentum untuk memangkas anggaran dan institusi-institusi masyarakat dan bahkan meniadakan sama

sakali. Alasannya, pembangunan kesejahteraan masyarakat dianggap boros dan karenanya baru perlu dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi (PAD) telah tinggi. Padahal studi dibeberapa negara menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi tidak secara otomatis dan linier berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada uraian tersebut disadari bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah kabupaten dan kota. Pengertian pembangunan ekonomi sangat luas, sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus menuju kemajuan dan perbaikan kearah yang diinginkan. Usaha mencapai kemajuan tersebut ditempuh melalui berbagai cara guna memperbaiki taraf hidup masyarakat, sehingga pembangunan tidak lain adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan kegiatan tersebut meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya. Dengan demikian hasil pembangunan dapat dilihat dari adanya perubahan sosial (*sosial change*) dan bukan semata-semata hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini kiranya lebih memperkuat pendapat Todaro, Sen, Samuelson serta Wrihatnolo dan Nugroho.

Menurut Todaro (2004:21) bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan.

Pendapat Todaro tersebut didukung oleh Meier (1976:6), Baldwin (1981:2), dan Sukirno (2006:10) serta Arsyad (1999:6) yang memandang bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka waktu yang panjang, dengan distribusi pendapatan yang tidak semakin timpang. Dalam pandangan tersebut ditekankan dua kata, yaitu "proses" dan "jangka waktu yang panjang". Proses perlu digarisbawahi karena istilah ini berimplikasi pada pergerakan sejumlah faktor ekonomi dalam hubungan yang saling terkait. Sementara, jangka waktu yang panjang perlu ditekankan karena apa yang harus menjadi titik perhatian utama dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan riil masyarakat yang terus menerus.

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa pembangunan ekonomi yang hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan pendapatan hanya akan menimbulkan bias dalam upaya mengenali permasalahan sebenarnya. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan ekonomi juga harus difokuskan pada aspek-aspek kualitatif dari pembangunan itu sendiri, yang mencakup meningkatkan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut Sen dalam Pressman (2000:274-275) menyatakan bahwa pertumbuhan berarti memproduksi lebih banyak barang dan jasa terlepas dari apa yang terjadi pada orang-orang yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Sedangkan perkembangan ekonomi meliputi pengembangan kemampuan manusia. Pertumbuhan ekonomi menaikan pendapatan per kapita, sementara perkembangan ekonomi meningkatkan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara/daerah seharusnya

memfokuskan pada tujuan yang nyata, yaitu pengembangan potensi manusia, lagi pula kesuksesan perkembangan ekonomi seharusnya dimulai berdasarkan meningkatnya tingkat warga yang bebas buta huruf dan harapan hidup ketimbang pertumbuhan dalam produksi atau tingkat pendapatan.

Kemudian Samuelson (2004:46) mengemukakan bahwa kesejahteraan tidak semata-mata berdasar kriteria ekonomi sempit, tetapi telah mengandung nilai-nilai etikal. Sebagai kebijakan distribusi pendapatan *welfare economics* mengemban *ethical precept* (nilai-nilai etis-normatif). Di lain pihak *welfare economics* harus pula mengintroduksi dimesi *welfare* dari luar ilmu ekonomi. Dengan demikian dalam tataran *societal welafare* maka *social choice* dalam mencapai *social optimum* perlu mencari pendekatan baru, artinya sejak titik tolak awalnya preferensi individu-individu tidak lagi diasumsikan berdimensi kepentingan tunggal, tetapi *Multipartitus.*

Pendapat dari kedua ahli tersebut diperkuat pula oleh Wrihatnolo dan Nugroho (2006:10) bahwa perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh dimensi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan tingkat kesejahteraan menurut dimensi ekonomi adalah yang dapat menggerakan tindakan ekonomi, seperti kebutuhan memperoleh uang, kebutuhan memiliki tabungan, kebutuhan memiliki modal, kebutuhan untuk kerja. Perubahan tingkat kesejahteraan menurut dimensi sosial adalah yang dapat menggerakan tindakan sosial, seperti kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, kebutuhan untuk memperoleh kesehatan, kebutuhan untuk memperoleh kesenangan. Perubahan tingkat kesejahteraan menurut dimensi politik adalah yang dapat menggerakan tindakan politik, seperti kebutuhan untuk

menyuarakan pendapat, kebutuhan untuk membentuk ikatan politik, kebutuhan untuk memiliki hak politik yang sejajar. Perubahan tingkat kesejahteraan menurut dimensi hukum adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum.

6.4 Pengaruh Derajat Otonomi Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penciptaan lapangan kerja merupakan masalah yang sangat esensial karena "*multiplier effect*" nya tinggi sekali. Lapangan kerja berkaitan dengan harga diri dan martabat. Orang yang memiliki sebuah pekerjaan tetap akan memiliki martabat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran). Lapangan kerja atau kesempatan kerja berkaitan erat pula dengan dua dimensi ekonomi yang sangat esensial, yaitu peningkatan daya beli dan kecenderungan untuk menabung. Dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi, maka daya beli akan meningkat pula, dan bagaimanapun juga akan mempengaruhi kecenderungan untuk menabung, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula basis perpajakan dalam sebuah negara atau daerah. Daya beli meningkat artinya pajak penjualan atas barang dan jasa juga meningkat, yang semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk proyek dan sejumlah insentif lainnya. Roda pembangunan juga akan berputar dengan sendirinya, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan konsep tersebut maka sesuai hasil perhitungan pada Tabel 5.11 halaman 141 menunjukkan bahwa pengaruh darajat otonomi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki nilai koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,362 dengan nilai C.R sebesar 2,153 dan diperoleh probabilitas signifikansi

(p) sebesar 0,038 lebih kecil dari alpha (α) = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis empat yang menyatakan bahwa derajat otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten dan kota se Provinsi Maluku terbukti kebenarannya dan dapat diterima.

Hasil studi tersebut mendukung penelitian Santoso (2000), bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi selanjutnya, karena selain mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi juga menciptakan lapangan kerja. Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil studi Makmum (2004) yang menyatakan bahwa sejalan dengan tugas yang diemban oleh pemerintah daerah, dalam jangka panjang meningkatkan APBD diharapkan mampu memberikan stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini akan tercapai apabila kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Dengan berkembangnya perekonomian daerah, maka dampak positif juga akan dinikmati oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan PAD dan lain sebagainya.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk pengembangan ekonomi daerah memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Arsyad (1999:108) dan Barzelay (1991) bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses dimana terdapat kerjasama antara pemerintah lokal, kelompok masyarakat, dan sektor swasta yang dibentuk untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Lebih lanjut disebutkan bahwa masalah pokok dalam pembangunan ekonomi adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, Kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Kemudian dalam hubungannya dengan otonomi daerah Rasyid dkk (2002:218) mengemukakan bahwa daerah telah memiliki sejumlah kewenangan, terutama sebelas (11) kewenangan wajib yang meliputi; pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, perdagangan dan industri, investasi, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Kewenangan wajib itu merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah ada beberapa hal antara lain:

1. Fasilitas. Fungsi pemerintah daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala kegiatan di daerah, terutama dalam bidang perekonomian, terutama adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja secara maksimal bagi warga masyarakat, sehingga di samping warga masyarakat memiliki harga diri, pengangguran juga dapat dikurangi.
2. Pemerintah daerah harus kreatif. Kreatifitas tersebut menyangkut bagaimana mengalokasikan dana, apakah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) ataukah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara tepat dan adil serta proporsional.

3. Politik lokal yang stabil. Masyarakat dan pemerintah daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi.
4. Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha.

Faktor-faktor yang diungkapkan tersebut merupakan modal bagi terselenggaranya pembangunan daerah. Dengan kebijakan otonomi yang luas maka peluang bagi daerah menjadi sangat luas. Yang paling utama bagi daerah adalah penciptaan lapangan kerja. Ukuran yang paling fundamental bagi keberhasilan sebuah pemerintahan adalah seberapa juah pemerintah tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

6.5 Pengaruh Derajat Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum di daerah saat ini telah mengalami banyak perubahan yang signifikan sebagai konsekwensi adanya reformasi di bidang pemerintahan daerah yang digulirkan melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berbagai upaya untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pada dasarnya ditujukan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah baik sumber daya aparatur maupun keuangan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Sehingga adanya desentralisasi dan otonomi daerah tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas aparatur dan organisasi daerah untuk mengemban fungsi dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karenanya semangat pembangunan daerah akan bergeser kepada semangat daerah membangun yang mengandung makna bahwa perlunya inisiatif lokal dan pergeseran kebijakan perimbangan keuangan yang memberikan peluang lebih besar kepada daerah otonom untuk menggunakan hak dan tanggungjawabnya dalam proses pembangunan daerah yang dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian kepentingan lokal, kepentingan antar daerah, dan kepentingan nasional diharapkan akan mampu berjalan serasi dan saling menunjang dalam upaya perubahan atau pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian tersebut maka berdasarkan Tabel 5.11 pada halaman 141 menunjukkan bahwa pengaruh derajat otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,221 dengan nilai C.R sebesar 1,968 dan tingkat probabilitas 0,049 lebih kecil dari alpha (α) = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis lima yang menyatakan bahwa derajat otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku terbukti kebenarannya dan dapat diterima.

Hasil studi ini sejalan dengan studi Brata (2005) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Hal ini dapat

menunjukkan bahwa semakin besar alokasi pengeluaran pembangunan untuk pendidikan dan kesehatan makin baik pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai.

Hasil studi ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Word Bank (2003) mengenai model pertumbuhan kabupaten dan kota yang ideal, yang penekanannya pada upaya peningkatan pelayanan publik. Bahwa tata pemerintahan yang baik akan mendorong penyediaan pelayanan kabupaten dan kota yang bermutu tinggi, sehingga investor akan tertarik dengan kemajuan tersebut sehingga dapat merangsang pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang termasuk masyarakat miskin.

Kemudian hasil studi ini juga mendukung hasil studi Rappaport (1999) tentang pertumbuhan ekonomi antara daerah (lokal) di Amerika Serikat menyatakan bahwa dalam hal hubungan antara kebijakan anggaran pemerintah lokal dengan pertumbuhan ekonomi lokal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lokal sepanjang periode yang diamati berkorelasi positif dengan pengeluaran pemerintah lokal untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Hasil studi ini mendukung pendapat Halim (2004:22) dan Sidik (2002:8) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka Cherniavskii *and* Vartapetov (2005) menyatakan bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Total Penerimaan Daerah bisa dilihat sebagai indikator otonomi keuangan daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka kesempatan untuk mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk berbagai keperluan.

Kemudian Musgrave *and* Musgrave (1991:6-13) menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi yang meliputi antara lain; sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi yang meliputi antara lain; pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain; pertahanan keamanan, ekonomi moneter.

Fungsi alokasi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektik dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan setuasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan penentuan dasar-dasar pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara jelas dan tegas.

6.6 Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan Tabel 5.11 pada halaman 141 menunjukkan bahwa pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,537 dengan nilai C.R sebesar 4,985 dan probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 lebih kecil dari dari alpha (α) = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis enam yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penyerapan tenaga kerja, maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika penyerapan tenaga kerja semakin kecil maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin kecil. Kesejahteraan yang meningkat dapat diindikasikan seiring dengan peningkatan pendapatan yang diterima oleh pekerja.

Hasil studi ini mendukung pandangan Muhammad (2004) bahwa makin besar dan bervariasi kegiatan ekonomi pada suatu masyarakat, tentu hal itu baik karena ia akan menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja akan memberi penghasilan, dan dengan penghasilan itu seseorang beserta keluarganya memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, berarti pembangunan ekonomi harus dapat menjamin meningkatnya produktivitas dan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Seperti diketahui bahwa kemampuan setiap daerah dalam menciptakan kesempatan kerja akan memberikan dampak positif bagi penyerapan

tenaga kerja di daerah tersebut. Angkatan kerja yang bekerja akan mendapatkan upah, di mana upah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Hasil studi ini mendukung Todaro (2004:280), bahwa kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan hal tersebut hasil studi ini juga menguatkan Sumodiningrat (2001:13), yang mengatakan bahwa kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan meningkatnya pendapatan. Artinya kesejahteraan akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, karena dengan kenaikan pendapatan konsumsi masyarakat juga akan semakin meningkat, baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya.

Permintaan terhadap faktor produksi tenaga kerja yang semakin meningkat di setiap daerah, sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, sehingga dapat menampung banyaknya tenaga kerja yang tersedia, dengan demikian tenaga kerja yang menganggur atau setengah menganggur akan terserap di seluruh sektor ekonomi, sehingga menjadi tenaga kerja yang produktif.

Kontribusi penyerapan tenaga kerja di daerah yang tinggi menggambarkan bahwa angkatan kerja disetiap kabupaten dan kota yang dilibatkan dalam kegiatan produksi setiap sektor. Keterlibatan angkatan kerja akan menambah kemampuan produksi dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah. Demikian pula sebaliknya bila kontribusi penyerapan tenaga kerja daerah rendah mengindikasikan bahwa

keterlibatan angkatan kerja kurang dalam aktivitas ekonomi sehingga tingkat pengangguran menjadi tinggi.

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di setiap kabupaten dan kota dapat diindikasikan pula sebagai salah satu penentu dari penyerapan tenaga kerja, artinya bila pertumbuhan penyerapan tenaga kerja meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menurun maka penyerapan tenaga kerja juga menurun. Pertumbuhan tenaga kerja di daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku juga berfluktuasi setiap tahun (lihat Tabel 5.7 halaman 133), hal ini sangat tergantung pada kondisi perkembangan perekonomian sektoral di setiap kabupaten dan kota dalam periode tersebut.

Secara teoritis permintaan pengusaha atas tenaga kerja, karena seseorang tersebut membantu untuk memproduksikan barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen (pemakai). Dengan demikian, pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Sejalan dengan hal tersebut Bellante dan Jackson (1990:25) menjelaskan bahwa permintaan akan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan secara khusus. Selain itu berdasarkan fungsi permintaan perusahaan akan tenaga kerja dengan asumsi bahwa setiap produsen selalu berusaha memaksimalkan profit, maka dasar pertimbangan dipergunakan seseorang pengusaha untuk menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja adalah bila marginal revenue lebih besar dari marginal cost. Hal ini akan terus berlangsung selama *marginal revenue* lebih besar dari upah yang diberikan kepada tenaga kerja (*marginal cost*),

artinya permintaan akan tenaga kerja terjadi bila permintaan akan barang dan jasa meningkat atau *marginal revenue* pengusaha lebih besar dari *marginal cost*.

Dalam kerangka makro ekonomi laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja ini dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja (lihat Tabel 5.9 halaman 136). Elastisitas kesempatan kerja yang tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Dengan ditemukannya nilai koefisien jalur yang positif, hal ini mempunyai makna bahwa laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga penyerapan tenaga kerja juga tinggi. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa perluasan kesempatan usaha lebih mengarah pada padat karya (*labor intensive*), bukan padat modal (*capital intensive*).

Dalam studi ini juga diperolah koefisien jalur pengaruh tidak langsung antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya bila pertumbuhan ekonomi meningkat, penyerapan tenaga kerja meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Proses tersebut terjadi disebabkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi di setiap daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku, sehingga secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten dan kota se Provinsi Maluku juga meningkat. Proses tidak langsung tersebut dapat terjadi disebabkan oleh perkembangan aktivitas ekonomi yang akan menciptakan sejumlah kesempatan kerja sehingga penyerapan tenaga kerja terjadi, kemudian produktivitas

meningkat diiringi dengan peningkatan pendapatan. Semakin tinggi balas jasa yang diperoleh tenaga kerja dalam proses produksi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi kebijakan pembangunan ketenaga kerjaan yang perlu dilaksanakan, hendaknya lebih diprioritaskan pada perluasan kesempatan kerja. Dengan adanya perluasan kesempatan kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja. Sejalan dengan hal tersebut Adam Smith menjelaskan bahwa pertumbuhan produktivitas akan meningkatkan standar kehidupan.

Berdasarkan hasil analisis dapat mengindikasikan bahwa kabupaten dan kota se Provinsi Maluku elastisitas penyerapan tenaga kerja positif, untuk menanggulangi hal tersebut hendaknya kebijakan perluasan usaha lebih diarahkan ke *labor intensive*, dan disesuaikan dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah sehingga elastisitas penyerapan tenaga kerja menjadi positif.

6.7 Temuan-Temuan

Setelah mengkaji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku, maka temuan-temuan, baik empiris maupun teori yang menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

1. Temuan empiris membuktikan bahwa daerah kabupaten se Provinsi Maluku masih sulit bergeser struktur perekonomiannya dari primer ke sekunder. Seperti diketahui sektor sekunder yang terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas dan

air bersih serta konstruksi memerlukan investasi yang sangat besar dan dengan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sebagai akibatnya daerah tersebut kontribusi sektor tersier yang meliputi perdagangan utamanya perdagangan eceran, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa-jasa meningkat lebih dulu atau kontribusi sektor tersier lebih besar dibandingkan dengan sektor sekunder. Hal ini sangat wajar mengingat untuk sektor tersier secara relatif tidak memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama untuk daerah kabupaten dan kota. Keadaan tersebut jelas bahwa kabupaten dan kota se Provinsi Maluku belum mengarah ke Industrialisasi. Jika diamati lebih seksama untuk kota ternyata kontribusi sektor tersier lebih besar dibandingkan dengan sektor primer. Sebaliknya untuk daerah kabupaten antara sektor tersier dan sektor primer kontribusinya secara relatif sama.

2. Temuan teoritis tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memperkuat teori dari Kuznets, Becker, Boyers, Chenery dan Djojohadikusumo. Kuznets menekankan bahwa pertumbuhan itu berkaitan dengan perpaduan efek produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Becker menekankan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan derajat kesehatan. Boyers menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah dan kualitas sumberdaya serta perkembangan teknologi. Jika kualitas sumberdaya naik dan masing-masing sumberdaya menjadi lebih produktif maka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Kemudian Chenery menyatakan pertumbuhan merupakan suatu proses

transformasi struktural ditandai antara lain dengan meningkatnya sumbangan (*share*) sektor industri manufaktur dan jasa-jasa di dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di satu pihak, dan makin menurunnya sumbangan (*share*) sektor pertanian di dalam PDB di pihak lain. Djojohadikusumo, bahwa salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan produksi, karena itu proses pembangunan menghendaki perubahan pada komposisi produksi dan perubahan pada pola pembangunan (alokasi) sumber produksi di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan dalam kerangka kelembagaan secara menyeluruh.

3. Temuan teoritis memperkuat teori Adam Smith, Solow dan Schumpeter. Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggaris bawahi pentingnya skala ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian Solow menyatakan bahwa kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat *output* perekonomian serta tingkat pertumbuhan sepanjang waktu. Sementara Schumpeter menyatakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang selalu merupakan perhatian sentral ilmu ekonomi. Sumbangan utama dari Schumpeter adalah mengarahkan kembali perhatian dari para ahli ekonomi kepada isu pertumbuhan jangka panjang. Dalam melakukan hal

tersebut ditekankan pentingnya faktor-faktor non ekonomi, seperti inovasi dari pengusaha, untuk kebaikan kemajuan dan pertumbuhan kapitalisme.

4. Temuan empiris memperkuat pendapat Kuncoro, bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalnya beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu daerah juga harus disesuaikan dengan kondisi serta potensi untuk dapat dikembangkan, sehingga terjadinya keseimbangan antara daerah yang satu dengan lainnya. Untuk daerah kabupaten se Provinsi Maluku sesuai dengan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sektor primer utamanya sekator pertanian yang meliputi; sub sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta yang lainnya adalah sektor sekunder yaitu industri pengolahan. Kedua sektor tersebut sesuai dengan data empiris yang ada selalu ditopang dengan sektor tersier, utamanya perdagangan, hotel dan restoran.

5. Temuan empiris memperkuat pendapat Makmum bahwa sejalan dengan tugas yang diemban oleh pemerintah daerah, dalam jangka panjang meningkatkan APBD diharapkan mampu memberikan stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini akan tercapai apabila kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Dengan berkembangnya perekonomian daerah, maka dampak positif juga akan dinikmati oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja,

meningkatkan PAD dan lain sebagainya, sehingga akan bermuara pada penurunan terhadap ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.

6. Temuan empiris memperkuat pendapat Iswardono bahwa Pertumbuhan PDRB suatu daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena semakin besar PDRB suatu daerah akan semakin besar pula PAD yang diharapkan daerah tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan potensi daerah tersebut dalam menunjang produksi yang dihasilkan di daerah tersebut. Adanya iklim usaha yang menunjang, sarana dan prasarana akan mendorong laju pertumbuhan PDRB.
7. Temuan empiris memperkuat pendapat Brata bahwa pembangunan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diindikasi dari pembangunan manusia, artinya pembangunan ekonomi telah dapat meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.
8. Temuan teori tentang kesejahteraan masyarakat memperkuat teori Todaro, Sen, Samuelson serta Wrihatnolo dan Nugroho. Todaro menekankan pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Sen menekankan bahwa pembangunan ekonomi selain menaikan pendapatan per kapita juga meningkatkan harapan hidup, bebas buta huruf, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara/daerah seharusnya memfokuskan pada tujuan yang nyata, yaitu pengembangan potensi

manusia, lagi pula kesuksesan perkembangan ekonomi seharusnya dimulai berdasarkan meningkatnya tingkat warga yang bebas buta huruf dan harapan hidup ketimbang pertumbuhan dalam produksi atau tingkat pendapatan. Samuelson mengemukakan bahwa kesejahteraan tidak semata-mata berdasar kriteria ekonomi sempit, tetapi telah mengandung nilai-nilai etikal. Sebagai kebijakan distribusi pendapatan *welfare economics* mengemban *ethical precept* (nilai-nilai etis-normatif). Di lain pihak *welfare economics* harus pula mengintroduksi dimesi *welfare* dari luar ilmu ekonomi. Dengan demikian dalam tataran *societal welafare* maka *social choice* dalam mencapai *social optimum* perlu mencari pendekatan baru, artinya sejak titik tolak awalnya preferensi individu-individu tidak lagi diasumsikan berdimensi kepentingan tunggal, tetapi *Multipartitus.* Pendapat dari kedua ahli tersebut diperkuat pula oleh Wrihatnolo dan Nugroho (2006:10) bahwa perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh dimensi ekonomi, sosial, politik, atau hukum.

9. Temuan empiris membuktikan bahwa dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi, maka daya beli akan meningkat pula, dan bagaimanapun juga akan mempengaruhi kecenderungan untuk menabung, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula basis perpajakan dalam sebuah negara atau daerah. Daya beli meningkat artinya pajak penjualan atas barang dan jasa juga meningkat, yang semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk proyek dan sejumlah insentif lainnya. Roda pembangunan juga akan berputar dengan sendirinya, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

10. Temuan empiris memperkuat pendapat Santoso, bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi selanjutnya, karena selain mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi juga menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga berarti semakin banyak barang dan jasa yang tersedia secara domestik, dan naiknya pendapatan mendorong tingginya daya beli masyarakat semakin tinggi. Daya beli meningkat artinya pajak penjualan atas barang dan jasa juga meningkat.

12. Temuan empiris memperkuat pendapat Arsyad dan Barzelay bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses dimana terdapat kerjasama antara pemerintah lokal, kelompok masyarakat, dan sektor swasta yang dibentuk untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

13. Temuan empiris memperkuat pendapat Muhammad bahwa makin besar dan bervariasi kegiatan ekonomi pada suatu masyarakat, tentu hal itu baik karena ia akan menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja akan memberi penghasilan, dan dengan penghasilan itu seseorang beserta keluarganya memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

14. Temuan empiris memperkuat pendapat Rappaport (1999) bahwa dalam hal hubungan antara kebijakan anggaran pemerintah lokal dengan pertumbuhan ekonomi lokal tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi lokal

sepanjang periode yang diamati berkorelasi positif dengan pengeluaran pemerintah lokal untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

15. Temuan empiris memperkuat pendapat Halim (2004:22) dan Sidik (2002:8) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

6.8 Keterbatasan Studi

Berdasarkan apa yang telah dihasilkan dari studi ini sangat disadari bahwa temuan yang diperoleh belum mampu memberikan hasil yang benar-benar akurat dalam menjawab semua permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Terdapat banyak keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam studi ini, antara lain:

1. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan resmi instansi pemerintah yang berhubungan dengan studi ini. Kekeliruan melaporkan akan membawah dampak analisis maupun kesimpulan yang dihasilkan menjadi bias.

2. Keterbatasan dukungan teori dan studi terdahulu yang berkaitan dengan tujuan studi ini sangat terbatas, sehingga pembuktian hasil studi ini dengan dukungan teori menjadi terbatas.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 7
PENUTUP

BAB 7
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat otonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kota se Provinsi Maluku, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap derajat otonomi daerah. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis satu yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap derajat otonomi daerah. Arah positif ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya derajat otonomi daerah.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis dua yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Arah positif menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
3. Pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis tiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan

terhadap kesejahteraan masyarakat. Arah positif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Derajat Otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis empat yang menyatakan bahwa derajat otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Arah positif menunjukkan bahwa peningkatan derajat otonomi daerah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
5. Derajat otonomi daerah secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis lima yang menyatakan bahwa derajat otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Arah positif menunjukkan bahwa peningkatan derajat otonomi daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis enam yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Arah positif menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Hasil studi ini penting bagi pihak pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong berkembangnya dunia usaha dalam upaya pengembangan ekonomi lokal. Dengan berkembangnya perekonomian daerah, diharapkan dapat memberikan dampak positif baik pada pemerintah daerah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tentunya semuanya akan bermuara pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Berdasarkan hasil pembahasan, mengkonfirmasikan bahwa hasil studi ini memberikan kontribusi keilmuan dalam bentuk mendukung dan memperkuat teori dan hasil studi yang mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap derajat otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi pada penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan masyarakat, derajat otonomi daerah pada penyerapan tenaga kerja, derajat otonomi pada kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut telah memperkuat teorinya (Smith dalam Jhingan, 2007:81-82; Solow dalam Mankiw,2007:174; Samuelson,2004:46; Schumpeter dalam Pressman,2000:156; Kuznets dalam Presman, 2000:156; Boyer,1992:334; Chenery dalam Jhingan,2007:5; Sen dalam Pressman,2000:274-275; Djojohadikusomo,1994:6; Kuncoro,2004:47; Todaro,2004:21; Arsyad,1999:6, Muhammad,2004; Musgrave *and* Musgrave,1991:6-13; Sidik,2002:8; Halim, 2004:22; Wrihatnolo dan Riant,2007:75).
9. Hasil pembahasan mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui derajat otonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Pengaruh signifikan tersebut terjadi karena adanya hubungan langsung dengan peranan masyarakat. Dengan demikian derajat otonomi daerah akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggi akan

mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan selanjutnya akan meningkatkan kesejaheraan masyarakat.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan untuk kepentingan praktis dan untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

1. Menengok sejarah perkembangan negara-negara ataupun daerah-daerah yang pada saat kini telah dikatakan maju, serta telah pula dibuktikan lewat kajian banyak para ahli ekonomi di berbagai negara dan daerah, pengembangan kegiatan industri berperan penting bagi peningkatan kesempatan kerja dan taraf hidup ekonomi masyarakat. Oleh karena itu transformasi kegiatan ekonomi masyarakat dari pertanian ke industri perlu terjadi walaupun transformasi itu tentu saja tidak seratus persen. Artinya, betapapun kegiatan masyarakat di sektor pertanian tetap pula diperlukan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten se Provinsi Maluku yang ekonominya masih berat di sektor pertanian ditambah dengan sektor industri yang belum berkembang baik (di mana sebagian besar kegiatan industri masih bersakala kecil). Dengan demikian pengembangan-pengembangan kegiatan industri tentu perlu dilakukan. Ini terwujud jika pemerintah bersama dengan pihak swasta serta masyarakat benar-benar ingin mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain, bukan saja terhadap daerah yang ada di wilayah Indonesia Bagian Timur namun juga wilayah Bagian Barat.

3. Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik karena adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemeritah daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

						Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Pengeluaran Rutin Daerah (PRD) kabupaten dan kota di Jawa Timur berkisar antara 11,59% sampai dengan 67,39%. Sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah tidak ada satupun kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah mampu mandiri untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini disebabkan masih rendahnya Pendapatan Asli Daeah (PAD), meskipun sudah ditambah dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur
5.	Roy W. Bahl	ARegression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis. IMF Staf Papers. Vol.XVIII, No.3 November 1978. Washington		Pendapatan per kapita, sector pertanian, sector perdagangan	Regresi	Determinan yang mempengaruhi kapasitas pajak antara lain pendapatan per kapita serta sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan. Determinan dari sector pertanian dan pertambangan adalah signifikan.
6.	A.R. Prest	The Taxable Capacuty of a Country. Taxation and Economic Development, London: Frank-Cass & Co.Ltd.1978		Pendapatan per kapita, sector pertanian, sector perdagangan	Regresi	Hasil analisisnya menempatkan, Brasil ke dalam kategori kapasitas pajak tinggi; sedangkan Sudan ke dalam kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak tinggi, kemudian Trinidad dengan kategori kapasitas pajak tinggi dan usaha pajak rendah, dan Pakistan

dilanjutkan ...

DISERTASI Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ... Nahu Daud

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

			pembangunan manusia dan kemiskinan bukti empiris hubungan antara tingkat pembangunan manusia dan kemiskinan.			manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan tampak lebih besar daripada pengaruh pengeluaran sosial. Hal ini dapat sekaligus menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran sosial yang memadai dalam pengeluaran pembangunan memberikan manfaat yang makin baik bagi pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas manusia. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tersebut terdapat beberapa persamaan, utamanya menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi daerah, derajat otonomi fiskal daerah, penyerapan tenaga kerja per sektor ekonomi, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan yang utama adalah, pada indikator variabel yang digunakan, teknik analisis yang digunakan dan obyek penelitian serta kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini.

dilanjutkan .....

DISERTASI Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ... Nahu Daud

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

12	Stephen M. Miller and Frank S. Russek (1997)	Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level.	Mengetahui hubungan antara struktur fiskal dengan pertumbuhan ekonomi	Analisis Regresi	Struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Jika pajak tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, dan akan berpengaruh negatif jika digunakan untuk pembayaran transfer (*transfer payment*).
13	Sung Tai Kim	Rule of Local Publik Sector In Regional Economic Growt In Korea.	Mengetahui peranan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Analisis Regresi	Peranan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah di dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah sangat nyata. Selanjutnya dikatakan bahwa pajak daerah dan penerimaan lain selain pajak daerah berpengaruh negatif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sementara investasi pemerintah daerah dan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah mempunyai pengaruh nyata dan positif yang lebih besar.

DISERTASI Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ... Nahu Daud

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 2: Rekapitulasi Data

No	X	Y1	Y2	Y3	Zx	Zy1	Zy2	Zy3
1	2.75	1.01	9.33	66.25	-0.28	-1.27	0.55	0.11
2	2.52	3.13	6.89	65.40	-0.44	0.41	0.16	-0.03
3	2.32	1.96	3.92	65.19	-0.58	-0.52	-0.32	-0.07
4	1.69	1.78	4.27	65.65	-1.02	-0.66	-0.27	0.01
5	1.58	1.23	6.12	65.11	-1.09	-1.10	0.03	-0.08
6	1.67	1.23	9.37	66.85	-1.03	-1.10	0.56	0.21
7	0.73	0.97	-4.75	53.33	-1.69	-1.30	-1.72	-2.1
8	1.06	2.74	1.25	60.22	-1.46	0.10	-0.75	-0.92
9	2.61	1.00	11.91	55.75	-0.37	-1.28	0.96	-1.69
10	2.11	4.23	11.45	70.12	-0.72	1.28	0.89	0.77
11	2.00	1.77	-3.68	56.34	-0.8	-0.67	-1.55	-1.59
12	2.97	1.79	5.21	65.89	-0.12	-0.65	-0.11	0.05
13	3.07	3.14	1.15	65.40	-0.05	0.42	-0.77	-0.03
14	2.16	2.39	8.20	67.30	-0.69	-0.18	0.37	0.29
15	2.33	1.08	-5.51	55.56	-0.57	-1.21	-1.84	-1.72
16	1.80	2.08	-.84	57.00	-0.94	-0.42	-1.09	-1.47
17	3.44	1.17	2.46	67.22	0.21	-1.14	-0.56	0.28
18	4.23	3.67	7.00	66.76	0.76	0.83	0.17	0.20
19	3.03	1.22	-4.93	59.34	-0.08	-1.10	-1.75	-1.07
20	2.58	1.82	10.23	66.33	-0.39	-0.63	0.69	0.13
21	2.92	3.04	13.83	73.85	-0.16	0.34	1.27	1.41
22	3.97	2.86	11.34	65.40	0.58	0.19	0.87	-0.03
23	5.63	3.85	10.38	74.66	1.74	0.98	0.72	1.55
24	1.39	1.09	-3.97	57.50	-1.23	-1.21	-1.59	-1.39
25	3.32	3.68	2.15	68.01	0.12	0.84	-0.61	0.41
26	4.05	4.97	7.29	67.32	0.63	1.86	0.22	0.29
27	2.13	1.93	4.00	66.16	-0.71	-0.54	-0.31	0.10
28	3.10	4.11	14.63	70.78	-0.03	1.18	1.40	0.89
29	3.33	3.06	8.93	66.40	0.13	0.35	0.48	0.14
30	5.51	2.84	10.91	69.10	1.65	0.18	0.80	0.60
31	5.73	4.16	16.26	74.16	1.81	1.22	1.67	1.47
32	1.57	1.03	-5.17	53.76	-1.10	-1.25	-1.79	-2.03
33	3.74	1.64	4.35	68.24	0.42	-0.77	-0.25	0.45
34	3.28	3.63	8.12	67.55	0.09	0.8	0.35	0.33
35	4.11	2.31	4.45	67.66	0.67	-0.24	-0.24	0.35
36	3.60	4.01	4.30	66.32	0.32	1.10	-0.26	0.12
37	3.74	3.34	5.53	67.00	0.42	0.57	-0.06	0.24
38	5.18	3.39	6.67	66.70	1.42	0.61	0.12	0.19
39	6.22	4.81	16.71	75.15	2.15	1.74	1.74	1.64
40	6.60	5.42	17.11	77.20	2.41	2.22	1.80	1.99

Keterangan:

X : Pertumbuhan Ekonomi
Y1 : Derajat Otonomi Daerah
Y2 : Penyerapan Tenaga Kerja
Y3 : Kesejahteraan Masyarakat

Zx : Standarisasi X
Zy1 : Standarisasi Y1
Zy2 : Standarisasi Y2
Zy3 : Standarisasi Y3

Lampiran 3 : Analisis Jalur Menggunakan SPSS

Model 1:

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1z	.0000	1.00000	40
Xz	.0000	1.00000	40

Correlations

		Y1z	Xz
Pearson Correlation	Y1z	1.000	.680
	Xz	.680	1.000
Sig. (1-tailed)	Y1z	.	.000
	Xz	.000	.
N	Y1z	40	40
	Xz	40	40

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Xz[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y1z

Model Summary

					Change Statistics				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.680[a]	.463	.449	.74257	.463	32.727	1	38	.000

a. Predictors: (Constant), Xz

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.046	1	18.046	32.727	.000[a]
	Residual	20.954	38	.551		
	Total	39.000	39			

a. Predictors: (Constant), Xz

b. Dependent Variable: Y1z

Coefficients[a]

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.40E-007	.117		.000	1.000
	Xz	.680	.119	.680	5.721	.000

a. Dependent Variable: Y1z

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

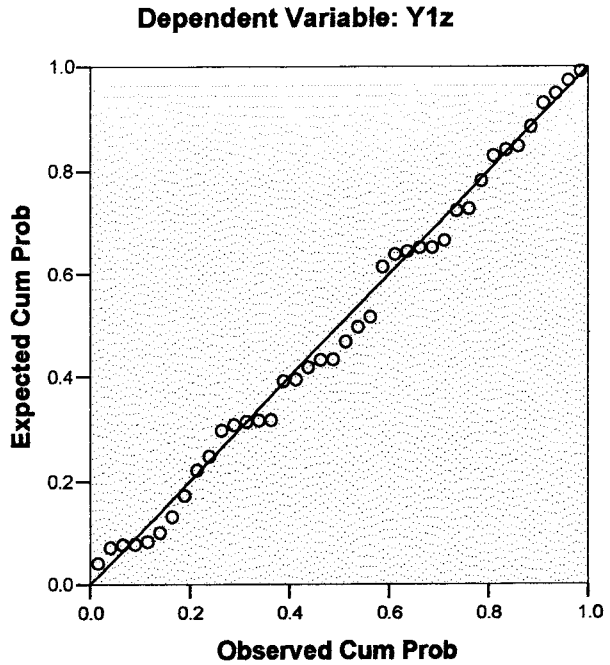

Scatterplot

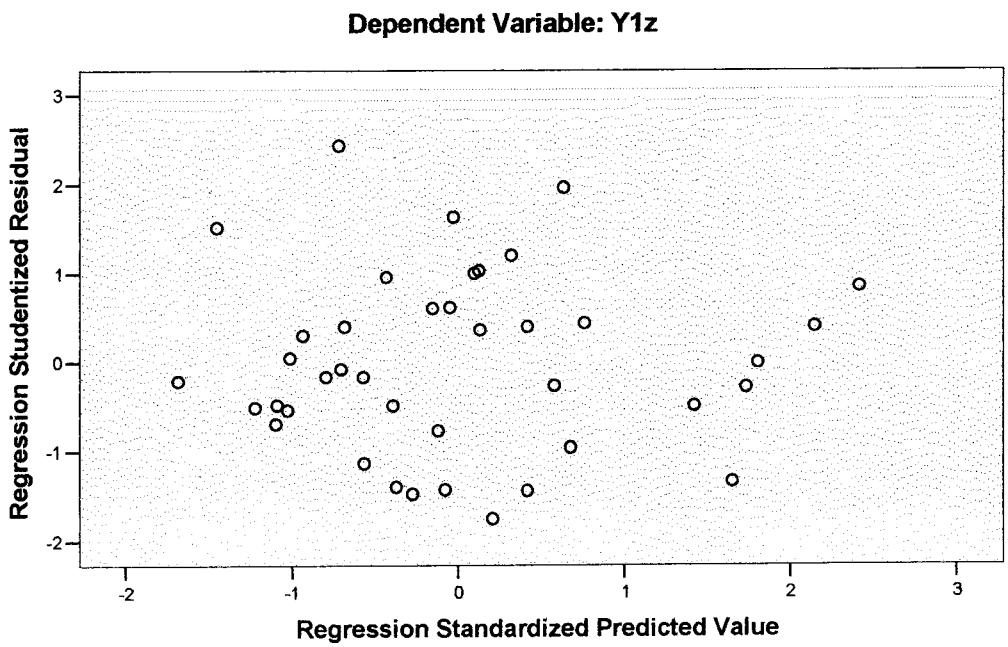

Model 2:

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y2z	.0000	1.00000	40
Xz	.0000	1.00000	40
Y1z	.0000	1.00000	40

Correlations

		Y2z	Xz	Y1z
Pearson Correlation	Y2z	1.000	.606	.607
	Xz	.606	1.000	.680
	Y1z	.607	.680	1.000
Sig. (1-tailed)	Y2z	.	.000	.000
	Xz	.000	.	.000
	Y1z	.000	.000	.
N	Y2z	40	40	40
	Xz	40	40	40
	Y1z	40	40	40

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Y1z, Xz[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y2z

Model Summary

					Change Statistics				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.661[a]	.438	.407	.76998	.438	14.391	2	37	.000

a. Predictors: (Constant), Y1z, Xz

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.064	2	8.532	14.391	.000[a]
	Residual	21.936	37	.593		
	Total	39.000	39			

a. Predictors: (Constant), Y1z, Xz

b. Dependent Variable: Y2z

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.4E-009	.122		.000	1.000					
	Xz	.359	.168	.359	2.137	.039	.606	.331	.263	.537	1.861
	Y1z	.362	.168	.362	2.153	.038	.607	.334	.266	.537	1.861

a. Dependent Variable: Y2z

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Xz	Y1z
1	1	1.680	1.000	.00	.16	.16
	2	1.000	1.296	1.00	.00	.00
	3	.320	2.292	.00	.84	.84

a. Dependent Variable: Y2z

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

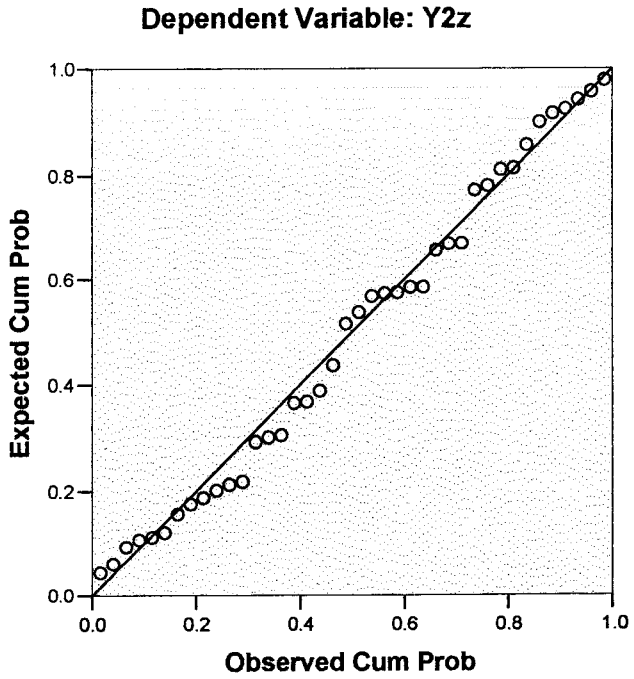

Scatterplot

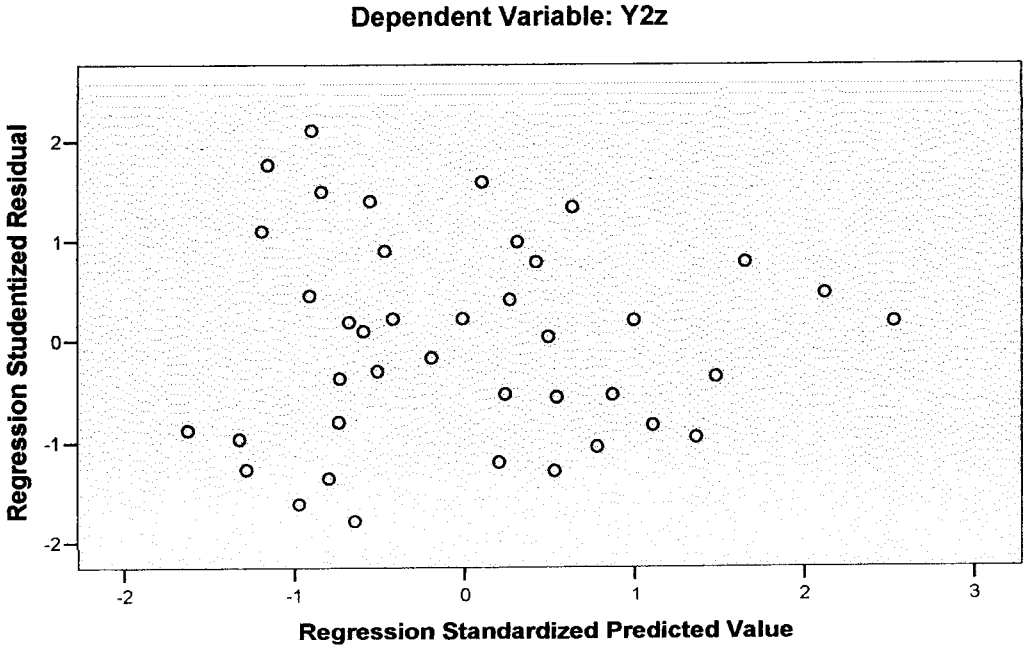

Model 3:

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y3z	.0000	1.00000	40
Xz	.0000	1.00000	40
Y1z	.0000	1.00000	40
Y2z	.0000	1.00000	40

Correlations

		Y3z	Xz	Y1z	Y2z
Pearson Correlation	Y3z	1.000	.715	.709	.816
	Xz	.715	1.000	.680	.606
	Y1z	.709	.680	1.000	.607
	Y2z	.816	.606	.607	1.000
Sig. (1-tailed)	Y3z	.	.000	.000	.000
	Xz	.000	.	.000	.000
	Y1z	.000	.000	.	.000
	Y2z	.000	.000	.000	.
N	Y3z	40	40	40	40
	Xz	40	40	40	40
	Y1z	40	40	40	40
	Y2z	40	40	40	40

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Y2z[a], Xz, Y1z	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y3z

Model Summary

					Change Statistics				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.875[a]	.765	.746	.50424	.765	39.130	3	36	.000

a. Predictors: (Constant), Y2z, Xz, Y1z

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.847	3	9.949	39.130	.000[a]
	Residual	9.153	36	.254		
	Total	39.000	39			

a. Predictors: (Constant), Y2z, Xz, Y1z

b. Dependent Variable: Y3z

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.08E-009	.080		.000	1.000					
	Xz	.239	.117	.239	2.048	.048	.715	.323	.165	.478	2.091
	Y1z	.221	.112	.221	1.968	.049	.709	.301	.153	.477	2.095
	Y2z	.537	.108	.537	4.985	.000	.816	.639	.403	.562	1.778

a. Dependent Variable: Y3z

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Xz	Y1z	Y2z
1	1	2.263	1.000	.00	.07	.07	.08
	2	1.000	1.504	1.00	.00	.00	.00
	3	.418	2.327	.00	.18	.18	.92
	4	.320	2.660	.00	.74	.75	.00

a. Dependent Variable: Y3z

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y3z

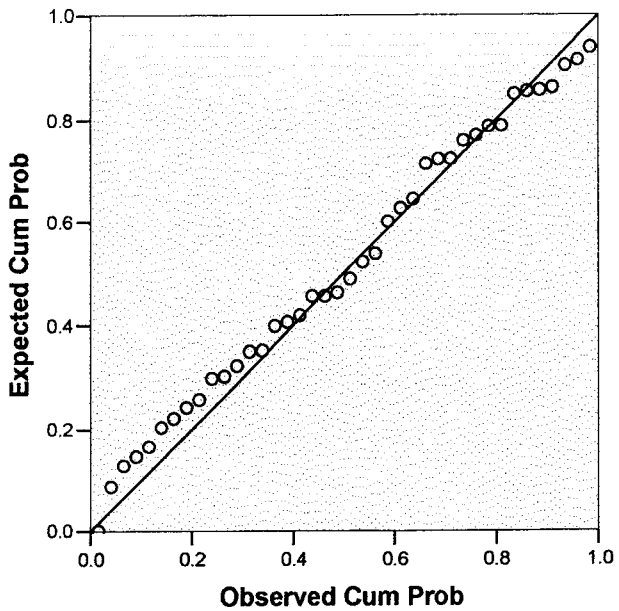

Scatterplot

Dependent Variable: Y3z

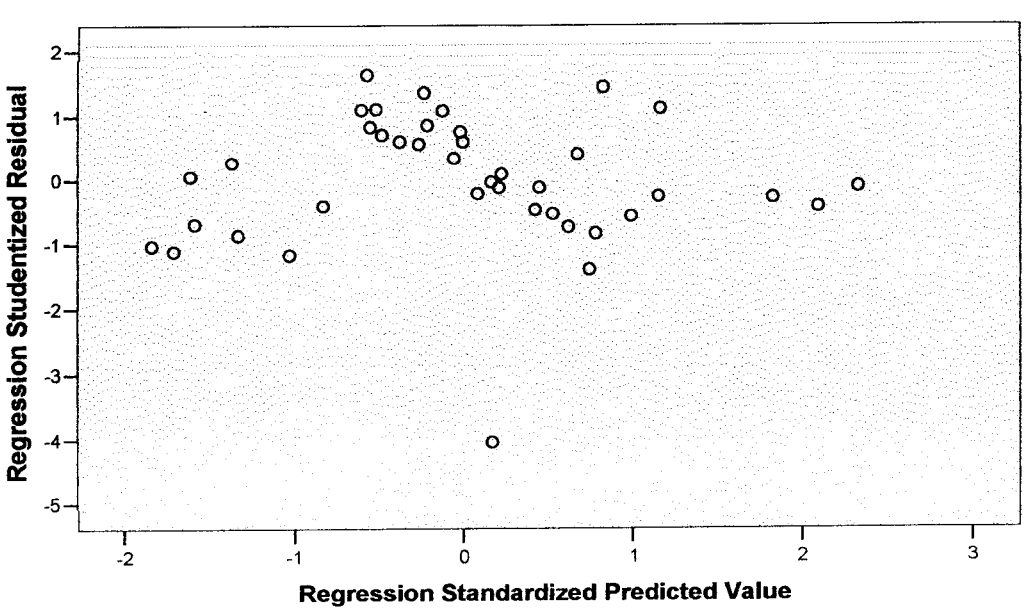

Dari Model 1, Model 2 dan Model 3 dapat dinyatakan dalam diagram jalur sebagai berikut:

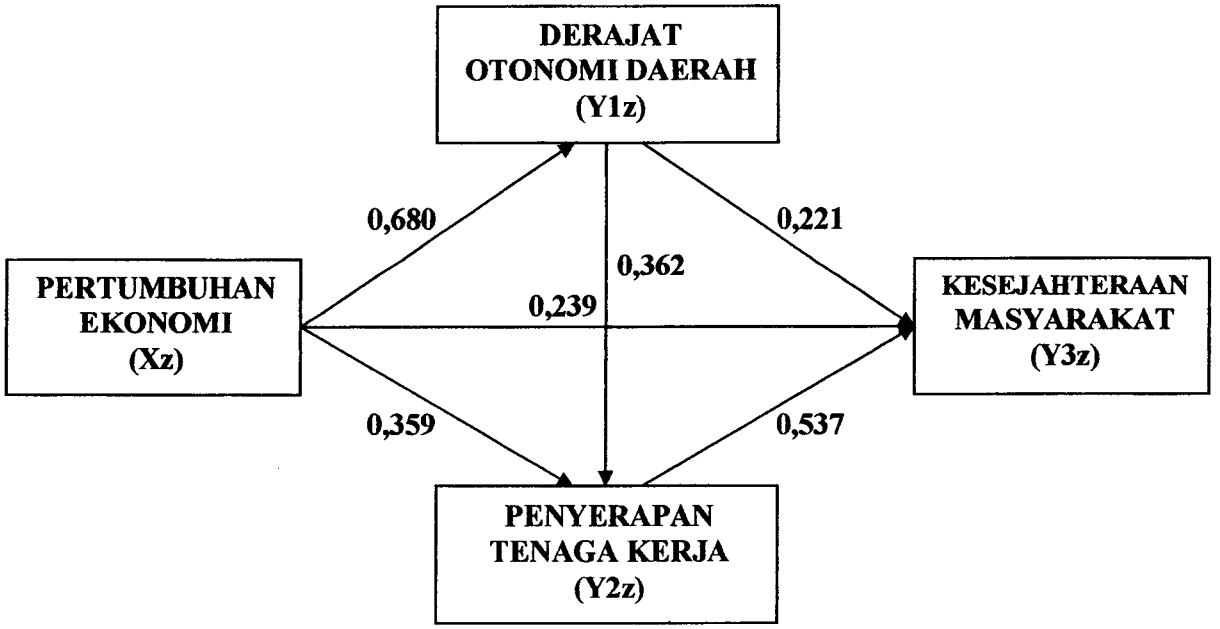

Lampiran 4 : Perhitungan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total

Pengaruh Langsung = Koefisien Regresi

Variabel	Besar Pengaruh
Xz → Y1z	0,680
Xz → Y2z	0,359
Xz → Y3z	0,239
Y1z → Y2z	0,362
Y1z → Y3z	0,221
Y2z → Y3z	0,537

Pengaruh Tidak Langsung

Variabel	Besar Pengaruh
Xz → Y1z → Y2z	0,680 x 0,362 = 0,246
Xz → Y1z → Y3z Xz → Y2z → Y3z Xz → Y1z → Y2z → Y3z	0,680 x 0,221 = 0,150 0,359 x 0,537 = 0,193 → 0,475 0,680 x 0,362 x 0,537 = 0,132
Y1z → Y2z → Y3z	0,362 x 0,537 = 0,194

Pengaruh Total = Pengaruh Langsung + Pengaruh Tidak Langsung

Variabel	Besar Pengaruh
Xz → Y1z	0,680
Xz → Y2z	0,359 + 0,246 = 0,605
Xz → Y3z	0,239 + 0,475 = 0,714
Y1z → Y2z	0,362
Y1z → Y3z	0,221 + 0,194 = 0,415
Y2z → Y3z	0,537

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA